

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera,



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Interim ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83

Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim ini memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dengan kebijakan strategis BPOM. Selain itu juga mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2025 merupakan ikhtisar tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang tertuang dalam DIPA-APBN Tahun 2025 dan juga memuat isu strategis BBPOM di Bandar Lampung. Laporan Kinerja Interim TW III tahun 2025 ini menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut.

Harapan kami, Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban BBPOM di Bandar Lampung dan dapat menjadi acuan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 Oktober 2025
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,

The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Indonesian Food and Drug Administration) in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" at the top and "DI BANDAR LAMPUNG" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp features a stylized logo of a bird or wing above the text "BADAN POM". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Bagus Heri Purnomo".

Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt.

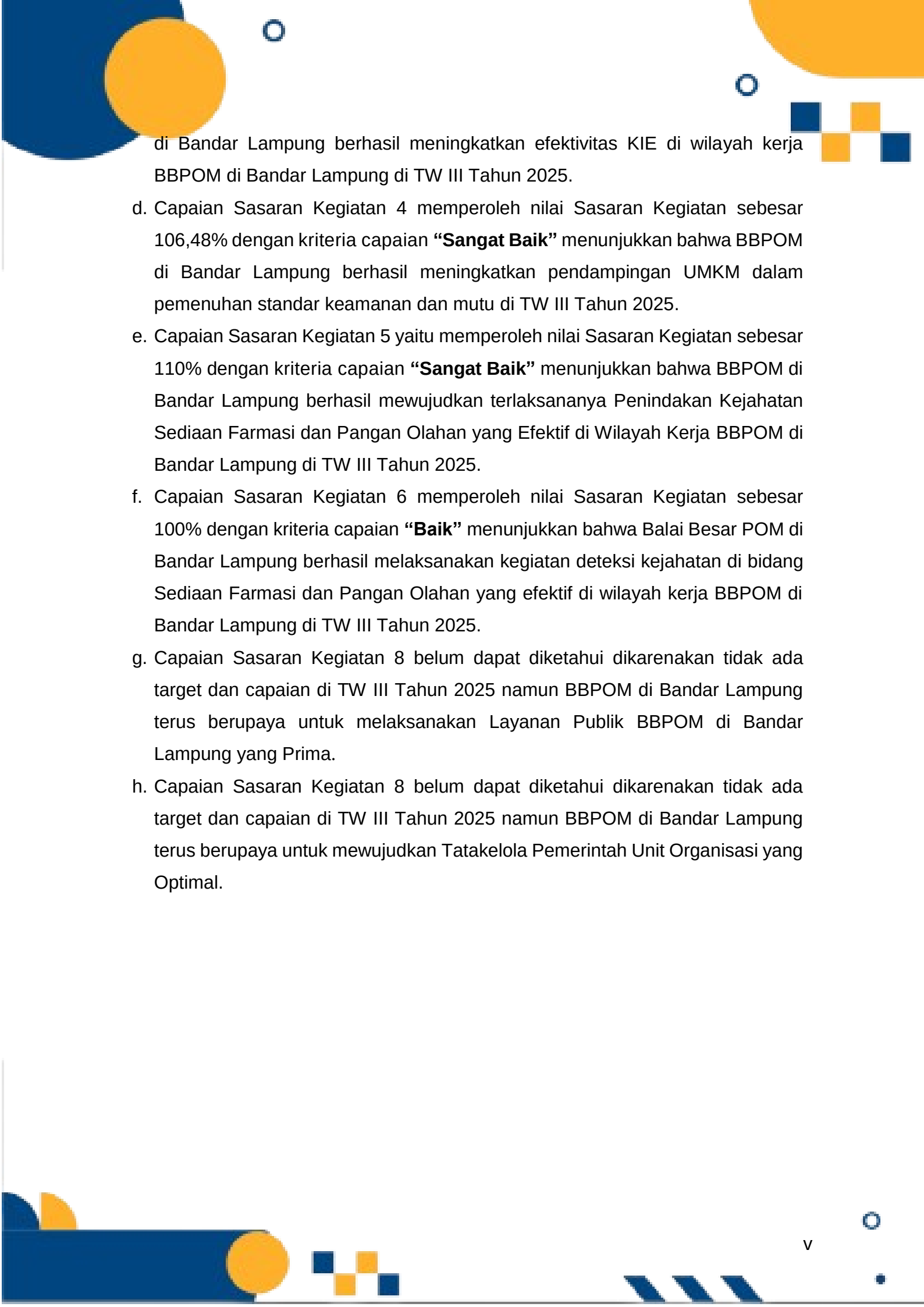
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim TW III BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah bentuk pertanggung jawaban sebagai perwujudan visi dan misi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025– 2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode rencana strategis tahun 2025-2029. Terdapat 8 Sasaran Kegiatan dengan 28 indikator kinerja yang menjadi target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM pada Bulan Agustus Tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Bandar Lampung TW III tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **105,43%** dengan kriteria **“ISTIMEWA”**.

Pencapaian Nilai Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung pada TW Ili Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Sasaran Kegiatan 1 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 106,38% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung pada TW III Tahun 2025.
- b. Capaian Sasaran Kegiatan 2 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 108,11% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di TW III Tahun 2025.
- c. Capaian Sasaran Kegiatan 3 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 101,85% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM

- 
- di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW III Tahun 2025.
- d. Capaian Sasaran Kegiatan 4 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 106,48% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di TW III Tahun 2025.
 - e. Capaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 110% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW III Tahun 2025.
 - f. Capaian Sasaran Kegiatan 6 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100% dengan kriteria capaian **“Baik”** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW III Tahun 2025.
 - g. Capaian Sasaran Kegiatan 8 belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW III Tahun 2025 namun BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya untuk melaksanakan Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang Prima.
 - h. Capaian Sasaran Kegiatan 8 belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW III Tahun 2025 namun BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

HIGHLIGHT KINERJA

1. PENGHARGAAN KOTA PANGAN AMAN

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro sebagai Terbaik II Regional Barat Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2024. Penghargaan ini diberikan Badan POM pada tri wulan I tahun 2025.



Balai Besar POM di Bandar Lampung telah mengimplementasikan Program Prioritas BPOM Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah aman dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada tahun 2020 dan Pemda

Kota Metro telah melakukan replikasi bertahap untuk program desa pangan aman tahun 2022 dan 2023. BBPOM di Bandar Lampung setiap tahun terus melakukan pengawalan terhadap keberlangsungan ketiga program nasional tersebut. Dukungan lintas sektor dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemda Kota Metro sangat kuat untuk menjaga keamanan pangan baik di sektor pangan segar maupun pangan olahan.

Kota Metro menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat Terbaik II Regional Barat dalam ajang Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Metro bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, bermutu, dan terjamin bagi masyarakat. Keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara BBPOM di Bandar Lampung dalam hal pengawasan pangan, edukasi masyarakat, serta penguatan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan daerah, apresiasi ini diberikan oleh Badan POM dalam ajang lomba kabupaten/kota pangan aman

2. INOVASI BERLANJUT, SINERGI SEMAKIN KUAT!





QRIS-PUSAKA 2025 hadir kembali dengan semangat baru melalui kegiatan KIE bertema "Aman Produknya, Aman Pembayaran, Terjamin Halalnya", yang dilaksanakan di Pasar KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) Lebak Budi Bandar Lampung pada 12 Maret 2025.

Kolaborasi antara BBPOM Bandar Lampung, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder ini mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan, transaksi digital, dan produk halal.

Kegiatan ini ditandai dengan dilaunchingnya Pasar Khas Lebak Budi, *talkshow* produk aman dan Halal, yang langsung disampaikan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung, dan stikerisasi Qris-Pusaka di pasar Lebak Budi, yang sebelumnya BBPOM di Bandar Lampung juga telah melaksanakan sampling dan pengujian terhadap pangan yang dijual di pasar Lebak Budi, QRIS-PUSAKA menjadi langkah nyata membangun pasar yang sehat, modern, dan inklusif, "Aman Produknya, Aman Pembayaran, Terjamin Halalnya "

3. TERBAIK 3 PADA KATEGORI PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

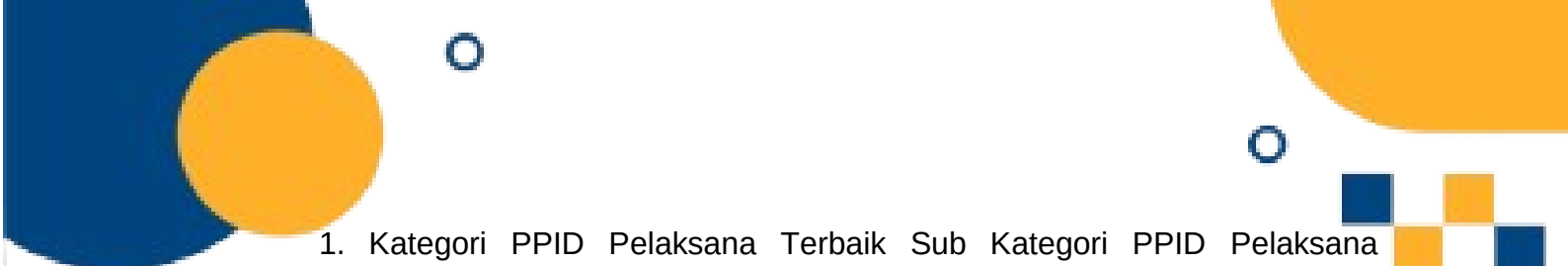


Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah menginput data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang didapatkan dari berbagai sumber salah satunya adalah pelimpahan barang bukti hasil penindakan Dirjen Bea dan Cukai berupa produk obat-obat tertentu dan obat psikotropik dan data hasil penyelidikan substansi Penindakan BBPOM di Bandar Lampung secara lengkap dan rutin (real time) di aplikasi dashboard penindakan sebanyak 247 data sehingga mendapat peringkat ke-3 Terbaik dan terbanyak.

4. BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG RAIH 2 PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2025



Ajang kompetisi bergengsi Anugerah Humas Indonesia kembali di gelar tahun 2025. Humas Indonesia, untuk ketujuh kalinya dengan bangga kembali mempersembahkan kompetisi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025. Ajang kompetisi kinerja akuntabilitas komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU) se-Indonesia. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung pada ajang tersebut mengirimkan 2 *entry*, yaitu:

- 
1. Kategori PPID Pelaksana Terbaik Sub Kategori PPID Pelaksana Terbaik; dan
 2. Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Sub Kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung menyajikan pemaparan dengan Judul sebagai berikut:

- Program Buka Informasi, Bangun Kepercayaan Publik untuk Sub Kategori PPID Pelaksana Terbaik.
- Nyaman dan Inovatif, Layanan Publik yang Menginspirasi dan Membahagiakan untuk Sub Kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik.

Awarding Night THE 7th ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2025 di selenggarakan di Hotel JW Marriott, Surabaya pada tanggal 25 September 2025. Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meraih penghargaan:

1. GOLD WINNER Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Sub Kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik; dan
2. BRONZE WINNER Kategori PPID Pelaksana Terbaik Sub Kategori PPID Pelaksana Terbaik.

Penghargaan tersebut diraih sebagai wujud pembuktian dan komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik, dan dengan semangat “Buka Informasi, Bangun Kepercayaan”, kami berkomitmen menjadi lembaga yang transparan dan terpercaya dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Transparansi bukan hanya kewajiban, tapi juga langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik dan pelayanan prima.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	17
1.3 Struktur Organisasi	19
1.4 Isu Strategis	20
1.5 Analisis SWOT	31
1.6 Analisis Lingkungan Strategis.....	56
BAB II.....	57
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	57
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	63
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	65
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	72
2.5 Metode Pengukuran.....	81
BAB III.....	85
3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi.....	85
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	106
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung	123
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	129
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	134
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	140
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	146
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	151

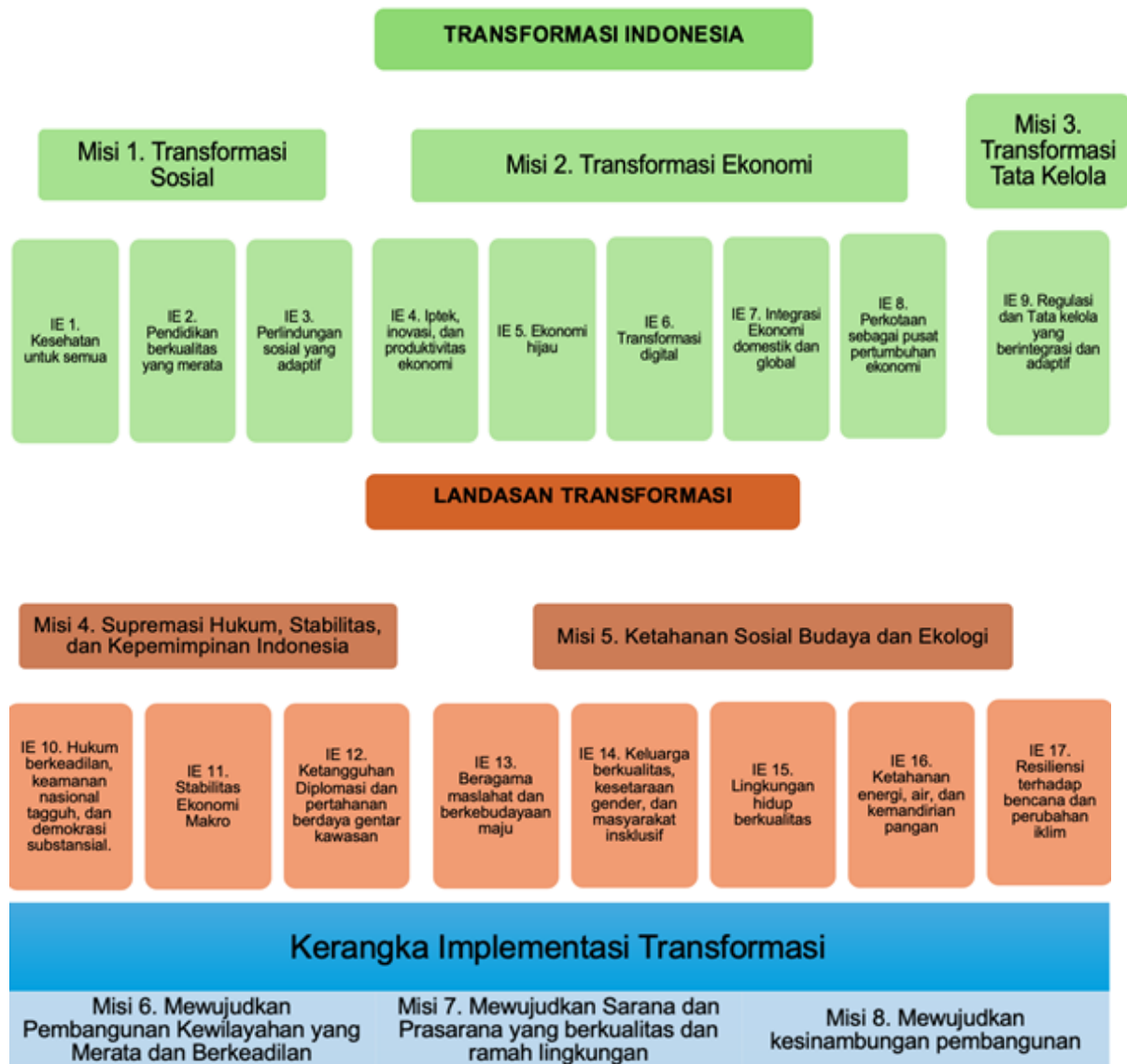
10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	158
11.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 163	
12.	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	169
13.	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah BBPOM di Bandar Lampung	174
14.	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	179
15.	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....	187
1.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	190
1.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	194
2.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	201
3.	Jumlah desa pangan aman	207
4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	211
1.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	215
1.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	226
1.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	231
1.	Indeks Pelayanan Publik UPT	237
1.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....	242
2.	Nilai AKIP UPT BPOM	251
3.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	259
3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	272
3.3	Realisasi Anggaran	427
3.4	Tingkat Efisiensi Anggaran.....	439
BAB IV		452
4.1	Kesimpulan	452
4.2	Saran/Rekomendasi	454

BAB I

PENDAHULUAN

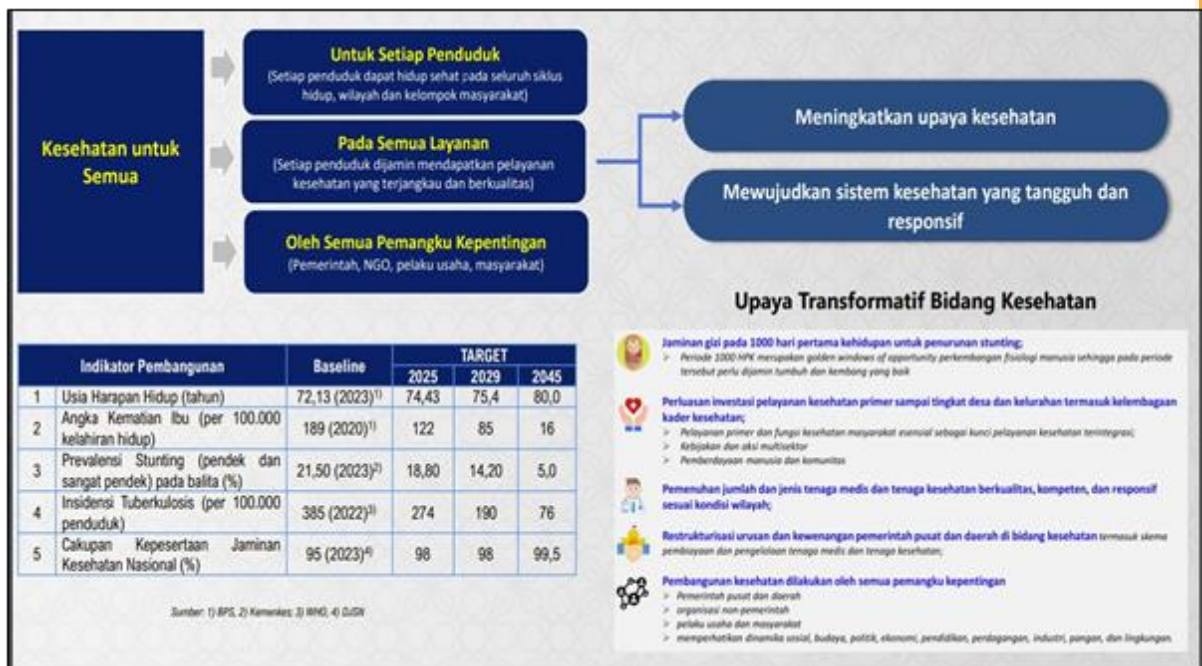
1.1 Latar Belakang

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk akselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang **cerah** bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.



Sumber: Bappenas.

Gambar 1.1 Misi dan Arah Pembangunan dalam PJPN



Gambar 1.2 Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, **penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans** menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 -2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan



pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Badan POM di wilayah Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) UPT (terdiri dari 15 Kabupaten Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, cakupan pengawasan meliputi 10 Kabupaten Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang, cakupan pengawasan meliputi 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.



Gambar 1.3 Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
8. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

- 
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
 11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada $105^{\circ}45'BT$ sampai $103^{\circ}48'BT$ dan $3^{\circ}45'LS$ sampai $6^{\circ}45'LS$, yang meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara, selat Sunda di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah barat. Secara administratif, provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 215 kecamatan dan 2.463 desa.

1.3 Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung pada Triwulan III Tahun 2025 dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM dan terdiri dari 1 Bagian Tata Usaha serta 4 Kelompok Substansi yaitu Substansi Pemeriksaan, Substansi Informasi dan Komunikasi, Substansi Pengujian dan Substansi Penindakan.



Gambar 1.4 Struktur organisasi BBPOM di Bandar Lampung

1.4 Isu Strategis

Seiring dengan dinamika dan perkembangan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menuju otoritas obat yang diakui secara global dalam WHO *Listed Authority* (WLA), maka pada tahun 2025 ini semakin berkembang pula tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Isu terkini yang dapat mempengaruhi pengawasan Obat dan Makanan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis tersebut yaitu :

a) Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 ke-4 atau lebih dikenal dengan Asta Cita 4 adalah Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia diukur dari potensi produktivitas yang didukung pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusun Arah Pembangunan Kesehatan 2025-2045 yaitu meningkatkan upaya kesehatan dan mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Salah satu upaya dalam mewujudkan Sistem Kesehatan yang tangguh dan responsif dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan obat dan makanan. Penguatan BPOM dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan ke depan



antara lain memperkuat sistem pengawasan *pre-market* dan *post market* sebagai bentuk pengendalian resiko atas peredaran produk *illegal* atau berbahaya, penguatan dan inovasi sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien, memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan, memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terkait obat dan makanan, memperkuat kerja sama dengan *stake holder* dan lintas sektor terkait.

Sebagai upaya transformasi bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini berupa restrukturisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kesehatan; Investasi pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan kelurahan; penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan kesehatan berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah; pengendalian produksi, pemasaran, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu transformasi bidang kesehatan yang terkait dengan fungsi BPOM adalah penuntasan stunting. Progam unggulan pemerintah dalam penuntasan stunting adalah pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. BPOM berperan serta dalam mengawal terkait dengan keamanan dan mutu produk yang akan dibagikan.

Terdapat emerging iSKue yang mengancam sistem kesehatan di masa depan yaitu terjadinya AMR (*Anti Microbial resistance*). 1,27 juta kematian secara global pada tahun 2019 disebabkan oleh infeksi yang resistan terhadap obat dan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah kematian akan mencapai 10 juta kematian setiap tahunnya jika resistensi antibiotik tidak dapat dikendalikan (*Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: Sytematic Anlysis (The Lancet Vol. 399, February 2022)*). Terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya resistensi antibiotik antara lain pola peresepan yang tidak rasional, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, penggunaan antibiotik di sektor peternakan dan perikanan yang berlebihan dan

pembuangan sisa antibiotik yang tidak digunakan lagi karena telah rusak maupun kadaluarsa ke sembarang tempat.

Resistensi antimikroba memunculkan ancaman serius bagi Indonesia dan seluruh dunia sehingga perlu upaya semua pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mencegah terjadinya resistensi antimikroba. BPOM perlu meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas pertanian dalam melakukan pengawasan, peredaran maupun penggunaan antibiotik secara tepat. Edukasi kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat perlu terus digalakkan. BBPOM di Bandar Lampung dan lintas sektor terkait menerapkan kebijakan ketat dalam penggunaan antimikroba, baik di sektor kesehatan maupun veteriner. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap resep antibiotik, pengawasan bersama (wasber) terhadap penggunaan antibiotik dalam produk hewan, serta kampanye edukasi untuk masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan antimikroba yang bijak.

b) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga negaranya diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu indikator pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini adalah cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang mencapai 98 % di tahun 2025 yang merupakan awal RPJPN dan 99 % di tahun 2045 sebagai akhir RPJPN.

Dengan target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi maka ketersediaan dan keterjangkauan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat merupakan salah satu parameter yang harus terpenuhi di tengah peningkatan permintaan dan perluasan distribusi. Distribusi obat tidak hanya mencakup wilayah



perkotaan tetapi juga harus menjangkau daerah terpencil dan pelosok. Faktor-faktor seperti kondisi jalan yang buruk, infrastruktur yang terbatas, dan keterbatasan logistik di daerah terpencil dapat mempengaruhi kualitas obat selama distribusi. Tantangan ini menuntut adanya sistem distribusi/CDOB yang dapat memastikan bahwa obat tetap dalam kondisi baik sepanjang jalur distribusi baik dari hulu sampai ke hilir.

Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan mutu obat di era JKN adalah manajemen stok yang efektif. Obat harus disimpan dalam kondisi yang sesuai persyaratan penyimpanan yang spesifik, seperti suhu dan kelembaban. Ketidaksesuaian dalam penyimpanan dapat menurunkan kualitas obat sebelum sampai ke pasien. Kondisi permasalahan saat ini antara lain fasilitas kesehatan yang kurang dilengkapi dengan infrastruktur penyimpanan yang memadai. Manajemen rantai pasokan yang efisien, termasuk pengendalian stok yang baik, menjadi kunci untuk menghindari kerusakan atau kadaluarsa obat. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, mulai dari kepatuhan terhadap standar produksi dan distribusi, manajemen stok yang efektif, hingga edukasi yang berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, program JKN dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap obat yang sampai ke pasien adalah produk yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi.

c) Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi batasan antara satu negara dengan yang lain. Seseorang dapat terhubung di seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu. Begitu juga dengan sistem perdagangan, dengan globalisasi menyebabkan tidak adanya batasan perdagangan antar suatu negara atau yang lebih dikenal dengan perdagangan bebas. Dengan teknologi dan kemudahan akses, perdagangan dunia akan semakin terbuka luas melewati batas suatu negara.

Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti masuknya berbagai macam produk obat dan makanan import dari negara lain. Maraknya produk import yang membanjir merupakan tantangan dalam sistem pengawasan mutu dan keamanan produk. Produk impor yang masuk harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP) yang berasal dari produk *import* maka perlu dilakukan strategi secara komprehensif dalam hal pengawasan peredaran produk import. Literasi masyarakat terkait keamanan pangan khususnya keamanan produk-produk import perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri terhadap peredaran produk impor yang tidak aman.

Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap maraknya peredaran obat dan makanan secara online. Pertumbuhan akun/web penjualan online sangat cepat tanpa diimbangi dengan teknologi *crawling* yang memadai dalam pengawasannya sehingga kesulitan dalam melakukan patroli cyber secara efektif dan efisien. Penjualan *online* di *marketplace* terutama untuk komoditas khusus yaitu obat dilakukan secara bebas. Berbagai macam obat baik itu golongan obat psikotropik, obat keras maupun obat bebas dan bebas terbatas dapat dengan mudah kita jumpai di *marketplace*. Hal tersebut merupakan tantangan dengan kompleksitas tinggi dalam sistem pengawasan obat dan makanan.

d) Perubahan Iklim

Pemanasan global yang terjadi secara cepat dapat mengakibatkan perubahan iklim yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan manusia. Perubahan iklim dapat memicu perubahan *trend* penyakit di masyarakat akibat perkembangbiakan penyakit tular vektor yang berkaitan dengan suhu, kelembaban udara dan curah hujan. Bencana alam seperti banjir, kekeringan dapat terjadi akibat adanya perubahan iklim. Berbagai macam penyakit akan timbul seiring dengan terjadinya bencana alam seperti diare, kolera, malaria, dan lain-lain. Dengan bergesernya pola penyakit secara otomatis akan merubah kebutuhan penggunaan obat oleh masyarakat. Seiring dengan kebutuhan obat yang meningkat akibat terjadinya

bencana maka banyak bermunculan donasi obat. BPOM harus dapat memastikan bahwa obat yang digunakan aman dan bermutu. Manajemen suplai obat juga harus dipastikan bahwa distribusi obat sampai ke konsumen.

e) Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Perubahan ekonomi dan sosial di Lampung membawa dampak signifikan pada pola konsumsi masyarakat dan tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Pada 2023, pendapatan per kapita Lampung tercatat sekitar Rp 50 juta per tahun (USD 3.300), menunjukkan tren peningkatan meskipun masih di bawah rata-rata nasional (BPS, 2023). Transaksi *e-commerce* di Lampung terus menunjukkan peningkatan signifikan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan pengguna transaksi elektronik sebesar 45,61% pada paruh pertama tahun 2023, dengan sekitar 217.061 pengguna baru. Volume transaksi melalui QRIS di Lampung mencapai 4,81 juta transaksi dalam periode tersebut, dengan target total transaksi tahunan sebesar 11,6 juta. Selain itu, jumlah pengguna QRIS di Lampung tercatat sebanyak 868.456 orang, dan merchant QRIS mencapai 417.944 unit. Transformasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung semakin beralih ke sistem pembayaran digital, didukung oleh daya beli yang terus meningkat serta penerapan digitalisasi pada semua kabupaten/kota di Lampung. Tren ini menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kemudahan dan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan produk-produk yang diawasi BPOM.

Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing. BBPOM di Bandar Lampung telah memiliki inovasi QRIS Pusaka yang menjadi salah satu inisiatif utama untuk mendukung inklusi keuangan dan mempermudah transaksi digital bagi masyarakat luas sekaligus mensinergikan edukasi Produk Unggul, SehAt, berKualitas dan Aman (PUSAKA) sesuai tupoksi Badan POM. Kemudahan dalam pelayanan publik perlu didukung dengan digitalisasi sehingga mendorong kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang memproduksi produk bersertifikasi BPOM. BBPOM di Bandar

Lampung berperan aktif sebagai pendorong digitalisasi pembayaran melalui program QRIS PUSAKA dan terus memberdayakan UMKM yang telah berkomitmen menyediakan produk yang aman, berkhasiat dan bermutu

Isu sosial yang menjadi perhatian saat ini juga mencakup isu pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dimana pemerintah dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. BPOM berkomitmen bahwa kesetaraan gender bukanlah dominasi salah satu gender melainkan kolaborasi antar kelompok. Isu kesetaraan gender memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pemberdayaan masyarakat terkait obat dan makanan yang selama ini lebih banyak melibatkan kaum wanita. Disamping itu, fasilitas dan pelayanan publik di BBPOM di Bandar Lampung juga harus mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang memerlukan layanan.

f) Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Bonus demografi di Lampung, dengan populasi usia produktif mencapai 64,41% pada 2023 (BPS). Tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan kelompok usia 0-14 tahun dan risiko ketergantungan menurun. Bonus demografi ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan visi Indonesia Emas 2045. Lampung termasuk dalam 29 provinsi yang masih berada pada tahap awal bonus demografi dan diperlukan pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung termasuk dalam kategori “sedang”, lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

Kemudahan berusaha seharusnya menjadi *window of opportunity* bagi kelompok usia produktif untuk membuka usaha secara mandiri. BBPOM di Bandar Lampung telah mempunyai program pendampingan UMKM untuk dapat menghasilkan produk pangan olahan dengan sertifikasi izin edar BPOM sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pangan olahan yang dihasilkan.



Kelompok usia produktif juga merupakan kelompok yang mudah untuk diintervensi dengan edukasi mengenai produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu sehingga menjadi peluang untuk menjadi perpanjangan tangan BBPOM di Bandar Lampung sebagai *Agent of Change* di masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawalan keamanan, khasiat dan mutu produk yang beredar. Saat ini, BBPOM di Bandar Lampung telah mempunyai SAKA POM yang aktif dan kedepannya perlu dijajaki potensi kolaborasi dengan organisasi kepemudaan lainnya. Kegiatan lainnya yang telah diinisiasi BPOM adalah Pangan Aman Goes to Campus (PAGC). PAGC merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi Dosen dan Mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada UMKM Pangan Olahan.

Bonus demografi menyisakan kelompok balita, anak usia sekolah yang perlu dipersiapkan menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045 dan kelompok rentan yang diharapkan tidak menjadi beban generasi. Tantangan Indonesia Emas tahun 2045 juga dihadapkan pada permasalahan stunting yang harus diturunkan dengan intervensi pada ibu hamil. Oleh karenanya, pemerintah di tahun 2025 akan menginisiasi program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah, pesantren dan Ibu hamil. MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program ini dinilai memiliki dampak yang besar dalam pembangunan generasi muda, namun menghadirkan tantangan tersendiri untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan tidak berisiko terhadap kesehatan. BPOM telah diamanatkan dalam pengawasan keamanan makanan (uji keamanan makanan) dalam program MBG lintas K/L dan Pemda. Hal ini menghadirkan tantangan dalam pengawalan produk dimana BBPOM di Bandar Lampung harus menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia, laboratorium pengujian dan sistem surveilans yang baik untuk mengawal keamanan dan mutu makanan dimaksud.

g) Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, KPID, dan organisasi profesi.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, pemerintah telah mengalokasikan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (DAK POM). DAK POM dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan apotek dan toko obat, UMOT dan IRTP serta KIE Obat dan Makanan dan Bimtek Kader. Dengan adanya dana DAK ini, diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai penanggung jawab dana di daerah untuk memastikan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, diperlukan koordinasi agar tidak terjadi redudansi dalam kegiatan pembinaan



dan pengawasan baik terhadap produk maupun sarana yang menjadi target pengawasan BBPOM di Bandar Lampung.

Koordinasi dengan daerah dalam pelaksanaan kegiatan Makan Bergizi Gratis meliputi koordinasi keterlibatan *District Food Inspector* dalam pengawasan makanan dan kitchen inspection. Diperlukan SOP dan pembagian peran sehingga pengawasan MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan tuntutan yang semakin tinggi kepada BBPOM di Bandar Lampung sebagai leading sector pengawasan obat dan makanan, diperlukan koordinasi yang lebih luas. Selama ini koordinasi lebih fokus pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait desa pangan aman, pangan jajanan anak sekolah dan pasar aman sehingga kedepannya advokasi dan koordinasi perlu diperluas. Koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor seperti Komite Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) diperlukan dalam rangka perkuatan jejaring surveilans keamanan obat dan vaksin dalam rangka dukungan menuju BPOM sebagai *WHO Listed Authority*. Di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi perlu diperluas ke bidang surveilans kesehatan sebagai langkah antisipatif Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan, KIPI maupun kasus lainnya yang memerlukan sistem surveilans yang cepat dan responsif.

Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan Panjang dan jalur Trans-Sumatera, yang menjadi akses strategis distribusi produk antar wilayah. Pada 2023, Pelabuhan Panjang menangani sekitar 10 juta ton barang per tahun, termasuk produk farmasi dan makanan. Koordinasi lintas sektor di pelabuhan memainkan peran krusial dalam pengawasan produk ilegal, terutama obat dan makanan. Sebagai jalur utama distribusi barang antar pulau, pelabuhan-pelabuhan ini menghadapi arus barang yang sangat besar, yang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak terkait untuk mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan

manfaat. (sudah ada perlu intensifikasi) koordinasi dengan Bea Cukai, Karantina Kesehatan dan Kepolisian untuk pengawasan pemasukan produk di wilayah provinsi Lampung.

h) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi telah membawa transformasi signifikan dalam pengawasan obat dan makanan, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses pengawasan. Teknologi modern memungkinkan otoritas pengawas, seperti BPOM di Indonesia, untuk menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks akibat globalisasi, inovasi produk, dan meningkatnya risiko peredaran ilegal. Laporan Kemenkominfo menunjukkan pertumbuhan transaksi daring sebesar 30% pada 2022, dengan kategori obat dan makanan menjadi salah satu segmen teratas.

Pemantauan media sosial dan *e-commerce* melalui patroli siber adalah langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan, mengingat meningkatnya transaksi daring yang sering kali melibatkan produk ilegal, tidak terdaftar, atau tidak memenuhi standar keamanan. Platform digital ini menjadi saluran utama distribusi produk, sehingga pengawasan berbasis teknologi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Meskipun BPOM telah mengatur regulasi penjualan obat di media daring melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring namun saat ini banyak pengguna media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memanfaatkan fitur *marketplace* atau *live streaming* untuk menjual produk yang sulit diawasi secara fisik. Produk ilegal sering dipasarkan dengan klaim berlebihan atau tidak sesuai regulasi. Kemudahan berbelanja online membuat konsumen lebih rentan membeli produk tanpa memverifikasi keamanannya. Diperlukan teknologi machine learning dan analisis big data yang mumpuni untuk bisa melakukan patroli siber secara efektif dan efisien. Selain itu, penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pengawasan dan tindak

lanjut penjualan obat secara daring untuk bisa mengontrol peredaran produk pada fasilitas penjualan obat di luar PSEF.

Untuk kemudahan pengawasan produk, BPOM telah meluncurkan aplikasi BPOM *mobile* yang dapat digunakan petugas pengawas maupun masyarakat dalam memastikan izin edar produk obat dan makanan yang beredar. Namun demikian, dalam kegiatan pengawasan masih sering ditemukan produk tanpa izin edar yang diperjualbelikan. Diperlukan kampanye yang lebih masif dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan aplikasi BPOM *mobile* untuk memverifikasi kebenaran izin edar produk yang dipasarkan.

Dalam mewujudkan komitmen dan kualitas pelayanan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi, BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.5 Analisis SWOT

1.5.1 Kekuatan (*Strength*)

1. Kompetensi dan Pengalaman Kerja Pegawai BBPOM di Bandar Lampung

Pegawai di BBPOM Bandar Lampung dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mumpuni, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan profesional. Kompetensi ini menjadi dasar utama dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi yang akuntabel.

Distribusi pegawai di BBPOM di Bandar Lampung tersebar pada unit pemeriksaan, terdapat komposisi yang cukup merata, dengan dominasi pegawai berpendidikan S1 dan D3, masing-masing sebanyak 9 dan 6 orang. Sedangkan pada unit pengujian, jumlah pegawai berpendidikan SLTA mendominasi dengan 29 orang, diikuti oleh S1 sebanyak 17 orang. Hal ini menunjukkan kebutuhan operasional laboratorium yang lebih banyak melibatkan tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan menengah atas yang terlatih. Di unit penindakan,



komposisi SDM lebih beragam, dengan 2 pegawai S2, 3 pegawai S1, dan 1 pegawai D3. Sementara itu, pada unit tata usaha, distribusi pendidikan terlihat lebih seimbang dengan 7 orang berpendidikan SLTA, diikuti oleh 6 orang S1, yang mendukung aktivitas administratif dan manajerial. SDM pada bidang Infokom terdiri dari 2 pegawai S2, 1 pegawai S1, dan 1 pegawai profesi.

Berdasarkan data penilaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024, terdapat 80 pegawai yang telah dinilai dengan hasil total nilai sebesar 87,31, sedikit di bawah target nilai IP yang ditetapkan, yaitu 90,66. Penilaian ini mencakup empat komponen utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, dengan bobot nilai yang berbeda sesuai dengan prioritas.

1. Kualifikasi memiliki bobot sebesar 25%, dengan nilai akhir mencapai 22,33 atau 89,32%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memenuhi standar pendidikan dan keterampilan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
2. Kompetensi, yang memiliki bobot terbesar sebesar 40%, memperoleh nilai 34,79 atau 86,98%, mencerminkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan tanggung jawab mereka. Meski cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan guna mencapai target yang lebih optimal.
3. Kinerja, dengan bobot 30%, mencatat nilai 25,19 atau 83,97%, menandakan bahwa pencapaian output pekerjaan pegawai cukup baik, meskipun perlu penguatan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja.
4. Disiplin, meski memiliki bobot terkecil, yaitu 5%, berhasil mencapai nilai sempurna 5 atau 100%, menunjukkan tingkat kepatuhan pegawai terhadap aturan dan tata tertib kerja sangat baik.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan performa yang cukup baik, namun masih memerlukan upaya tambahan, terutama pada aspek kompetensi dan kinerja, untuk mencapai target nilai IP yang telah ditetapkan. BBPOM dapat mengambil langkah strategis, seperti pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja



yang lebih komprehensif, dan program peningkatan motivasi kerja untuk memastikan seluruh pegawai dapat mencapai potensi maksimal mereka. Hal ini penting untuk mendukung efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan yang berkualitas.

2. Transparansi Anggaran

Ketersediaan anggaran yang cukup dan transparan merupakan salah satu kekuatan utama yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggaran yang memadai memungkinkan lembaga ini untuk melaksanakan berbagai program pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum secara optimal. Dengan anggaran yang mencukupi, BBPOM dapat memastikan kelancaran operasional, seperti pelaksanaan sampling produk, pengujian laboratorium, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, hingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting yang mendukung akuntabilitas lembaga ini. Pengelolaan anggaran yang terbuka memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan sesuai perencanaan dan prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal, bahwa BBPOM bekerja dengan integritas tinggi dalam mendukung keamanan dan mutu obat serta makanan.

Lebih dari itu, ketersediaan anggaran yang transparan memberikan peluang untuk membangun kolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang jelas dan terencana, BBPOM dapat mengidentifikasi area yang memerlukan investasi tambahan, seperti peningkatan sarana laboratorium, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. Transparansi ini juga mempermudah evaluasi kinerja sehingga lembaga dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

3. Keterbukaan Informasi Publik

BBPOM di Bandar Lampung sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Monev pengelolaan Informasi dan Dokumen telah dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung secara menyeluruh yang meliputi pengembangan media pelayanan, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik sehingga memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan seputar layanan, kinerja, dan anggaran. Dalam periode 2 tahun berturut-turut (2023-2024) mendapat penghargaan sebagai UPT dengan kategori “Informatif”. Hal ini menggambarkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan Keterbukaan Informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Memadai

Pemanfaatan teknologi informasi yang memadai juga menjadi keunggulan BBPOM Bandar Lampung dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem pelaporan dan pengumpulan data base telah menggunakan sistem elektronik. Dengan sistem berbasis teknologi memungkinkan pengolahan data pengawasan yang lebih cepat, penyampaian informasi kepada masyarakat yang lebih efektif, serta pengelolaan administrasi yang terintegrasi.

5. Penerapan Sistem Mutu Terintegrasi

Dalam rangka memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, BBPOM di Bandar Lampung telah tersertifikasi berbagai sistem mutu, antara lain ISO 9001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI

ISO/IEC 17025: 2017 tentang Kompetensi Laboratorium Pengujian, SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapanan. Sebagai bukti komitmen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan predikat WBBK (Wilayah Bersih Bebas Melayani) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

6. Layanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Prima

Kekuatan lainnya adalah integritas layanan publik yang telah diakui, mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Budaya Layanan SBM Hati (Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia = Melayani dengan tulus sampai pelanggan bahagia) selalu diterapkan oleh semua petugas Layanan di BBPOM Bandar Lampung. Letak geografis yang strategis, yaitu di pusat kota Bandar Lampung, juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan. Selain itu, keberagaman latar belakang pegawai dari berbagai suku menjadi cerminan budaya kerja inklusif di BBPOM, yang mendorong terciptanya kerja sama dan sinergi yang harmonis dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan berbagai kekuatan ini, BBPOM di Bandar Lampung terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya aman, bermutu, dan bermanfaat. Strategi ini tidak hanya mendukung visi organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan.

7. Standar Ruang Lingkup Pengujian Optimum

Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul yang terefleksi ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP) dan ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar tersebut merupakan acuan bagi BBPOM di Bandar

Lampung untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan; menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan; serta monitoring ketersediaan peralatan laboratorium.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BBPOM di Bandar Lampung berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan masing-masing parameter pengujian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian laboratorium BBPOM di Bandar Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai SRL yang diperoleh secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024 adalah 75,85%, 83,0%, 88,7%, dan 95,42%. Nilai SRL sebesar 95,42% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemenuhan standar ruang lingkup pengujian di laboratorium BBPOM Bandar Lampung telah mencapai tingkat optimal, dengan syarat minimal $SRL > 65\%$. Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung juga memiliki kemampuan pengujian yang baik, baik secara kimia maupun mikrobiologi, terhadap produk obat, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan.

8. Tingginya Ekspektasi Masyarakat Terhadap Keberadaan BBPOM di Bandar Lampung

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, BBPOM harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi

kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan BBPOM untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

Sosialisasi terkait 3 unsur terendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta Waktu Penyelesaian layanan, telah dilakukan melalui subsite, media sosial dan media luar ruang. BBPOM Lampung sangat memperhatikan masukan dari masyarakat melalui SKM sebagai upaya memperbaiki dan lebih meningkatkan pelayanan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan nilai sangat baik selama tahun 2023 dan 2024 yaitu di kisaran angka 93 - 99 setiap bulannya.

Dengan tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja dan layanan maka BBPOM di Bandar Lampung terus bergerak melakukan perbaikan yang menjadi *booster* untuk kerja lebih keras, cerdas dan ikhlas.

1.5.2 Kelemahan (*Weakness*)

1. Gap Jumlah SDM dengan ABK

BBPOM di Bandar Lampung juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan. Salah satu kelemahan utama adalah jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga belum seimbang dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Selain itu, terdapat pegawai yang masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.

2. Sarana Penunjang Pengawasan Termasuk Laboratorium Belum Memadai

Kelemahan lainnya adalah sarana penunjang pengawasan yang belum memadai, yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelaksanaan pengawasan, terutama dalam mendeteksi produk yang tidak memenuhi standar. Ketersediaan reagen dan metoda analisis sangat mempengaruhi kemampuan laboratorium untuk melakukan pengujian terhadap produk tertentu yang memerlukan peralatan lebih spesifik, serta mempengaruhi kecepatan pelaporan hasil pengujian. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, nilai pemenuhan standar peralatan laboratorium BBPOM di Bandar Lampung sebesar 71,91% masih belum optimal, meskipun telah memenuhi syarat minimal > 70%.

3. Implementasi *Core Value* ASN BERAHLAK Belum Optimal

Pengawasan obat dan makanan yang efektif sangat bergantung pada hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara semua pihak terkait, baik di dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Namun, implementasi nilai harmonis dan kolaboratif dalam *core value* ASN BERAHLAK yang belum optimal di BBPOM di Bandar Lampung dapat menjadi salah satu kendala besar dalam pengawasan. Nilai harmonis, yang menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara unit-unit di dalam instansi, sering kali masih belum berjalan secara maksimal.

Ketidakharmonisan dapat memperlambat proses pengawasan dan terlambatnya respons terhadap masalah yang muncul. Misalnya, jika komunikasi antara unit yang menangani regulasi dan unit yang melakukan inspeksi atau pengujian produk tidak lancar, penanganan masalah terkait obat dan makanan yang berbahaya akan menjadi lebih lambat dan kurang efektif.

Selain itu, nilai kolaboratif yang mengharuskan ASN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti industri farmasi, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, juga belum optimal. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara BPOM dan pemangku kepentingan lainnya, pengawasan



terhadap peredaran obat dan makanan ilegal, misalnya, akan terhambat. Dalam beberapa kasus, kurangnya kolaborasi ini bahkan mempermudah pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi atau melakukan praktik ilegal, seperti pemalsuan label atau peredaran produk berbahaya yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan yang terpisah-pisah.

Kelemahan dalam harmonisasi dan kolaborasi ini dapat menurunkan efektivitas pengawasan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama lintas unit dan antar lembaga. Pelatihan yang mengedepankan keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik, serta pembentukan forum atau platform kolaboratif antara berbagai pihak, dapat menjadi solusi. Selain itu, penerapan sistem koordinasi yang jelas dan berbasis teknologi untuk mempermudah akses data dan informasi antar unit dan dengan mitra eksternal juga sangat penting. Dengan memperbaiki implementasi nilai harmonis dan kolaboratif, pengawasan obat dan makanan akan menjadi lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap tantangan yang ada, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat.

Kolaborasi kinerja yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam memastikan sinergi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung efektivitas pengawasan. Kolaborasi yang kurang optimal ini dapat menghambat koordinasi dalam pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan, serta menurunkan potensi dampak positif yang bisa dicapai melalui kerja sama yang lebih erat.

4. Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Obat dan Makanan Belum Terintegrasi

Sistem penyimpanan data yang terpusat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan obat dan makanan. Namun, salah



satu kelemahan signifikan dalam pengawasan saat ini adalah ketidaktersediaan sistem penyimpanan data yang terpusat. Data terkait produk obat dan makanan, seperti data inspeksi, sampling dan hasil uji laboratorium, data keracunan pangan sering kali tersebar di berbagai tim yang berbeda tanpa adanya sistem integrasi yang memadai. Ketidaktersediaan sistem data yang terpusat ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proses pengawasan, diantaranya adalah:

Pertama, ketidakpastian dan keterlambatan dalam mengakses informasi menjadi hambatan utama. ASN atau petugas pengawas yang memerlukan data penting mengenai suatu produk obat atau makanan, seperti status registrasi atau riwayat inspeksi, harus mencari informasi tersebut di berbagai sumber yang berbeda. Proses ini memakan waktu dan meningkatkan potensi kesalahan, yang pada gilirannya mengurangi respons yang cepat terhadap masalah yang muncul. Selain itu, ketika data tidak terintegrasi dengan baik, maka tidak ada satu sumber informasi yang dapat diandalkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya duplikasi atau inkonsistensi dalam pengolahan data.

Kedua, tanpa sistem penyimpanan data yang terpusat, koordinasi antara berbagai tim. Hal ini juga mempersulit pelaporan dan analisis tren peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya, karena tidak ada data yang dapat digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang ada.

Ketiga, ketidaktersediaan data terpusat menghambat penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan. Sistem berbasis teknologi, seperti analisis big data atau kecerdasan buatan, membutuhkan data yang lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. Tanpa data yang terpusat, kemampuan untuk menggunakan teknologi ini menjadi terbatas, yang memperlambat deteksi dini terhadap pelanggaran atau risiko yang mungkin muncul dalam distribusi obat dan makanan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, penting untuk mengembangkan dan menerapkan sistem penyimpanan data yang terpusat, yang memungkinkan akses data yang lebih cepat, akurat, dan konsisten. Implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi, seperti sistem manajemen data berbasis cloud atau basis data terpusat, akan memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, pelatihan bagi ASN dan petugas pengawas dalam menggunakan sistem baru ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan sistem penyimpanan data yang terpusat, pengawasan akan menjadi lebih terkoordinasi, cepat, dan responsif terhadap tantangan yang ada.

1.5.3 Peluang (*Opportunity*)

BBPOM di Bandar Lampung memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, yaitu:

1. Pertumbuhan UMKM di bidang obat dan makanan yang berkembang pesat

Pertumbuhan UMKM di bidang obat dan makanan yang berkembang pesat memberikan kesempatan untuk memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha lokal agar mereka mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan mendukung UMKM, BBPOM tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi berperan dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Dukungan *Stakeholder*

BBPOM di Bandar Lampung mendapat dukungan yang cukup baik dari para stakeholder. Dukungan ini, baik dari pemerintah daerah, akademisi, maupun asosiasi pelaku usaha, menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan yang relevan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan BBPOM juga menjadi dorongan positif bagi lembaga ini



untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Penerapan SPBE di Instansi Pemerintah

Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah. Transformasi digital dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Penerapan SPBE BPOM diharapkan juga dapat turut andil dalam mendorong akselerasi transformasi digital Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan publik oleh seluruh masyarakat

4. Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan produk PDN

Pengadaan barang dan jasa dalam negeri (PDN) merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memastikan efisiensi anggaran serta mendukung pertumbuhan industri domestik. Melalui pengadaan PDN, pemerintah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri lokal serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Proses pengadaan ini dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat, yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan harga barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tantangan utama dalam pengadaan PDN adalah keterbatasan kapasitas industri dalam negeri untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar, khususnya untuk produk



berteknologi tinggi. Selain itu, pengadaan barang dan jasa yang efisien memerlukan SDM yang terlatih dan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan, seperti korupsi atau kolusi. Pemerintah, melalui kebijakan yang mendukung, berupaya meningkatkan kemampuan industri domestik dan SDM yang terlibat dalam pengadaan, serta memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengadaan PDN dapat lebih optimal, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

5. **WHO Listed Authority**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tengah menjalani proses penting untuk mendapatkan predikat *WHO Listed Authority* (WLA). Saat ini, 33 negara telah terdaftar sebagai WLA, BPOM sendiri sedang berproses dan saat ini telah memperoleh *maturity* level 4 berdasarkan *WHO Global Benchmarking Tools*. Proses ini merupakan bagian dari upaya BPOM untuk meningkatkan kualitas pengawasan khususnya terkait produk obat dan vaksin di Indonesia sesuai dengan 9 standar internasional. Jika berhasil, pencapaian ini akan menjadi landasan penting bagi BPOM untuk membangun kepercayaan yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan proses menuju WLA, BPOM menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengadopsi standar internasional. Masyarakat akan melihat upaya ini sebagai bentuk transparansi dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan vaksin.

Proses ini memberikan peluang untuk mereformasi sistem regulasi nasional agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global. Penguatan regulasi ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan menutup celah dalam sistem yang ada. Setelah BPOM mendapatkan predikat WLA, produk Indonesia akan lebih mudah diterima di pasar internasional. Proses ini membuka peluang bagi pelaku industri untuk

meningkatkan kualitas produk mereka sesuai dengan standar global, sehingga dapat bersaing di tingkat dunia.

Dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, sektor industri, hingga masyarakat, BPOM dapat memanfaatkan proses menuju WLA sebagai momentum untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Langkah ini akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

6. Progam Unggulan Pemerintah Makan Bergizi Gratis

Tantangan Indonesia Emas tahun 2045 juga dihadapkan pada permasalahan stunting yang harus diturunkan dengan intervensi pada ibu hamil. Oleh karenanya, pemerintah di tahun 2025 akan menginisiasi program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah, pesantren dan Ibu hamil. MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program ini dinilai memiliki dampak yang besar dalam pembangunan generasi muda, namun menghadirkan tantangan tersendiri untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan tidak berisiko terhadap kesehatan. BPOM telah diamanatkan dalam pengawasan keamanan makanan (uji keamanan makanan) dalam program MBG lintas K/L dan Pemda. Hal ini menghadirkan tantangan dalam pengawalan produk dimana BBPOM di Bandar Lampung harus menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia, laboratorium pengujian dan sistem surveilans yang baik untuk mengawal keamanan dan mutu makanan dimaksud

7. Literasi Masyarakat Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam era informasi yang semakin terbuka, literasi masyarakat mengenai pengawasan obat dan makanan menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung tugas BPOM. Peningkatan literasi masyarakat menciptakan peluang



besar bagi BPOM untuk memperkuat perannya sebagai otoritas pengawas yang terpercaya, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih memahami pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu. Hal ini akan mendorong kepatuhan dalam mematuhi regulasi, seperti membeli produk berizin edar BPOM, membaca label produk, dan menghindari barang ilegal atau berbahaya.

Literasi masyarakat memungkinkan mereka untuk berperan sebagai pengawas aktif. BBPOM di Bandar Lampung membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan dan pelaporan akan adanya isu-isu di masyarakat terkait obat dan makanan melalui jalur pelaporan *Call Me Back* Ulun Lampung.

Ketika masyarakat memahami proses pengawasan BPOM dan standar yang diterapkan, kepercayaan terhadap lembaga ini akan semakin meningkat. Kepercayaan ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara BPOM, masyarakat, dan pelaku industri. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih selektif dalam memilih produk. Hal ini memberikan peluang bagi BPOM untuk mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan, sehingga produk yang beredar di pasar semakin terjamin kualitasnya.

Pemahaman masyarakat tentang risiko produk ilegal atau tidak aman dapat mengurangi angka kejadian keracunan, efek samping berbahaya, dan masalah kesehatan lainnya. Dampaknya, beban sistem kesehatan nasional juga akan berkurang, menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya kesehatan. Literasi masyarakat memberikan peluang bagi BPOM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung edukasi dan pelaporan. Melalui aplikasi, media sosial, atau portal daring, BPOM dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan informasi yang akurat dan terkini.



Untuk memaksimalkan peluang ini, BPOM perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan pelaku industri. Program seperti kampanye edukasi, seminar, serta penyebaran informasi melalui media digital menjadi strategi penting untuk meningkatkan literasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, BPOM dapat memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi Indonesia di tingkat global.

8. Pembagian Peran Pusat dan Daerah Terkait Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Obat dan Makanan.

Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, KPID, dan organisasi profesi.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, pemerintah telah mengalokasikan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan

yang menjadi urusan daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (DAK POM). DAK POM dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan apotek dan toko obat, U MOT dan IRTP serta KIE Obat dan Makanan dan Bimtek Kader. Dengan adanya dana DAK ini, diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai penanggung jawab dana di daerah untuk memastikan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, diperlukan koordinasi agar tidak terjadi redudansi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan baik terhadap produk maupun sarana yang menjadi target pengawasan BBPOM di Bandar Lampung.

1.5.4 Ancaman (*Threat*)

1. Perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara Online

BBPOM di Bandar Lampung juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan penjualan obat dan makanan secara online. Tren ini mempersulit pengawasan karena produk-produk yang dijual melalui platform digital sering kali tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Pengawasan terhadap e-commerce memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan teknologi yang memadai.

2. *Anti Microbial Resistance*

Terdapat emerging iSKue yang mengancam sistem kesehatan di masa depan yaitu terjadinya AMR (*Anti Microbial resistance*). Resistansi antimikroba telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan global dan dikenal sebagai "silent pandemic" karena dampaknya yang besar namun sering kali tidak terlihat langsung. Dalam konteks pengawasan obat, AMR menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin untuk mengatasinya.

Salah satu tantangan utama adalah penyalahgunaan dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Praktik pemberian antibiotik tanpa resep, pemakaian dosis yang tidak sesuai, serta penghentian pengobatan sebelum waktunya masih



banyak terjadi, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat umum. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko AMR dan lemahnya regulasi dalam pengendalian distribusi obat antibiotik. Kondisi ini memungkinkan resistensi berkembang lebih cepat, mengurangi efektivitas obat yang ada.

1,27 juta kematian secara global pada tahun 2019 disebabkan oleh infeksi yang resistan terhadap obat dan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah kematian akan mencapai 10 juta kematian setiap tahunnya jika resistensi antibiotik tidak dapat dikendalikan (*Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: Sytematic Anlysis (The Lancet Vol. 399, February 2022)*). Terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya resistensi antibiotik antara lain pola persepsian yang tidak rasional, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, penggunaan antibiotik di sektor peternakan dan perikanan yang berlebihan dan pembuangan sisa antibiotik yang tidak digunakan lagi karena telah rusak maupun kadaluarsa ke sembarang tempat.

Resistensi antimikroba memunculkan ancaman serius bagi Indonesia dan seluruh dunia sehingga perlu upaya semua pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mencegah terjadinya resistensi antimikroba. BPOM perlu meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas pertanian dalam melakukan pengawasan, peredaran maupun penggunaan antibiotik secara tepat. Edukasi kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat perlu terus digalakkan. BBPOM di Bandar Lampung dan lintas sektor terkait menerapkan kebijakan ketat dalam penggunaan antimikroba, baik di sektor kesehatan maupun veteriner. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap resep antibiotik, pengawasan bersama (wasber) terhadap penggunaan antibiotik dalam produk hewan, serta kampanye edukasi untuk masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan antimikroba yang bijak.

3. Keamanan Aplikasi dan data



Di era transformasi digital, penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pengawasan obat dan makanan memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi proses registrasi, pelaporan, dan edukasi masyarakat. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan sejumlah ancaman serius yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan kepercayaan publik. Salah satu ancaman utama adalah serangan siber, seperti malware, ransomware, dan phishing, yang dapat merusak sistem atau mencuri data sensitif. Selain itu, risiko kebocoran data penting, seperti informasi produk, hasil uji laboratorium, atau laporan efek samping, menjadi ancaman yang dapat mengurangi integritas dan kredibilitas lembaga pengawas.

Kelemahan keamanan dalam aplikasi yang digunakan juga menjadi perhatian, terutama jika terdapat bug atau celah yang memungkinkan akses tidak sah oleh pihak eksternal. Bahkan, ancaman internal seperti penyalahgunaan data oleh oknum dalam organisasi dapat memperburuk situasi. Tidak hanya itu, pemalsuan dokumen digital, seperti izin edar atau sertifikasi keamanan produk, juga semakin mungkin terjadi dengan kemajuan teknologi, memberikan tantangan baru dalam menjaga integritas data. Ketergantungan pada sistem IT juga berpotensi menghadirkan gangguan operasional, seperti kegagalan server atau sistem yang tidak mampu menangani lonjakan permintaan, sehingga memengaruhi kelancaran pengawasan.

Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi. Peningkatan keamanan siber melalui firewall, enkripsi data, dan audit berkala menjadi prioritas utama. Di sisi lain, pelatihan pengguna untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber, seperti phishing dan pengelolaan akses, juga penting. Penguatan aplikasi IT melalui uji penetrasi dan standar pengembangan aplikasi yang sesuai dengan regulasi internasional dapat meminimalkan risiko. Selain itu, cadangan data dan rencana pemulihan bencana diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasional jika terjadi gangguan. Kolaborasi dengan lembaga siber nasional, penyedia teknologi, dan penegak



hukum juga dapat membantu menangani ancaman dengan lebih cepat dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, integritas pengawasan obat dan makanan dapat tetap terjaga di tengah tantangan keamanan IT yang terus berkembang.

4. Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Berkembang

Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, kejahatan di bidang obat dan makanan menunjukkan pola yang semakin canggih dan kompleks. Modus operandi para pelaku kejahatan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk kesehatan dan pangan yang berkualitas. Salah satu ancaman utama adalah peredaran obat dan makanan ilegal, termasuk produk palsu yang dipasarkan melalui jalur distribusi tidak resmi, seperti e-commerce dan media sosial. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, terdapat upaya manipulasi data dan dokumen yang semakin sulit terdeteksi, seperti pemalsuan nomor registrasi BPOM, sertifikasi halal, atau dokumen pendukung lainnya. Pelaku juga menggunakan strategi pencampuran bahan berbahaya atau zat aktif dalam produk tanpa mencantumkannya pada label, sehingga konsumen tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, praktik relabeling dan repackaging juga menjadi modus yang sering digunakan untuk memperpanjang masa edar produk yang sudah kedaluwarsa atau mengelabui pengawasan.

Dalam konteks digital, kejahatan di bidang obat dan makanan semakin sulit dilacak karena penggunaan teknologi canggih. Pelaku memanfaatkan jaringan perdagangan lintas negara untuk mendistribusikan produk ilegal, memanfaatkan platform daring yang menawarkan anonimitas. Beberapa bahkan menggunakan dark web untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang atau makanan berbahaya yang sulit diawasi oleh otoritas. Tantangan ini diperparah dengan

kemampuan pelaku untuk menghindari deteksi, misalnya dengan mengubah kemasan, menyembunyikan produk di antara barang legal, atau menggunakan dokumen palsu untuk menyamarkan kegiatan mereka.

Ancaman dari modus operandi yang semakin berkembang ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam stabilitas sistem pengawasan obat dan makanan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif. BPOM dan instansi terkait harus memperkuat teknologi pengawasan, seperti penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola distribusi mencurigakan. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum, otoritas internasional, dan pelaku industri juga menjadi kunci dalam membongkar jaringan kejahatan ini. Selain itu, edukasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap produk yang mereka konsumsi sangat penting untuk mengurangi ruang gerak pelaku.

Dengan pendekatan yang komprehensif, BPOM dapat menghadapi ancaman dari modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, sekaligus memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan terjamin keasliannya.

5. Perubahan Regulasi Terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur sistem kesehatan di Indonesia, termasuk di bidang pengawasan obat dan makanan. Perubahan regulasi yang diatur dalam undang-undang ini dapat menjadi ancaman jika tidak diantisipasi dengan baik, terutama bagi otoritas pengawas seperti BPOM, industri farmasi, dan masyarakat luas.

Salah satu ancaman utama adalah potensi ketidakpastian hukum akibat perubahan atau penghapusan sejumlah peraturan yang sebelumnya menjadi



dasar operasional pengawasan. Regulasi baru yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem yang ada dapat menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan, maupun bagi aparat yang menjalankan pengawasan. Hal ini dapat menciptakan celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan melalui praktik ilegal.

Salah satu klausul Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berpengaruh cukup signifikan pada pengawasan obat adalah aturan pada pasal 320 ayat (6) mengenai obat tanpa resep yang dapat diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan penjelasan adalah fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian seperti hypermarket, supermarket dan minimarket. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dijelaskan bahwa fasilitas lain tersebut harus memiliki perizinan berusaha. Aturan baru ini mempengaruhi pola distribusi obat di masyarakat dan merupakan ancaman dalam proses pengawasan Badan POM yang sebelumnya hanya melaksanakan pengawasan di fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Kondisi baru ini memerlukan payung regulasi yang lebih teknis mengenai bagaimana koordinasi Badan POM dengan lembaga terkait serta mekanisme pengawasan yang menyeluruh sehingga dapat menjangkau semua fasilitas yang melakukan praktik penyerahan obat.

Dari sisi industri, penyesuaian terhadap regulasi baru juga dapat memunculkan tantangan. Jika pelaku usaha belum siap mematuhi aturan yang berubah, terutama terkait standar keamanan dan pelaporan, maka akan terjadi peningkatan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen juga berisiko kurang memahami implikasi perubahan regulasi, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka mengonsumsi produk yang tidak aman.



Untuk menghadapi ancaman ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti sinkronisasi regulasi turunan dengan UU Kesehatan 17 tahun 2023 untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan efektif. BPOM juga perlu memperkuat komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, untuk menjelaskan perubahan regulasi serta dampaknya. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi juga menjadi prioritas untuk menjaga efektivitas pengendalian di tengah perubahan regulasi.

Dengan mitigasi yang tepat, BPOM dapat tetap menjalankan perannya sebagai otoritas pengawas yang andal, meskipun menghadapi tantangan dari perubahan regulasi dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ini penting untuk memastikan bahwa keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan tetap menjadi prioritas utama dalam perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

6. Globalisasi dan Pasar Bebas

Globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi batasan antara satu negara dengan yang lain. Seseorang dapat terhubung di seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu. Begitu juga dengan sistem perdagangan, dengan globalisasi menyebabkan tidak adanya batasan perdagangan antar suatu negara atau yang lebih dikenal dengan perdagangan bebas. Dengan teknologi dan kemudahan akses, perdagangan dunia akan semakin terbuka luas melewati batas suatu negara. Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti masuknya berbagai macam produk obat dan makanan import dari negara lain. Maraknya produk import yang membanjir merupakan tantangan dalam sistem pengawasan mutu dan keamanan produk. Produk impor yang masuk harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP) yang berasal dari produk *import* maka perlu dilakukan strategi secara komprehensif dalam hal pengawasan peredaran produk import.

Tabel 1.1 Analisis SWOT

<u>STRENGTH</u> 1. Kompetensi pegawai BBPOM di Bandar Lampung yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas 2. Transparansi anggaran 3. Keterbukaan Informasi Publik 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai 5. Sistem manajemen mutu yang terintegrasi 6. Layanan Publik Dengan kategori Pelayanan Prima 7. Standar ruang lingkup pengujian optimum 8. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Bandar Lampung	<u>WEAKNESS</u> 1. Gap Jumlah SDM dengan ABK 2. Sarana penunjang pengawasan termasuk alat laboratorium belum memadai 3. Implementasi core value ASN BERAHLAK belum optimal 4. Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Obat dan Makanan Belum Terpusat
<u>OPPORTUNITIES</u> 1. Pertumbuhan UMKM di bidang Obat dan Makanan berkembang pesat 2. Dukungan stakeholder terhadap Pengawasan Obat dan Makanan cukup baik 3. Penerapan SPBE di Instansi Pemerintahan	<u>THREATS</u> 1. Perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara <i>Online</i> 2. <i>Anti Microbial Resistance (AMR)</i> 3. Keamanan aplikasi dan data 4. Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan

4. Pengadaan barang jasa menggunakan produk PDN 5. WHO <i>Listed Authority</i> 6. Program Unggulan Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) 7. Literasi Masyarakat Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 8. Pembagian Peran Pusat dan Daerah Terkait Pengawasan melalui pemberian DAK Non Fisik Obat dan Makanan	Pangan Olahan yang Berkembang 5. Perubahan Regulasi Terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Globalisasi dan Pasar Bebas

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut BBPOM di Bandar Lampung mengambil strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada, karena dari sisi faktor internal, BBPOM di Bandar Lampung memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada tantangan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut untuk mencapai tujuan :

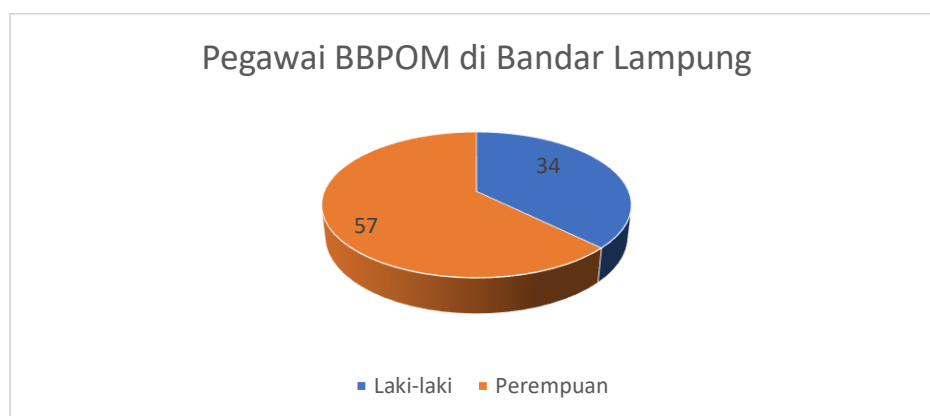
- a. Menyusun strategi pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dengan mempertimbangkan isu terkini dan lokasi geografis Provinsi Lampung yang berada di perlintasan Jawa – Sumatera.
- b. Peningkatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dan pelayanan publik.
- d. Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan strategis dengan lintas sektor
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan analisis beban kerja.

1.6 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan peran diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah 91 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMF	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	Jumlah
1	2	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	18
A	Balai Besar POM di Bandar Lampung											
1	Kepala	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Bagian TU	1	1	0	11	0	7	1	2	3	0	26
3	Bidang Pengujian	8	4	1	11	1	2	1	0	2	0	30
4	Bidang Pemeriksaan	9	6	0	2	0	1	0	0	1	0	19
5	Bidang Penindakan	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	7
6	Bidang Informasi dan Komunikasi	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0	8
		21	19	2	26	1	12	2	2	6	0	91



Gambar 1.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BBPOM di Bandar Lampung telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BBPOM di Bandar Lampung dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, dan khususnya di wilayah kerja Provinsi Lampung. BBPOM di Bandar Lampung mempunyai visi yang secara langsung mendukung visi BPOM, dimana dalam penyusunannya berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BBPOM di Bandar Lampung untuk Renstra 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang **dapat** diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

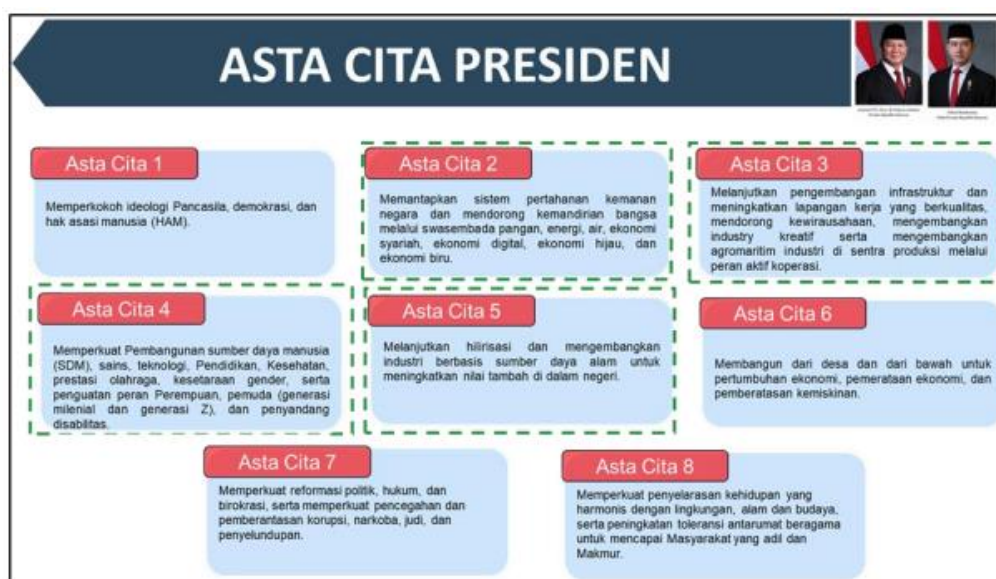
Visi BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek **penting** yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BBPOM di Bandar Lampung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BBPOM di Bandar Lampung berupaya *memastikan* bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja provinsi Lampung memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BBPOM di Bandar Lampung mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BBPOM di Bandar Lampung adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BBPOM di Bandar Lampung terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing, di wilayah kerja yaitu di Provinsi Lampung.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPOM yang telah didukung secara langsung oleh BBPOM di Bandar Lampung telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi tersebut disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan misi BPOM, utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat **pembangunan sumber daya manusia (SDM)**, **sains, teknologi**, pendidikan, **kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**”, namun demikian juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BBPOM di Bandar Lampung tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BBPOM di Bandar Lampung berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BBPOM di Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BBPOM di Bandar Lampung menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BBPOM



di Bandar Lampung berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BBPOM di Bandar Lampung menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka telah dirumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BBPOM di Bandar Lampung sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di provinsi Lampung. Berikut adalah tujuan strategis yang akan dicapai BBPOM di Bandar Lampung dalam periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- a. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar



di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

- b. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- c. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandar Lampung berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- d. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- e. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Provinsi Lampung, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2025 disusun pada saat N-1 dengan reviu dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024. Uraian target setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	94
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	97,29
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	85

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Bandar Lampung	14
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	90,50
		Nilai AKIP	81,49
		Nilai Kinerja Anggaran	89,10
		Indeks Manajemen Risiko	3,40

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Pada Bulan Februari tahun 2025, dilakukan reviu kembali terkait Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja oleh Satuan Kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu indikator terkait melalui penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029. Adanya perbedaan target antara dokumen RKT 20245 dan PK serta RAPK Tahun 2025 disebabkan karena RKT Tahun 2025 disusun pada saat N-1 dengan dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sedangkan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2025 ditetapkan melalui hasil reviu terhadap target RKT Tahun 2025 dengan pembahasan yang lebih detail dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 adalah PK dan RAPK Tahun 2025 dikarenakan RKT Tahun 2025 tidak digunakan kembali saat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sudah disahkan. Secara rinci terkait Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi 9 Sasaran Kegiatan dan 25 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13
2	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65
3	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
4	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,60
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85
7	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	08 - Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
9	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	90
		02 - Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,90
		03 - Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung	2,9

No	Kegiatan	Anggaran
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 21.121.093.000,-
2	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 11.707.584.000,-

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2025 sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM maka dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 sehingga menjadi 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja sebagai target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025. Secara rinci terkait Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi 8 Sasaran Kegiatan dan 28 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65
3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,94
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,7
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	90
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,9
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5
		Indeks Manajemen Risiko	2,9

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Pada Bulan Februari, disusun dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk sebagai acuan kinerja BBPOM di Bandar Lampung yang memuat target kinerja per bulan beserta anggaran per indikator kinerja. Selanjutnya sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor: B-PM.02.01.55.03.25.148 Tentang Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025 tanggal 03 Maret 2025 terdapat perubahan tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan pelaksanaan program

dikarenakan dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN Tahun 2025. Kemudian adanya kebijakan efisiensi juga berdampak pada berubahnya rencana aksi pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung. Oleh karena itu, dilakukan revisi RAPK ke-1 pada tanggal 20 Mei 2025. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2025 sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM maka dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga menjadi 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja sebagai target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025. Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Secara rinci terkait perubahan RAPK dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Awal Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	585.971.000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan												26	38.700.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		yang telah melaporkan KTD/ESO													
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219.847.040
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90.294.320
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59.998.500
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3.738.080
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.368.720
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364.703.760
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91.175.940
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	19.140.000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,38	24,38	48,75	51,46	51,46	51,46	51,46	65	65	65	65	65	27.051.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76,2	76,2	76,2	76,7	76,7	76,7	77,2	12.432.443.000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung			89,6 0	89,6 0	89,6 0	89,6 0	89,6 0	89,6 0	89,6 0	89,6 0	89,6 0	89,6 0	2.824.155.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	40	60	70	80	90	100	100	100	12	469.164.000
		Jumlah desa pangan aman	20	25	25	40	50	70	80	90	100	100	100	5	782.221.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	50	60	70	80	90	100	100	100	1	126.919.000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3,33	13,3 3	22,5	36,6 7	45	58,3 3	61,6 7	66,6 7	83,5	85,3 3	90	91	187.396.000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung				10	21	33	45	54	59	67	75	85	334.197.000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
8	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung												4,70	206.651.000
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung												90	3.420.061.500

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung												80,90	3.420.061.500
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung												5	3.420.061.500
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung												2,9	3.420.061.500
Total															32.829.487.000

Tabel 2.5
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi ke-1 Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	585.971.000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219.847.040
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90.294.320
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59.998.500
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3.738.080

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.368.720
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364.703.760
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91.175.940
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	19.140.000
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,38	24,38	48,75	51,46	51,46	51,46	51,46	65	65	65	65	65	27.051.000
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76,2	76,2	76,2	76,7	76,7	76,7	77,2	12.432.443.000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung			89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	2.824.155.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	3,33	13,33	22,5	50	65	71,67	76,67	81,67	88,33	93,33	96,67	91	187.396.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung					10	21	34	45	55	65	75	85	334.197.000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
8	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung												4,70	206.651.000
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung												90	3.420.061.500
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung												80,90	3.420.061.500
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung												5	3.420.061.500
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung												2,9	3.420.061.500
Total															32.829.487.000

Tabel 2.6
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi ke-2 Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	585.971.000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	109.923.520
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	45.147.160
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	64.369.500
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	4.709.981
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	79.396.819
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	351.007.960
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	93.215.740

		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	13.398.000
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	5.742.000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	7.285.000
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76,2	76,2	76,2	76,7	76,7	76,7	77,2	12.951.105.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	155.070.680
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,38	24,38	48,75	51,46	51,46	51,46	51,46	54,05	65	65	65	65	27.051.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung			89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	2.956.666.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3,33	13,33	22,5	50	65	71,67	76,67	81,67	88,33	93,33	96,67	16,94	187.396.000

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung					10	21	34	38	51	61	71	85	334.197.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
7	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung												4,7	74.140.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung												90	3.047.898.250
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung												80,9	3.047.898.250
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung												5	3.047.898.250
		Indeks Manajemen Risiko												2,9	3.047.898.250
Total															31.859.496.000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Bandar Lampung sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator kinerja. Selanjutnya dihitung capaian setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tabel 2.6 Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Selanjutnya, dilakukan penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO dihitung dari total capaian indikator yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Penetapan predikat Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

**Tabel 2.8 Kriteria Perbandingan Capaian Kinerja
terhadap Target Tahun 2025**

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Selanjutnya adalah pengukuran efisiensi dari kinerja yang diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 2.9 KRITERIA CAPAIAN EFISIENSI

NO	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2025 memuat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja sesuai Rancangan Awal Rencana Strategi Tahun 2025-2029. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Bandar Lampung TW III tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **105,43%** dengan kriteria **"ISTIMEWA"** secara rinci pencapaian NKO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	98,66	111,17%	-	110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,05	101,15%	-	101,15%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	-	100,00%	Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan	Persentase sampel PIRT berisiko yang	85	98,29	115,64%	Normalisasi	110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	85,58	108,33%	-	108,33%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	96,88	107,05%	-	107,05%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,58	109,43%	-	109,43%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	99,24	105,02%	-	105,02%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	99,14	107,76%	-	107,76%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73	99,94	106,63%	-	106,63%	Sangat Baik
02	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89%	-	109,89%	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
03	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-
04	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,7	77,7	101,30%	-	101,30%	Sangat Baik
04	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-
04	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	70,27	108,11%	-	108,11%	Sangat Baik
04	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	91,5	102,12%	-	102,12%	Sangat Baik
05	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100,00%	-	100,00%	Baik
06	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah desa pangan aman	95	100	105,26%	-	105,26%	Sangat Baik
07	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	-	100,00%	Baik
08	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	88,33	94,05	106,48%	-	106,48%	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
		IP CPPOB pangan olahan						
09	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	51	61,67	120,92%	-	110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
09	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	-	100,00%	Baik
09	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
09	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-
Total Capaian PK						2108,53%		
Nilai Kinerja Organisasi						105,43%		
Predikat NKO						ISTIMEWA		

Tabel 3.2 Nilai Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Sasaran Kegiatan
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,38
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	108,11
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101,85
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,48
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110,00
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	-
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-

Penjelasan secara rinci terhadap capaian kinerja 25 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 01
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	88,75	98,66	111,17%	Tidak Dapat Disimpulkan	

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%).

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
- $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- Mencakup kesesuaian dengan:
1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
- $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.
- Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
- Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.
- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
- $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.
- Mencakup kesesuaian:
1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*)/\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***)) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen $a2$ mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kesesuaian Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan: Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling.

Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan: Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan: Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

C. Persentase Sampel **Suplemen Kesehatan** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

- ***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
 - ***)) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
 Catatan: Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.
- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
 Catatan: Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
 Mencakup penentuan kesimpulan:
1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel **Kosmetik** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
 $= (a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan: Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling. Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling. Kesimpulan pengujian dinilai oleh UPT penguji.

d. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel,
$$\left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\% \right)$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Berdasarkan hasil pemutakhiran terhadap manual IKU pada bulan Agustus, perubahan pada indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah penajaman detail cara perhitungan untuk sampel Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (semula 6 komponen menjadi 5 komponen) dan sampel Kosmetik serta dengan memperjelas pembagian kinerja fungsi pengujian antara UPT penyampling dan UPT penguji. Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja menggunakan manual iku lama digunakan pada bulan Januari sampai dengan Juli, selanjutnya mulai bulan Agustus perhitungan sudah menggunakan manual IKU baru.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,66% dengan target 88,75%. Capaian yang diperoleh sebesar 111,17% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025 (Manual IKU lama)	86,25	95,25	110,43%
TW II Tahun 2025 (Manual IKU lama)	86,25	96,72	112,14%
TW III Tahun 2025 (Manual IKU baru)	88,75	98,66	111,17%

Pada Triwulan III tahun 2025, dilakukan penyempurnaan terhadap manual indikator yang menyebabkan adanya perbedaan formulasi perhitungan dan nilai realisasi kinerja. Perbedaan formulasi terletak pada perhitungan sampel yang masuk ke laboratorium dimana awalnya semua sampel yang sudah masuk ke laboratorium dihitung sebagai penyebut sedangkan sekarang yang dihitung sebagai penyebut hanya sampel yang masuk ke laboratorium dan sudah masuk *timeline* penyelesaian laporannya, dengan begitu terjadi peningkatan realisasi dibanding dengan formula perhitungan yang lama. Selain itu juga terjadi kenaikan target pada TW III, kenaikan target ini mempertimbangkan capaian yang telah diraih pada TW sebelumnya dan kesepakatan dengan unit pengampu.

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Perbandingan capaian kinerja dengan manual IKU yang terbaru secara rinci sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Manual IKU Lama

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari	1085,00	-	80,00	26,19	#DIV/0!	37,97	48,05
Februari	1085,00	86,25	81,43	83,33	#DIV/0!	83,33	82,70
Maret	1085,00	86,25	94,17	90,00	100,00	96,83	95,25
April	1085,00	86,25	92,78	79,57	100,00	87,34	89,92
Mei	1085,00	86,25	87,90	53,65	100,00	91,42	83,24
Juni	1085,00	86,25	97,29	90,05	100,00	99,54	96,72
Juli	1085,00	86,25	99,47	81,48	82,87	94,46	89,57

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan Manual IKU Baru

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari	1085.00	86.25	0.00	80.00	0.00	80.00	40.00
Februari	1085.00	86.25	0.00	76.25	0.00	80.00	39.06
Maret	1085.00	86.25	100.00	83.83	100.00	95.73	94.89
April	1085.00	86.25	100.00	81.99	100.00	91.68	93.42
Mei	1085.00	86.25	99.81	79.00	100.00	90.28	92.27
Juni	1085.00	86.25	99.07	92.94	100.00	99.34	97.84
Juli	1085.00	86.25	98.18	88.78	100.00	93.56	95.13
Agustus	1085.00	88.75	98.05	90.17	100.00	93.85	95.52
September	1085.00	88.75	98.51	96.26	100.00	99.88	98.66

Perbandingan realisasi kinerja pada triwulan III dengan triwulan sebelumnya menggunakan manual IKU baru sebagai berikut:

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025 (Manual IKU baru)	86,25	94,89	110,02%
TW II Tahun 2025 (Manual IKU baru)	86,25	97,84	113,44%
TW III Tahun 2025 (Manual IKU baru)	88,75	98,66	111,17%

Perhitungan realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Manual Indikator yang baru, diperoleh bahwa capaian kinerja pada triwulan I, II dan III fluktuatif namun seluruhnya diatas 110% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,75	98,66	111,17% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,66% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 88,75%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada TW III, terdapat kenaikan target IKU dari 86,25% menjadi 88,75%. Kenaikan target tersebut ditetapkan berdasarkan kajian terhadap capaian pada TW sebelumnya dan kesepakatan dengan unit pengampu. Sampel sediaan farmasi yang sudah dilakukan sampling sampai bulan September tahun 2025 sebanyak 876 sampel dari target UPT 883 sampel sesuai Pedoman Sampling



sehingga ter realisasi 99,21%. Masih terdapat 7 sampel obat yang sampai bulan September tidak sesuai dengan perencanaan sampling. Dari 876 sampel yang diperiksa ditemukan 1 sampel kosmetik dan 5 sampel obat yang TIE sehingga tidak dilanjutkan ke pengujian laboratorium. Untuk sampel obat yang di sampling dan diperiksa oleh BBPOM di Bandar Lampung tidak semua dilakukan pengujiannya di laboratorium BBPOM di Bandar Lampung akan tetapi dikirimkan juga ke Balai anggota Regional Pekanbaru sesuai dengan kelas terapinya, begitu juga sebaliknya Laboratorium Pengujian di BBPOM Bandar Lampung juga melakukan pengujian sampel dari Balai anggota Regional Pekanbaru. Untuk komoditi Kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, BBPOM di Bandar Lampung juga menguji sampel dari BPOM di Tulang Bawang sebanyak 100 sampel. Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan koordinasi yang baik antara petugas penyampling internal dan Balai Regional penguji.

Total sampel sediaan farmasi yang masuk ke laboratorium pengujian BBPOM bandar Lampung sebanyak 1087 sampel dan 955 sudah selesai uji untuk sampel yang *timeline* pengujiannya jatuh di bulan September (132 sampel sediaan farmasi yang *timeline* nya jatuh dibulan oktober dan belum selesai uji tidak diperhitungkan). Pengujian dilakukan sesuai ketentuan dengan memperhatikan parameter uji kritis sesuai Pedoman Sampling dan batas *timeline* yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi pada TW III 100 % sampel memenuhi Parameter Uji Kritis (PUK) akan tetapi ada 7 sampel Obat Bahan Alam dan 1 sampel kosmetik yang melebihi *timeline* pengujian (15 Hari Kerja), salah satu penyebab tidak tercapainya *timeline* pengujian pada sampel obat bahan alam dan kosmetik adalah sampel yang TMS atau diduga TMS memerlukan pengujian ulang atau uji konfirmasi ke balai unggul di Regional Pekanbaru sehingga membutuhkan waktu pengujian yang lebih lama.

Pada TW III terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah sampel yang tidak memenuhi *timeline* pengujian terutama pada obat bahan alam, dimana pada TW II terdapat 30 sampel obat bahan alam yang tidak memenuhi *timeline* sedangkan



pada TW III hanya 7 sampel obat bahan alam yang melewati batas timeline pengujian. Penurunan ini disebabkan adanya pengaturan jadwal masuknya sampel ke laboratorium. Pada awalnya sampel dari semua komoditi masuk pada saat bersamaan di minggu pertama setiap bulannya, kemudian pada mekanisme yang baru masuknya sampel dibagi menjadi 2 tahap, pada minggu pertama yang masuk ke laboratorium adalah sampel pangan dan obat sedangkan pada minggu ketiga adalah sampel kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Pengaturan jadwal ini dimulai pada bulan Juli dan terbukti efektif menurunkan jumlah sampel yang melewati *timeline* pengujian sehingga capaian realisasi juga mengalami peningkatan.

Pada komoditi obat dari 219 sampel yang sudah disampling dan diperiksa terdapat 19 sampel yang belum selesai uji yaitu (8 sampel diuji di BPOM Jambi, 7 sampel diuji di BBPOM Palembang, 2 sampel diuji di BBPOM Pekanbaru, 1 sampel diuji di BBPOM Bandar Lampung dan 1 sampel vaksin diuji di Balai Pengujian produk Biologi). Terhadap sampel tersebut sudah dikoordinasikan agar mempercepat penyelesaian pengujiannya.

Dari 951 sampel yang sudah dilakukan pengujian terdapat 36 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari 5 sampel kosmetik (4 sampel BBPOM di Bandar Lampung dan 1 sampel BPOM di Tulang Bawang) dan 31 sampel obat bahan alam (29 sampel BBPOM di Bandar Lampung dan 2 sampel BPOM di Tulang Bawang). Sampel kosmetik yang TMS semuanya terkait parameter uji mikrobiologi yaitu 4 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan 1 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK), sedangkan untuk obat bahan alam sampel TMS terdiri dari 1 sampel TMS Kadar Air, 7 sampel TMS ALT, 7 sampel TMS Angka *Enterobacteriaceae*, 5 sampel TMS AKK, 1 sampel TMS ALT dan AKK serta 1 sampel TMS ALT dan Angka *Enterobacteriaceae*, 1 sampel TMS *Clostridia*, 1 sampel TMS ALT, AKK, Angka *Enterobacteriaceae* dan BKO Paracetamol, 3 sampel TMS BKO Paracetamol, 1 Sampel TMS BKO Paracetamol dan Sildenafil, 1 sampel TMS BKO Natrium Diklofenak, 1 sampel TMS BKO Sildenafil, 1 sampel TMS ALT dan BKO

Sildenafil. Seluruh sampel TMS tidak diproduksi di wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Dalam tahap pelaksanaan tindak lanjut atas sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, BBPOM di Bandar Lampung telah melaporkan hasil pengujian sampel melalui SIPT.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja akan terus dilakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Lampung agar sediaan farmasi yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.

Selain itu untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala yang terjadi terkait sediaan farmasi yang beresiko ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dibuat beberapa rekomendasi antara lain :

1. Tetap melakukan monitoring dan evaluasi pengaturan waktu masuk sampel ke laboratorium menjadi 2 tahap seperti yang sudah dilakukan pada TW III
2. Melakukan koordinasi dengan anggota region Pekanbaru untuk menyelesaikan pengujian sampel terutama sampel obat sesuai *timeline* pengujian.
3. Mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi dan juga melakukan monitoring terhadap Surat Edaran yang masuk pada bulan selanjutnya untuk memastikan semua SE sudah ditindaklanjuti.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

1. Personel Laboratorium dalam melakukan pengujian sampel sediaan farmasi selalu menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti pedoman sampling dan Pengujian terkait Parameter Uji Kritis (PUK) dan juga ketepatan *timeline* pelaporan pengujian yang telah ditetapkan.

2. Petugas sampling telah memanfaatkan Modul *E-learning* Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh E-Sertifikat sebelum melaksanakan tugas sampling sesuai dengan komoditi yang diawasi.
3. Laboratorium pengujian memiliki program peningkatan kompetensi bagi personel pengujian di semua komoditi sediaan farmasi baik melalui *In House Training* dengan narasumber dari P3OMN ataupun dari pelatihan secara daring yang menunjang kegiatan pengujian sampel sediaan farmasi. Semua program peningkatan kompetensi teknis yang direncanakan untuk tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan pada TW III.
4. Petugas telah mengikuti sosialisasi pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.
5. Petugas telah disosialisasikan adanya perubahan target dan juga perubahan manual IKU di TW III.

g. Kendala

1. Perubahan *timeline* pada sampel obat bahan alam dan kosmetik yang semula 30 HK menjadi 15 HK sedikit banyak menjadi kendala sekaligus tantangan bagi laboratorium pengujian untuk mencari strategi agar dapat mencapai target tersebut dengan keterbatasan kapasitas laboratorium yang ada saat ini.
2. Kerusakan pada alat uji (HPLC dan ICP) menyebabkan antrian pada pemakaian alat yang lain sehingga menghambat penyelesaian sampel.
3. Pada sampel obat dimana pengujian sampelnya dilakukan di beberapa Balai Anggota Region Pekanbaru sering terjadi kendala terkait pemenuhan pelaporan tepat waktu karena proses pelaksanaan pengujian di balai lain berada di luar kendali BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit penyampling.
4. Beberapa surat permintaan tindak lanjut baru diterima di akhir TW 3 sehingga belum dapat diselesaikan karena harus dilakukan pemeriksaan di sarana terkait.

5. Pergeseran renlak sampling obat yang disebabkan karena laboratorium regional penguji terdapat kendala ketersediaan reagen dan/atau kerusakan alat uji.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	98,66	111,17	465.451.665	511.816.593	109,96	1,01	0,01	100 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pembelian sampel, pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium. Efisiensi anggaran ini didukung oleh pengadaan reagen dan media yang sudah selesai dilakukan sehingga sebanding dengan output dari capaian indikator.

Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin interim Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target triwulan III tercapai/melampaui dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Pelaksanaan sampling, pengujian dan monitoring tindak lanjut terhadap sampel tanpa izin edar (TIE), kadaluwarsa, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masih dilanjutkan sampai dengan akhir tahun anggaran untuk mendukung pencapaian IKU persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan

melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada triwulan III tahun 2025, belum terdapat target pada indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-
TW II Tahun 2025	-	-	-
TW III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Target tahunan sebesar 26% merupakan target yang ditetapkan oleh unit pengampu IKU di Pusat (KMEI). Target tersebut merupakan baseline awal untuk IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dan telah tercapai 26,67% dimana dari 45 fasyankes yang diberikan KIE telah melaporkan KTD/ESO sebanyak 12 Fasyankes, dengan total laporan sebanyak 32 laporan. Terdapat juga 28 laporan berasal dari 10 (sepuluh)

Fasyankes yang tidak termasuk dalam target KIE tahun berjalan, namun secara manual indikator tidak dapat diklaim sebagai capaian kinerja.

No.	Nama Sarana Pelayanan Kesehatan	Diberikan KIE pada tahun berjalan	Jumlah Laporan s.d. TW 3/2025
1	RS Airan Raya	ya	14
2	RS Santa Anna	ya	8
3	RS Budi Medika	ya	1
4	Klinik Kosasih Kemiling	ya	1
5	Klinik Kosasih Palapa	ya	1
6	RS Lampung Eye Center	ya	1
7	Klinik AP & AP	ya	1
8	RSUD A. Dadi Tjokrodipo	ya	1
9	RS Kartini	ya	1
10	RS Mata Permana Sari	ya	1
11	RS Bunda Liwa	ya	1
12	RS Bumi Waras	ya	1
13	RS Mardi Waluyo	tidak	6
14	RS Hermina	tidak	5
15	RSUD Bob Bazar	tidak	4
16	RS Immanuel	tidak	4
17	RSUD Abdoel Moeloek	tidak	2
18	RS Urip Sumoharjo	tidak	2
19	RS Pertamina Bintang Amin	tidak	2
20	RSUD Pringsewu	tidak	1
21	RS Permata Hati Way Jepara	tidak	1

No.	Nama Sarana Pelayanan Kesehatan	Diberikan KIE pada tahun berjalan	Jumlah Laporan s.d. TW 3/2025
22	RS Bumi Waras	tidak	1
Jumlah Laporan Diterima			60

Keberhasilan kinerja yakni tercapainya target tahunan pada TW 3 ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Peran petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung yang cukup aktif dalam melakukan koordinasi dan pemantauan pelaporan KTD/ESO oleh petugas di fasyankes.
2. Tingkat pemahaman serta kesadaran yang cukup baik dari para petugas/tenaga kesehatan yang telah diberikan KIE untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui aplikasi e-Meso.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sampai dengan TW III, seluruh target IKU telah tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Terlaksananya KIE terhadap 45 Fasyankes di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung pada bulan Februari 2025.
2. Sebanyak 12 fasyankes dari 45 yang diberi KIE (26,67%) telah melakukan pelaporan KTD/ESO melalui aplikasi e-Meso. Target tahunan adalah sebesar 26%.

Selain KIE, Balai Besar POM perlu mengembangkan strategi lanjutan untuk mempertahankan momentum pelaporan di kalangan fasyankes yang telah sadar. Strategi yang dapat dilakukan, yakni:

1. Pemberian penghargaan atau apresiasi (misalnya, sertifikat, publikasi di media sosial) kepada fasyankes atau tenaga kesehatan yang paling aktif dan konsisten dalam melakukan pelaporan.
2. Optimalisasi Grup Komunitas dengan memanfaatkan grup *WhatsApp* tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi studi kasus atau contoh keberhasilan pelaporan dari sesama fasyankes. Ini akan membangun komunitas dan semangat kolektif.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini didukung oleh terlaksananya:

1. Perencanaan kegiatan dengan baik
2. Pelaksanaan KIE yang baik sehingga dapat membangun pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan di fasyankes
3. Koordinasi dan komunikasi aktif petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung kepada tenaga kesehatan di fasyankes
4. Pemanfaatan teknologi yang optimal

g. Kendala

Secara keseluruhan, kegiatan telah terlaksana dengan baik tanpa kendala berarti. Namun, dengan telah tercapainya target tahunan pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes yang diberikan KIE sampai dengan TW III, menimbulkan kendala baru. Mengingat bahwa kegiatan pelaporan oleh fasyankes tersebut adalah hal yang tidak dapat diprediksi sehingga memungkinkan dalam TW IV terjadi penambahan jumlah laporan yang membuat capaian terhadap IKU menjadi lebih dari 110%.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	27.089.999	0	0,00	#VALUE!	#VALUE!	-

Tingkat efisiensi anggaran belum dapat diperhitungkan dikarenakan belum ada target kinerja pada TW III Tahun 2025. Namun, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dan waktu tanpa mengurangi kualitas *output*, strategi efisiensi telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan farmakovigilans, khususnya dalam mendukung keberhasilan pelaporan KTD/ESO. Beberapa strategi efisiensi yang diterapkan antara lain:

1) Pemanfaatan *Platform* Daring (Zoom) untuk KIE

Kegiatan KIE dilaksanakan secara daring melalui *platform* Zoom untuk menjangkau lebih banyak peserta dari 45 sarana pelayanan kesehatan tanpa kendala geografis. Pelaksanaan daring ini menghemat waktu, biaya perjalanan, dan logistik. Dengan Zoom, interaksi dua arah tetap berjalan baik melalui fitur Q&A dan diskusi langsung.

2) Optimalisasi Grup WhatsApp (WAG) untuk Komunikasi dan Monitoring

Dibentuknya grup WhatsApp antar peserta KIE dan petugas Badan POM menjadi media komunikasi yang responsif, cepat, dan informal.

Grup ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan teknis secara real-time, menyampaikan pengingat pelaporan, serta menyebarluaskan informasi dan materi tambahan. Grup juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar fasyankes sehingga mendorong semangat kolektif untuk aktif melapor.

3) Penyediaan Bahan Digital Mandiri

Materi edukasi pelaporan KTD/ESO disediakan dalam bentuk *e-book*, infografis, dan video tutorial, yang bisa diakses kapan saja oleh petugas. Bahan ini disusun ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan konteks praktik pelayanan kesehatan di lapangan. Dengan tersedianya bahan pembelajaran ini memberikan fleksibilitas waktu kepada petugas dan membantu memperkuat pemahaman di luar sesi KIE formal.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja adalah alat yang sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan suatu entitas, baik itu individu, tim, departemen, maupun perusahaan secara keseluruhan. Laporan ini memberikan gambaran

yang jelas mengenai pencapaian, tantangan, dan area yang memerlukan perbaikan.

Laporan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ini memberikan informasi terkait persentase jumlah pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes yang telah diberikan KIE Farmakovigilans, serta efisiensi anggaran yang digunakan untuk melakukan KIE dan koordinasi dengan Tenaga Kesehatan di fasyankes. Laporan kinerja ini sangat bermanfaat karena tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan (capaian target), tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas strategi yang diterapkan dan potensi tantangan ke depan. Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk:

1. Mengkonfirmasi bahwa strategi yang digunakan (KIE, koordinasi aktif, dan pemanfaatan teknologi) terbukti efektif dalam mencapai target. Manajemen dapat mempertahankan dan mereplikasi strategi ini (termasuk penggunaan Zoom, Grup WhatsApp, dan materi digital mandiri) untuk program sejenis di masa depan.
2. Sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko capaian yang berlebihan (over-target) dan membantu penyesuaian target tahun berikutnya. Saat ini, Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat berfokus pada pemeliharaan kualitas pelaporan dan *feedback* kepada pelapor di TW 4, bukan sekadar kuantitas. Untuk tahun berikutnya, laporan ini menjadi dasar untuk meningkatkan target IKU yang lebih tinggi untuk periode berikutnya.
3. Sebagai dasar untuk mengukur dan mengakui kontribusi petugas dalam mencapai sasaran IKU dalam memberikan penghargaan dan evaluasi bagi petugas yang terlibat (baik internal maupun eksternal), sehingga meningkatkan motivasi dan loyalitas.
4. Menunjukkan keberhasilan KIE yang dilakukan sehingga menghasilkan tingkat pemahaman serta kesadaran yang cukup baik dari tenaga kesehatan. Memberikan *insight* bahwa kualitas materi, kemudahan akses (digital), dan komunikasi berkelanjutan (WAG) adalah kunci efektivitas edukasi, yang

harus dipertahankan atau ditingkatkan di kegiatan KIE Farmakovigilans selanjutnya.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	91	92,05	101,15%	Sangat Baik	

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan : **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan: $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$.

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$

Berdasarkan hasil pemutakhiran terhadap manual IKU pada bulan Agustus, perubahan pada indikator persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Penambahan informasi terkait Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Merujuk pada nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja menggunakan manual IKU lama digunakan pada bulan Januari sampai dengan Juli, selanjutnya mulai bulan Agustus perhitungan sudah menggunakan manual IKU baru.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,05% dengan target 91%. Capaian yang diperoleh sebesar 101,15% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	100	117,65%
TW II Tahun 2025	85	98	115,29%
TW III Tahun 2025	91	92,05	101,15%

Pada triwulan III tahun 2025, terjadi penurunan realisasi kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana pada TW I realisasi kinerjanya adalah 100

sedangkan pada TW II menurun menjadi 98 kemudian pada triwulan III menurun kembali menjadi 92,05 namun seluruhnya telah mencapai target. Target TW III juga mengalami kenaikan daripada target TW I dan II. Kenaikan target ini mempertimbangkan capaian yang telah diraih pada TW sebelumnya dan kesepakatan dengan unit pengampu.

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Perbandingan capaian kinerja dengan manual IKU yang terbaru secara rinci sebagai berikut:

**Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Manual IKU Lama**

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	404.00		100.00	0.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	60.00
Februari	404.00	85.00	100.00	93.94	100.00	100.00	100.00	100.00	98.79
Maret	404.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
April	404.00	85.00	95.37	89.09	89.09	100.00	89.09	77.78	89.18
Mei	404.00	85.00	95.99	97.59	97.62	100.00	97.62	70.00	92.00
Juni	404.00	85.00	100.00	100.00	91.30	100.00	97.39	100.00	98.00
Juli	404.00	85.00	100.00	100.00	97.14	100.00	97.14	100.00	99.14

**Realisasi Kinerja Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Manual IKU Baru**

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	404.00		100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Februari	404.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.94	100.00	99.39
Maret	404.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
April	404.00	85.00	100.00	100.00	89.09	100.00	98.00	100.00	97.62
Mei	404.00	85.00	97.19	100.00	97.47	100.00	91.14	100.00	98.05
Juni	404.00	85.00	100.00	100.00	91.45	100.00	92.31	100.00	97.52
Juli	404.00	85.00	100.00	100.00	97.14	100.00	96.57	100.00	99.09
Agustus	404.00	91.00	100.00	100.00	83.47	100.00	80.93	100.00	94.79
September	404.00	91.00	100.00	100.00	92.54	100.00	92.54	71.43	92.05

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III dengan triwulan sebelumnya menggunakan manual IKU baru sebagai berikut:

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025 (Manual IKU baru)	86,25	100	115,94%
TW II Tahun 2025 (Manual IKU baru)	86,25	97,52	114,39%
TW III Tahun 2025 (Manual IKU baru)	88,75	92,05	101,15%

Perhitungan realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Manual Indikator yang baru,

diperoleh bahwa capaian kinerja pada triwulan I, II dan III terus menurun namun seluruhnya mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92,05	101,15% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,05% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 91%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada TW III, terdapat kenaikan target IKU dari 85% menjadi 91%. Kenaikan target tersebut ditetapkan berdasarkan kajian terhadap capaian pada Triwulan sebelumnya dan kesepakatan dengan unit pengampu. Pada Triwulan III, telah disampling sebanyak 295 sampel, dengan 294 sampel diuji sesuai parameter uji kritis dalam pedoman sampling, dan 1 sampel tidak masuk laboratorium karena Tanpa izin Edar (TIE). Dari 294 sampel yang telah diuji, sebanyak 272 sampel telah selesai uji dan dilaporkan tepat waktu. Sedangkan 22 sampel lainnya masih dalam proses uji. Dari 22 sampel yang belum selesai uji, sebanyak 13 sampel belum selesai uji kimia karena kendala UPS ICP-MS yang rusak dan banyaknya antrian penggunaan alat AAS untuk uji logam berat pada komoditi pangan, obat bahan alam, dan kosmetik. Sebanyak 9 sampel lainnya belum selesai uji di BBPOM Pekanbaru, dengan rincian 7 sampel uji konfirmasi nitrofurazon, 1 sampel uji DNA rendah porcine, dan 1 sampel uji residu siprofloksasin. Kendala

pada pengujian di balai regional disebabkan belum tersedianya kolom LCMS/MS dan rusaknya alat *realtime* PCR di BBPOM Pekanbaru. Dari 272 sampel yang telah diuji diperoleh 6 sampel garam yang diproduksi di Provinsi Lampung dengan hasil uji TMS dan akan ditindaklanjuti pada bulan Oktober.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap 13 sampel yang belum selesai uji dilakukan percepatan pengujian dan pelaporan sehingga dapat dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan. Terhadap 9 sampel yang diuji BBPOM Pekanbaru telah dilakukan koordinasi dan upaya dari BBPOM Pekanbaru untuk mempercepat proses uji dan pelaporan. Untuk sampel TMS yang diproduksi dalam wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung, akan dilakukan tindak lanjut pada bulan Oktober. Selain itu, untuk perbaikan kinerja, terus dilakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik agar produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang menunjang keberhasilan tercapainya target kinerja, antara lain :

1. Dalam proses pengujian, petugas menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta *timeline* yang telah disepakati.
2. Petugas telah memanfaatkan Modul *E-learning* Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh E-Sertifikat sebelum melaksanakan tugas sampling sesuai dengan komoditi yang diawasi.

3. Laboratorium pengujian memiliki program peningkatan kompetensi bagi personel pengujian melalui *In House Training* dengan narasumber dari P3OMN ataupun dari pelatihan secara daring yang menunjang kegiatan pengujian sampel pangan olahan. Semua program peningkatan kompetensi teknis yang direncanakan untuk tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan pada TW III.
4. Petugas telah mengikuti sosialisasi pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

g. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Kerusakan alat uji (ICP-MS) yang menyebabkan pengujian menjadi terhambat dan membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang.
2. Sampel dengan sebagian parameter uji dikerjakan balai lain kadangkala menjadi kendala dalam memenuhi target pelaporan tepat waktu karena proses pelaksanaan pengujian di balai lain berada di luar kendali BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit penyampling.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,05	101,15	92.509.253	78.707.752	85,08	1,19	0,19	100 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah efisien. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pembelian sampel, pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan dan pengadaan sampel. Efisiensi

anggaran ini didukung oleh harga sampel yang cukup murah, seperti sampel garam.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target Triwulan III telah tercapai dengan kategori sangat baik. Pelaksanaan sampling, pengujian dan monitoring tindak lanjut sampel TMS, TIE, kadaluwarsa, maupun rusak masih berkelanjutan sampai dengan akhir tahun anggaran, dimana pelaksanaan hal-hal tersebut mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Proporsi sampel pangan olahan meliputi sampel pangan olahan, sampel PIRT, dan sampel *emerging issue*/pangan tertentu. Dalam hal jumlah sampel *emerging issue* yang meningkat mengakibatkan berkurangnya proporsi target sampel pangan olahan.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	100	100	100%	Baik	

a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan

sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

$\underline{n}$

$A = \text{jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi} / \text{total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi} \times 100\%$

$B = \text{Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling} / \text{total parameter uji dalam pedoman sampling} \times 100\%$

$C = \text{Jumlah parameter yang terkonfirmasi} / \text{total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi} \times 100\%$

$n = \text{total sampel}$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 100% dengan target 100%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	100	-	-
TW II Tahun 2025	100	100	100%
TW III Tahun 2025	100	100	100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperhitungkan dikarenakan tidak ada sampel KLB-KP. Kemudian pada triwulan II realisasi kinerja sudah dapat diperhitungkan dengan nilai realisasi 100 dan dapat dipertahankan pada triwulan III.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah 100% dibandingkan dengan target

tahunan sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terdapat 5 Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang disampling dan diuji untuk mengetahui agen terduga penyebabnya. Hasil uji terhadap sampel KLB-KP tersebut terkonfirmasi positif parameter uji dugaan penyebab keracunan sesuai hasil investigasi. Secara umum, penyebab keracunan yang terkonfirmasi disebabkan karena aspek mikrobiologis.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah melakukan koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait melalui partisipasi dalam Tim Gerak Cepat penanganan KLB dan satuan tugas Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, dalam rangka menjaga validitas pengujian dan menemukan agen penyebab keracunan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan investigasi dan menerapkan JMHP dalam setiap proses pengujian atas sampel KLB KP yang diterima.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Telah dibentuknya Tim Gerak Cepat (TGC) BBPOM Bandar Lampung yang terdiri dari berbagai fungsi sehingga meningkatkan koordinasi internal dan penanganan KLB-KP.

2. Petugas TGC kompeten dan telah mengikuti bimbingan teknis penanganan KLB-KP yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan pada 9-11 Juli 2025.
3. BBPOM Bandar Lampung telah tergabung dalam tim TGC kota Bandar Lampung dan satuan tugas penyelenggaraan MBG Provinsi Lampung sehingga koordinasi dan pelaksanaan tugas untuk penanganan KLB-KP dalam wilayah Bandar Lampung menjadi lebih mudah.

g. Kendala

Jumlah sampel tidak memenuhi syarat pengujian 5plo untuk uji mikrobiologi.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	69.381.940	59.030.814	85,08	1,18	0,18	100 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah efisien. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan serta pengadaan sampel.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Melalui laporan kinerja ini dapat diketahui bahwa capaian IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah 100%. Peran BBPOM di Bandar Lampung dalam penanganan KLB-KP di wilayah pengawasannya cukup signifikan. Koordinasi dan sinergitas lintas sektoral diperlukan untuk memperoleh hasil investigasi yang tepat dalam rangka mengetahui agen terduga penyebab keracunan.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	85	98,29	115,64%	Tidak dapat disimpulkan	

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =
20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Note: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan (sebelum tanggal 15 dibulan berikutnya)

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,29% dengan target 85%. Capaian yang diperoleh sebesar 115,64% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	82,29	96,81%
TW II Tahun 2025	85	98,29	115,64%
TW III Tahun 2025	85	98,29	115,64%

Pada triwulan II dan III tahun 2025, realisasi kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I dimana realisasi kinerja semula adalah 82,29 kemudian meningkat menjadi 98,29. Seluruh sampel PIRT telah selesai diperiksa, diuji dan ditindaklanjuti pada triwulan II.

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Pada indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setelah dihitung menggunakan manual IKU yang lama dan baru tidak terdapat perubahan realisasi kinerja dan seluruh sampel telah selesai pada triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,29	115,64% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,29% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 85% sehingga capaiannya adalah 115,64%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Seluruh target sampel PIRT tahun 2025 telah selesai disampling dan diuji pada TW II. Pelaksanaan pengujian telah sesuai dengan parameter uji kritis sesuai pedoman, begitu juga dengan pengambilan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari 35 sampel yang diperiksa dan diuji diperoleh 26 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 9 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel yang TMS antara lain 3 sampel TMS Angka Kapang Khamir, 1 sampel TMS pemerian, 1 sampel TMS kadar cemaran logan As, 1 sampel TMS kadar pewarna dan kadar siklamat, 1 sampel TMS siklamat, 1 sampel TMS kadar pengawet sorbat, dan 1 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka *Enterobacteriaceae*. Terhadap 3 sampel TMS telah dilakukan tindak lanjut berupa dikirimkannya surat dinas terkait tindak lanjut hasil pengawasan kepada pemerintah daerah sesuai lokasi sarana produksi sampel PIRT tersebut. Tindak lanjut atas sampel PIRT yang TMS telah diselesaikan pada bulan Juli 2025.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

BBPOM di Bandar Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan industri rumah tangga pangan yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk industri rumah tangga pangan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta timeline yang telah disepakati.
2. Pemanfaatan Modul E-learning Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh E-Sertifikat sebelum melaksanakan tugas sampling sesuai dengan komoditi yang diawasi.
3. Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

g. Kendala

Karena beban pengujian sampel Obat dan Makanan yang tinggi, hasil pengujian sampel PIRT yang TMS baru dapat diketahui pada akhir bulan Juni sehingga tindak lanjut terhadap 6 sampel TMS baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Juli. Namun demikian target tahunan tetap tercapai.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,29	115,64	37.994.872	32.326.398	85,08	1,36	0,36	95 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah efisien. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan dan pengadaan sampel.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin interim Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target tahunan sampel PIRT telah tercapai. Seluruh target sampel tahun 2025 telah diperiksa, diuji, dan ditindaklanjuti 100%.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	79	85,58	108,33%	Sangat Baik	

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. Contoh: %B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut (B1+B2+B3)) x 100%

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 85,58% dengan target 79%. Capaian yang diperoleh sebesar 108,33% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	79	66,67	84,39%
TW II Tahun 2025	79	79,95	101,20%
TW III Tahun 2025	79	85,58	108,33%

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I dan II dimana realisasi TW I adalah 66,67% dan realisasi TW II adalah 79,95 kemudian pada triwulan III meningkat menjadi 85,58. Peningkatan kinerja ini didukung oleh peningkatan kesadaran dari pelaku usaha dalam melaksanakan rekomendasi hasil inspeksi dan melakukan pelaporan CAPA.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	85,58	108,33% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 85,58% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 79% sehingga capaiannya adalah 108,33%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Keberhasilan indikator ini didukung oleh tingkat kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil perbaikan/CAPA semakin meningkat. Berbagai program yang telah diluncurkan BBPOM di Bandar Lampung untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait pembuatan CAPA yaitu Bimbingan Teknis Pembuatan CAPA dan pemberian konsultasi kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA. Untuk pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam membuat CAPA, BBPOM di Bandar Lampung membuat Inovasi Klinik CAPA. Inovasi ini merupakan media yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk berkonsultasi. Konsultasi yang ditawarkan BBPOM di Bandar Lampung melalui online zoom meeting, chat WA ke petugas maupun datang langsung ke kantor

BBPOM di Bandar Lampung. Kemudahan dalam pengiriman CAPA membuat pelaku usaha antusias dalam mengirimkan CAPA. BBPOM di Bandar Lampung telah menyiapkan beberapa media seperti email descapabpomlpg@gmail.com , Inovasi Klinik CAPA dan WA ke petugas CAPA.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung secara aktif melakukan koordinasi dan audiensi dengan pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas PTSP, Dinas Perdagangan, dan lain-lain.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai upaya penyempurnaan ke depan maka perlu dioptimalkan pemakaian aplikasi “*Klinik CAPA*” sebagai media konsultasi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA.

Selain itu, upaya perbaikan terkait peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam membuat CAPA dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan lintas sektor lain terkait seperti organisasi profesi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Bimbingan Teknis Pembuatan CAPA kepada pelaku usaha. Kegiatan bimbingan teknis pembuatan CAPA bekerjasama dengan lintas sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kesehatan Kota Metro dan Pedagang Besar Farmasi.
2. Terdapat inovasi “*Klinik CAPA*” yang merupakan media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala terkait pembuatan CAPA.
3. Monitoring dan Evaluasi CAPA dilakukan secara berkala.
4. Peningkatan kompetensi petugas secara berkala.

g. Kendala

1. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh produsen pangan olahan khususnya UMKM masih rendah jika dibandingkan dengan sarana yang lain. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman terkait pembuatan CAPA masih perlu ditingkatkan.
2. Pengiriman surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke pelaku usaha masih menggunakan nomor WA pribadi petugas sehingga berpotensi terjadinya *conflict of interest*.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	85,58	108,33	32.158.489	37.824.320	117,62	0,92	-0,08	(Tidak Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah tidak efisien. Inefisiensi ini disebabkan karena anggaran yang digunakan menyatu dengan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan anggaran yang telah direalisasikan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat memberikan informasi gambaran tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam upaya perbaikan yang dilakukan terhadap temuan ketidaksesuaian pada saat dilakukan pemeriksaan sarana. Laporan kinerja dapat digunakan untuk mengembangkan strategi,

seperti mengidentifikasi peluang, mengembangkan rencana strategis, dan memantau kemajuan.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	90,5	96,88	107,05	Sangat Baik	

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan / Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak / jumlah target sesuai renlak) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Keterangan:

Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi. Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/
jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

**% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai
Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%**

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi
sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan
inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/
Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang
selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/
jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator persentase sarana produksi
Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah

96,88% dengan target 90,5%. Capaian yang diperoleh sebesar 107,05% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	88	100	113,64%
TW II Tahun 2025	88	93,75	106,53%
TW III Tahun 2025	90,5	96,88	107,05%

Pada triwulan II tahun 2025, terjadi penurunan realisasi kinerja dibandingkan dengan triwulan I dimana realisasi kinerja semula adalah 100 kemudian menurun menjadi 93,75 namun pada triwulan III kinerja meningkat menjadi 96,88.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	96,88	107,05 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,88% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 90,5% sehingga capaiannya adalah 107,05%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target, hal ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan (renlak) dan peningkatan kinerja pengawasan melalui peningkatan kompetensi petugas terus dilaksanakan di antaranya melalui pelatihan Inspektur OBA-SK dan Pelatihan Inspektur Kosmetik. Selain itu faktor monitoring dan evaluasi capaian IKU melalui pencatatan dan pengarsipan juga menjadi faktor yang penting dan selalu dikendalikan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah dengan melakukan sosialisasi pedoman IKU / definisi operasional dan pedoman tindak lanjut pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam dan kosmetik melalui media informasi internal (*inspection index*).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini didukung oleh terlaksananya

1. Perencanaan pemeriksaan dengan baik
2. Ketersediaan Inspektur Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang kompeten dan mempunyai kewenangan. Pada TW III terdapat penambahan 2 peserta Pelatihan Inspektur Kosmetik dan 1 orang peserta Pelatihan Inspektur OBA.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik
4. Tersedianya anggaran yang cukup

g. Kendala

Kendala yang dihadapi adalah kurang cepatnya petugas yang disebabkan kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut dan penginputan hasil pemeriksaan ke dalam SIPT.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	96,88	107,05	3.296.986	2.815.623	85,40	1,25	0,25	95 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah efisien. Efisiensi anggaran ini didukung oleh:

- Kesesuaian antara rencana pelaksanaan (renlak) terhadap capaian hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan ditindaklanjuti.
- Kesesuaian antara anggaran yang direncanakan terhadap serapan anggaran yang digunakan pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target Triwulan III telah tercapai dengan kategori sangat baik. Serapan anggaran cukup baik. Masih perlunya sosialisasi dan peningkatan kompetensi petugas terkait teknis inspeksi dan pola tindak lanjut hasil pengawasan. Evaluasi kinerja ini bisa menjadi masukan untuk pencapaian yang lebih baik di TW berikutnya.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	91	99,58	109,43%	Sangat Baik	

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 - b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK).

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,58% dengan target 91%. Capaian yang diperoleh sebesar 109,43% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	80	-	-
TW II Tahun 2025	80	100	125%
TW III Tahun 2025	91	99,58	109,43%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya dikarenakan manual indikator belum ditetapkan. Pada triwulan II dan III, diketahui bahwa realisasi kinerja mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,58	109,43% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,58% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 91% sehingga capaiannya adalah 109,43%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

Pada TW III terdapat perubahan target dari sebelumnya yaitu dari 80% menjadi 91%, sehingga berdampak terjadinya penurunan capaian dari semula 125% menjadi 109,43%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Secara umum pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dilaksanakan sesuai rencana dan target. Faktor penentu keberhasilan diantaranya kesiapan dan ketersediaan inspektur pangan, ketersediaan peraturan-peraturan terkait pedoman pemeriksaan dan pedoman tindak lanjut, selain itu ketersediaan SOP dan form dan ceklist audit serta sarana dan prasarana lainnya. Pada TW III terjadi penambahan satu petugas yang sudah mengikuti pelatihan Inspektur Pangan.

Sampai dengan bulan September 2025, sebanyak 80 sarana produksi pangan olahan telah diperiksa termasuk 8 sarana IRTP. Dari jumlah tersebut terdapat 1 sarana produksi pangan olahan yang terlambat dalam pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan pemeriksaan sarana sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota walaupun dari segi proporsi masih belum setara dengan alasan jarak lokus yang berbeda-beda.

Keberhasilan pemeriksaan sarana pangan olahan IRTP, didukung koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Pendampingan pemeriksaan oleh petugas Dinas sangat diperlukan dan termasuk dalam penyelesaian tindak lanjut CAPA.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sesuai rencana serta ketepatan dan kecepatan pelaporan hasil pemeriksaan yang harus dilakukan

sesuai pedoman. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan inspeksi tidak berbeda dengan rencana. Selain itu pengendalian rekaman/arsip hasil pemeriksaan merupakan hal penting untuk dikendalikan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini didukung oleh terlaksananya

1. Perencanaan pemeriksaan dengan baik
2. Ketersediaan Inspektur Pangan yang kompeten dan mempunyai kewenangan
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik
4. Pengarsipan hasil pemeriksaan yang baik

g. Kendala

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang menjadi kendala adalah

1. Kurangnya jumlah inspektur pangan
2. Belum adanya spesialisasi kompetensi inspektur pada komoditi sediaan farmasi dan pangan olahan dalam penugasan inspeksi

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,58	109,43	55.577.771	47.463.363	85,40	1,28	0,28	95 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah efisien. Efisiensi anggaran ini didukung oleh Kesesuaian antara rencana pelaksanaan (renlak) terhadap capaian hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dan ditindaklanjuti.

Kesesuaian antara anggaran yang direncanakan terhadap serapan anggaran yang digunakan pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target Triwulan III telah tercapai dengan kategori sangat baik. Serapan anggaran cukup baik. Evaluasi kinerja ini bisa menjadi masukan untuk pencapaian yang lebih baik di TW berikutnya.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	94,5	99,24	105,02%	Sangat Baik	

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh

$$UPT = (A/B) \times 100\%$$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = $\{(A/C) + (B/C)\} / 2 \times 100\%$

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah

diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

C. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan}$

dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

D. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,98% dengan target 94,5%. Capaian yang diperoleh sebesar 104,74% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	93	-	-
TW II Tahun 2025	93	97,69	105,04%
TW III Tahun 2025	94,5	99,24	105,02%

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya dikarenakan manual indikator belum ditetapkan. Pada triwulan III realisasi kinerja meningkat dari sebelumnya pada triwulan II adalah 97,69 kemudian pada triwulan III menjadi 99,24 dan seluruhnya telah mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	99,24	105,02% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,24% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 94,5% sehingga

capaiannya adalah 105,02%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Keberhasilan indikator kinerja ini disebabkan oleh pemeriksaan yang dilakukan sesuai ketentuan. Berbagai faktor yang mendukung terhadap keberhasilan pencapaian indikator ini, seperti sistem perencanaan yang tepat, pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan pedoman, kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pembuatan laporan serta kompetensi petugas yang senantiasa ditingkatkan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan agar capaian indikator kinerja tetap terjaga maka kompetensi petugas agar senantiasa ditingkatkan mengikuti perkembangan isu pengawasan obat dan makanan terkini. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sarana distribusi farmasi perlu ditingkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait rekomendasi hasil pemeriksaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Tersedia pedoman pemeriksaan dan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan serta daftar regulasi yang digunakan.
2. Perencanaan kegiatan yang baik
3. Kompetensi petugas yang senantiasa ditingkatkan
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala
5. Tersedia anggaran yang cukup
6. Sistem verifikasi laporan oleh supervisor

g. Kendala

Belum semua petugas mengikuti pelatihan inspektur sehingga perlu dilakukan supervisi dalam melakukan pemeriksaan sarana.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	99,24	105,02	184.441.314	205.747.211	111,55	0,94	-0,06	(Tidak Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah tidak efisien. Inefisiensi ini disebabkan karena terdapat beberapa komponen penganggaran yang tidak mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian indikator yang dihitung sebagai input. Antara lain koordinasi lintas sektor dan peningkatan kompetensi petugas.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi terkait prosentase kesesuaian pemeriksaan sarana yang dilakukan terhadap pedoman pemeriksaan. Pengawasan sarana distribusi farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Penentuan target sarana yang diperiksa berdasarkan analisis resiko. Sarana dengan tingkat resiko lebih tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa terlebih dahulu. Sistem pengawasan yang lebih efektif dapat dikembangkan dengan menggunakan analisis resiko berbasis teknologi informasi.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	92	99,14	107,76%	Sangat Baik	

- 
- a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
 - b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
 - c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - 2. Ketepatan waktu pelaporan
 - 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = $(\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan} / \text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}) \times 100\%$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- * Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
 - A = $20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak}) \times 100\%)$
 - B = $70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
 - C = $10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,14% dengan target 92%. Capaian yang diperoleh sebesar 107,76% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	80	100	125%
TW II Tahun 2025	80	98,96	123,70%
TW III Tahun 2025	92	99,14	107,76%

Pada triwulan III tahun 2025, terjadi penurunan realisasi kinerja dibandingkan dengan triwulan I dimana realisasi kinerja semula adalah 100 kemudian menurun menjadi 98,96. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 rekomendasi tindak lanjut terhadap pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian pada triwulan III realisasi kinerja meningkat menjadi 99,14.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	99,14	107,76% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,14% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 92% sehingga capaiannya

adalah 107,76%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Perencanaan pemeriksaan telah disusun dengan baik mempertimbangkan analisa resiko. Pemeriksaan yang dilakukan telah mengacu kepada pedoman pemeriksaan dan tindak lanjut, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala serta kompetensi petugas senantiasa ditingkatkan mengikuti perkembangan pengetahuan dan regulasi terupdate.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan agar capaian indikator kinerja tetap terjaga maka kompetensi petugas agar senantiasa ditingkatkan mengikuti perkembangan isu pengawasan obat dan makanan terkini. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sarana distribusi pangan perlu ditingkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait rekomendasi hasil pemeriksaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Tersedia pedoman pemeriksaan dan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan serta daftar regulasi yang digunakan.
2. Perencanaan kegiatan yang baik
3. Kompetensi petugas yang senantiasa ditingkatkan
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala
5. Tersedia anggaran yang cukup
6. Sistem verifikasi laporan oleh supervisor

j. Kendala

Kompetensi petugas pemeriksa sarana yang belum merata. Belum semua petugas mengikuti pelatihan inspektur sehingga perlu dilakukan supervisi dalam melakukan pemeriksaan sarana.

k. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	99,14	107,76	46.110.328	54.626.081	118,47	0,91	-0,09	(Tidak Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah tidak efisien. Inefisiensi ini disebabkan karena terdapat beberapa komponen penganggaran yang tidak mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian indikator yang tidak dihitung sebagai input. Antara lain koordinasi lintas sektor dan peningkatan kompetensi petugas.

l. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi terkait prosentase kesesuaian pemeriksaan sarana yang dilakukan terhadap pedoman pemeriksaan, efisiensi anggaran yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sarana dan tren capaian prosentase pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan per triwulan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	93,73	99,94	106,63%	Sangat Baik	

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b)/2$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi/Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

Keterangan: untuk poin a dan b, nilai maksimal iklan yang diawasi adalah 100%.

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $\text{Rata-rata dari perhitungan} ((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$

Keterangan: perhitungan proporsi media iklan pada B1-B11 disesuaikan dengan jenis media yang dilakukan pemeriksaan di bulan tersebut secara kumulatif (dengan mengakumulasikan media iklan dari bulan sebelumnya). Sebagai contoh apabila pada B1 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (media A & B), maka proporsi yang dihitung di B1 adalah terhadap 2 media

tersebut. Kemudian apabila di B2 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (C & D), maka proporsi media yang dihitung pada realisasi B2 adalah 4 media (A,B,C,D yang merupakan akumulasi B1-B2).

- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,94% dengan target 93,13%. Capaian yang diperoleh sebesar 107,31% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	93,13	99,48	106,82%
TW II Tahun 2025	93,13	99,94	107,31%
TW III Tahun 2025	93,73	99,94	106,63%

Pada triwulan II dan III tahun 2025, terjadi peningkatan realisasi kinerja dibandingkan dengan triwulan I dimana realisasi kinerja semula pada triwulan I adalah 99,48 kemudian meningkat menjadi 99,94 pada triwulan II dan III. Hal ini didukung oleh personil yang kompeten, pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan rencana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik, dan ketersediaan anggaran yang cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,73	99,94	106,63% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,94% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 93,73% sehingga capaiannya adalah 106,63%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Sampai dengan TW III, iklan obat yang sudah diawasi sejumlah 142 dari 171 atau 89%, kosmetik 294 dari 330 atau 89%, obat bahan alam 99 dari 110 atau 90%, suplemen kesehatan 30 dari 30 atau 100%, dan pangan olahan sejumlah 214 dari 272 iklan atau 78,6%. Dalam pelaksanaan pengawasan iklan ini dilakukan:

1. Kepatuhan terhadap rencana yang telah dibuat
2. Kedisiplinan petugas dalam melaksanakan sampling iklan, pengawasan dan penginputan
3. Verifikasi data dan penginputan SIPT secara berjenjang
4. Memperhatikan SOP pengawasan Iklan
5. Mematuhi target media iklan dan lokus pengawasan

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk peningkatan kinerja maka diperlukan upaya sbb:

- a. Perlu dipastikan kegiatan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dan sesuai pedoman pengawasan iklan.

- b. Kompetensi petugas pengawas iklan dengan mengikuti sosialisasi/pelatihan
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan secara berkala.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengambilan sampel iklan biasanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana maupun kegiatan sampling, sehingga diperlukan perencanaan yang baik. Ketepatan dalam pemenuhan aspek penilaian diantaranya adalah ketepatan waktu pelaporan merupakan hal yang perlu diperhatikan selain media iklan dan jumlah iklan yang diawasi. Verifikasi dalam input dan persetujuan pada saat SIPT merupakan kunci bahwa akurasi data dapat dijamin kebenarannya termasuk penyimpulan hasil.

g. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan iklan adalah:

1. Tidak sinkronnya jadwal dan lokus pemeriksaan sarana dan pengawasan iklan
2. Tidak tersedianya media sesuai jumlah yang ditargetkan, diantaranya media elektronik
3. Kesulitan untuk mendapatkan iklan obat keras terutama pada media spesifik berbasis farmasi maupun kedokteran

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73	99,94	106,63	13.398.000	6.857.270	51,18	2,08	1,08	86 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah dibandingkan capaian kinerja sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. Inefisiensi ini disebabkan karena serapan

anggaran masih lebih rendah dibandingkan dengan rencana, hal ini disebabkan beberapa perjalanan pengawasan iklan menggunakan anggaran pemeriksaan sarana yang dilaksanakan bersamaan. Dari sisi capaian output sudah sesuai antara iklan yang direncanakan diawasi terhadap yang direncanakan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target Triwulan II untuk pengawasan iklan obat dan makanan telah tercapai dengan kategori sangat baik namun dengan kinerja anggaran yang belum efisien. Hasil evaluasi ini menjadi masukan perencanaan pengawasan iklan ke triwulan berikutnya. Hasil pengawasan iklan ini juga dapat ditindaklanjuti oleh bagian terkait lainnya untuk menjadi bahan pengawasan lebih lanjut.

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	91	100	109,89%	Sangat Baik	

- Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
= (A+B)/2

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan

tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dimulai dari bulan Agustus.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 100% dengan target 91%. Capaian yang diperoleh sebesar 109,89% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW III Tahun 2025	91	100	109,89%

Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar baru berlaku pada bulan Agustus 2025 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	91	100	109,89% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 100% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 91% sehingga capaiannya adalah 109,89%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Sampai dengan TW III, pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik yang sudah diselesaikan 153 dari 204 atau 75%. Hal utama yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik ini adalah:

1. Kepatuhan petugas dalam berkerja sesuai rencana yang telah dibuat
2. Kedisiplinan petugas dalam melaksanakan sampling label produk tembakau dan atau rokok elektronik, pengawasan dan penginputan data
3. Diperlukannya verifikasi data dan penginputan SIPT secara berjenjang
4. Memperhatikan SOP pengawasan/pedoman atau manual IKU

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk mempertahankan kinerja perlu dipastikan bahwa kegiatan pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan atau manual IKU. Selain itu diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan secara berkala.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik sangat bergantung pada ketepatan jumlah sesuai renlak penugasan dan ketepatan waktu pelaporan dalam SIPT. Hal ini membutuhkan pengawasan atau verifikasi berjenjang sehingga hasil pelaporan tidak terkendala.

g. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah

- Tidak tersedianya sampel produk tembakau dan atau rokok elektronik di sarana peredaran sesuai dengan merk yang telah ditetapkan oleh unit pengampu sehingga beberapa kali harus mengajukan perubahan merk.
- Seringkali pelaporan terkendala teknis di SIPT, dikarenakan aplikasi yang belum selesai dikembangkan.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89	5.742.000	2.938.830	51,18	2,15	1,15	86 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran pengawasan label masih terlalu rendah dibandingkan capaian kinerja sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. Inefisiensi ini disebabkan karena serapan anggaran masih lebih rendah dibandingkan dengan rencana, hal ini disebabkan beberapa perjalanan pengawasan label kebanyakan dilaksanakan di dalam kota karena alasan ketersediaan sampel dan beberapa perjalanan menggunakan anggaran pemeriksaan sarana yang dilaksanakan bersamaan. Dari sisi capaian output sudah sesuai antara rencana pengawasan produk tembakau dan atau rokok elektronik terhadap pelaksanaan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target Triwulan III untuk pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik telah tercapai dengan kategori sangat baik namun dengan kinerja anggaran yang belum efisien. Hasil evaluasi ini menjadi masukan perencanaan pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik pada triwulan berikutnya. Hasil pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik ini juga dapat ditindaklanjuti oleh bagian terkait lainnya untuk menjadi bahan pengawasan lebih lanjut.

13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah BBPOM di Bandar Lampung

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-	-

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada triwulan III tahun 2025, tidak terdapat target dan realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar Lampung karena pengukuran kinerja pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak terdapat target dan realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar Lampung karena pengukuran kinerja pada indikator ini bersifat tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar	100	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak terdapat target dan realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar Lampung karena pengukuran kinerja pada indikator ini bersifat tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Terdapat 4 sub kegiatan dalam pencapaian IKU ini. Hingga TW 3, terdapat beberapa capaian terhadap target tahunan yang ditetapkan.

1. Tercapainya target pengisian tools pengawasan AMR 100% oleh petugas pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan di sarana Apotek. Keberhasilan capaian ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan ke sarana Apotek sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan,
 - b. Petugas telah terbiasa melakukan pengisian tools pengawasan AMR pada saat pemeriksaan ke Sarana Pelayanan Kefarmasian.
 - c. Adanya sistem pengisian hasil pengawasan di SIPT yang mengharuskan petugas mengisi data-data terkait AMR agar proses input SIPT bisa terkirim ke Supervisor.
2. Telah terselenggaranya Bimtek AMR sebanyak 1 kali pada 7 Agustus 2025 sesuai target yang telah ditetapkan yakni 1 kali dalam setahun. Bimtek diselenggarakan secara luring berkolaborasi dengan PT Anugerah Antar Medika. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Apoteker Penanggung Jawab Apotek berjumlah 60 orang (target yang ditetapkan oleh pusat adalah 30 peserta per kegiatan Bimtek). Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini karena adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan *stakeholder*, dalam hal ini PBF.
3. Target kegiatan publikasi adalah 2 kali dalam setahun yang dibagi dalam 2 periode yakni 1 kali di TW 3 dan 1 kali di TW 4. Telah dilakukan 1 kali publikasi dengan materi publikasi Hasil Pengawasan AMR Tahun 2024 dan Informasi terkait pengendalian AMR. Publikasi dilakukan pada tanggal 29 September 2025 pada media publikasi Instagram, TikTok, dan Facebook. Keberhasilan capaian ini karena dukungan data dari Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP selaku pengampu IKU di pusat serta petugas/SDM di Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan kompetensi dalam mengolah data, membuat materi publikasi, serta berkoordinasi dengan tim media sosial sehingga publikasi dapat terlaksana dengan tepat waktu.
4. Kegiatan Advokasi kepada lintas sektor dengan target pelaksanaan 1 kali dalam setahun belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggaran yang dibutuhkan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Secara keseluruhan, kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Beberapa upaya penyempurnaan kinerja ke depan agar seluruh kegiatan dapat tercapai adalah:

1. Mengoptimalkan SDM yang dapat berperan dalam pencapaian IKU dengan cara:
 - a. Mensosialisasikan kepada petugas untuk melakukan pengisian Tools pengawasan AMR dengan lengkap pada saat pemeriksaan di Apotek karena target terkait pengisian ini dipantau hingga akhir tahun.
 - b. Monitoring dan evaluasi pengawasan AMR secara berkala melalui SIPT sebagai sumber data untuk publikasi pengawasan AMR.
 - c. Berkoordinasi dengan lintas sektor dan Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP secara intensif dalam rangka pelaksanaan kegiatan Advokasi.
2. Melakukan revisi anggaran secepat mungkin agar alokasi dana untuk pencapaian kinerja tersedia, terutama anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Advokasi kepada lintas sektor.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini didukung oleh terlaksananya:

1. Perencanaan kegiatan dengan baik
2. Pelaksanaan pemeriksaan ke sarana Apotek sesuai dengan target tiap TW yang telah ditetapkan
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik
4. Pengarsipan/dokumentasi kegiatan yang baik
5. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan *stakeholder*

g. Kendala

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang dilaksanakan di pertengahan tahun anggaran menimbulkan tantangan manajerial dan operasional yang signifikan. Hal ini menuntut penyesuaian mendadak dalam dua komponen sumber daya yang paling penting, yaitu Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	7.285.000	4.252.371	58,37	#VALUE!	#VALUE!	-

Tingkat efisiensi anggaran belum dapat diperhitungkan dikarenakan belum ada target kinerja pada TW III Tahun 2025. Namun, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dan waktu tanpa mengurangi kualitas output, strategi efisiensi telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan, yakni:

1. Kolaborasi kegiatan Bimtek AMR pada acara yang diselenggarakan oleh *stakeholder* (PBF) dengan narasumber yang melibatkan petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung, yang mana peserta pada kegiatan tersebut selaras dengan target peserta yang ditetapkan pada Petunjuk Teknis. Dengan kolaborasi ini, kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan penggunaan anggaran yang sangat efisien.
2. Pengumpulan data serta materi publikasi secara digital, baik yang diberikan langsung oleh Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP, tarikan data melalui SIPT, serta dokumentasi kegiatan pada saat pengawasan rutin pada sarana Apotek dilakukan oleh Petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Pemenuhan Target Pengendalian AMR ini memberikan informasi terkait tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur pengawasan

AMR di Apotek, efektivitas kolaborasi dengan stakeholder dalam edukasi, dan keberhasilan pemanfaatan media digital dalam publikasi.

Berdasarkan informasi tersebut, laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk:

1. Mempertahankan model kolaborasi dengan PBF/*stakeholder* lain sebagai strategi efisiensi anggaran namun tetap efektif dalam menyelenggarakan Bimtek/KIE.
2. Menganalisis dampak negatif dari penetapan IKU baru di tengah tahun dan memastikan mekanisme alokasi sumber daya (anggaran dan SDM) menjadi lebih fleksibel dan responsif di masa depan.
3. Menjamin kesinambungan penggunaan SIPT sebagai kunci untuk memastikan integritas dan kelengkapan data pengawasan AMR.
4. Menyusun rencana aksi lintas sektor sebagai dasar untuk segera melaksanakan kegiatan Advokasi yang belum terealisasi.

14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	76,7	77,70	101,30	Sangat Baik	

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, MakaSKar, Manado, dan Surabaya, dan masing-

masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Perhitungan Nilai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai tingkat laboratorium:

- A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 untuk Laboratorium Balai Regional $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 untuk Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi = $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 untuk Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota = $(75 \times a) + (15\% \times b) + (10 \% \times c)$
- a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 untuk Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota $(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Target dan realisasi UPT nasional diperoleh dari agregasi sesuai tingkat Laboratorium.

$= (46\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 4}) + (31\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 3}) + (15\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 2}) + (8\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 1})$.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 77,7% dengan target 76,7%. Capaian yang diperoleh sebesar 101,3% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	75	75,2	100,27
TW II Tahun 2025	76,2	76,3	100,13

TW III Tahun 2025	76,7	77,70	101,30

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja meningkat dibandingkan dengan triwulan I dan II dimana sebelumnya pada triwulan I realisasi kinerja adalah 75,2 dan pada triwulan II realisasi kinerja adalah 76,3 kemudian meningkat lagi pada triwulan III menjadi 77,7. Hal ini didukung oleh beberapa hal berikut :

1. Peningkatan persentase pemenuhan SRL (Standar Ruang Lingkup) untuk komoditi obat bahan alam dan mikrobiologi
2. Peningkatan persentase pemenuhan Metode Analisa terverifikasi untuk komoditi Obat, Obat Bahan Alam, dan Kosmetika
3. Terlaksananya pengembangan kompetensi laboratorium melalui *In House Training* untuk komoditi Obat, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik, serta Magang Personil Mikrobiologi ke Balai Besar POM di Serang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2	77,7	100,65% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 77,7 dibandingkan dengan target tahunan sebesar 77,2 sehingga capaiannya adalah 100,65%. Hal ini

menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi dapat tercapai/melampaui.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi laboratorium
2. Pemenuhan target SRL Triwulan III tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai perencanaan disebabkan hal sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan ketersediaan sampel obat di pasaran seperti sampel artesunate steril injeksi, sampel ondansetron cair, dan sampel meloxicam rektal suppositoria sulit ditemukan di sarana peredaran. Terdapat sampel dengan masa kadaluarsa pendek kurang dari 6 bulan seperti Nystatin tablet. Komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan dengan Tim Inspeksi maupun dengan Balai regional untuk mendapatkan sampel-sampel tersebut untuk pemenuhan SRL
 - b. Verifikasi metode analisa untuk SRL obat bahan alam sudah selesai dilaksanakan di akhir Juni dan tidak dapat dimasukkan dalam capaian di Triwulan II karena melewati batas waktu input SKL dari PPPOMN. Realisasi ini diklaim di Triwulan III sehingga menambah nilai capaian
 - c. Verifikasi metode analisa untuk uji mikrobiologi dalam rangka pemenuhan SRL belum terlaksana sampai dengan Triwulan II karena jumlah sampel pada Triwulan II meningkat setelah relaksasi anggaran. Penumpukan sampel rutin di setiap awal bulan untuk semua komoditi ditambah maraknya kasus keracunan MBG menyebabkan sumber daya yang tersedia dikerahkan untuk penyelesaian sampel-sampel tersebut. Penambahan SRL baru dapat dilaksanakan di Triwulan III setelah ada kesepakatan antara tim Inspeksi dan Pengujian untuk memecah sampling menjadi 2 tahap yaitu awal bulan (sampel obat dan pangan) dan pertengahan bulan (sampel OBA, SK, kosmetik). Selain itu, juga terdapat sampel untuk

keperluan verifikasi metode analisa belum tersedia sampai Triwulan III (ondansetron cair) dan sudah dikoordinasikan dengan tim Inspeksi.

3. Pemenuhan metode analisa terverifikasi terlaksana untuk komoditi Obat, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan di Triwulan IV yaitu penambahan SRL, pengembangan kompetensi, dan metode analisa terverifikasi untuk semua komoditi
2. Berkoordinasi dengan substansi Inspeksi terkait ketersediaan sampel untuk pemenuhan SRL dengan Tim Inspeksi
3. Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampling untuk dibagi menjadi 2 tahap (awal dan pertengahan bulan) dan sudah berjalan sejak bulan Juli 2025

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Terlaksananya Pelatihan seperti In House Training Obat, Obat Bahan Alam, dan Kosmetik serta magang personil Mikrobiologi ke BBPOM di Serang berpengaruh dalam menambah pemenuhan SRL dan juga peningkatan kompetensi laboratorium
2. Verifikasi tiap triwulan oleh PPPOMN terhadap capaian SKL seluruh UPT dapat membantu dalam pemantauan capaian dan solusi jika ada kendala
3. Koordinasi rutin antara tim Inspeksi dan Pengujian dalam mencari solusi bersama terkait kendala ketersediaan sampel
4. Keikutsertaan dalam kegiatan Uji Profisiensi dan Uji Banding untuk peningkatan kompetensi laboratorium

g. Kendala

1. Beban sampel mikrobiologi yang meningkat pada Triwulan II setelah relaksasi anggaran dan juga maraknya kasus keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis)

menyebabkan SDM diprioritaskan melakukan pengujian sampel-sampel tersebut. Hal ini berdampak dengan realisasi pemenuhan SRL. Pada bulan Juli terdapat kesepakatan dengan Tim Inspeksi bahwa sampel masuk laboratorium sebanyak 2 tahap.

2. Keterbatasan ketersediaan sampel di pasaran terutama sampel obat seperti sampel artesunate steril injeksi, sampel ondansetron cair, sampel meloxicam rektal suppositoria sulit ditemukan di sarana peredaran. Terdapat sampel dengan masa kadaluarsa pendek kurang dari 6 bulan seperti Nystatin tablet. Sampai dengan Triwulan III sampel meloxicam rektal suppositoria dan ondansetron belum ditemukan di peredaran.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,7	77,7	101,30	8.260.245.836	8.259.500.669	99,99	1,01	0,01	100 % (Efisien)

Pada perhitungan diatas diketahui bahwa capaian anggaran terhadap RPD pada Triwulan III Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan capaian kinerja sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai kinerja adalah efisien. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian, peningkatan ruang lingkup pengujian, pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium serta pengadaan alat laboratorium. Sampai dengan Triwulan III, pengadaan peralatan sudah selesai dilaksanakan. Pengadaan reagen, media mikrobiologi dan suku cadang, kalibrasi peralatan oleh laboratorium eksternal, pengembangan kompetensi berupa *In House Training* dan magang sudah sebagian besar terlaksana.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi serta menetapkan upaya pemenuhan nilai laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan di triwulan selanjutnya sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 bahwa target tercapai dengan kategori sangat baik. Penggunaan anggaran juga efisien. Keterbatasan sampel obat di peredaran menjadi catatan dalam perencanaan pemenuhan SRL di Triwulan IV dan perencanaan tahun depan.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-	-

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

- advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
- mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
- mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

- b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

Pada triwulan III tahun 2025, tidak terdapat target dan realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman karena pengukuran kinerja pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak terdapat target dan realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman karena pengukuran kinerja pada indikator ini bersifat tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar	20	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak terdapat target dan realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman karena pengukuran kinerja pada indikator ini bersifat tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Tahapan Advokasi kepada Kabupaten Kota telah dilakukan tepat waktu pada bulan Juli 2025. Semua perwakilan Kabupaten Kota hadir, dari Organisasi Perangkat Daerah Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Dinas PMD, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Saat Advokasi disampaikan tujuan program, dan juga menyampaikan kembali surat kawat Kemendagri kepada Sekda Kabupaten Kota yang menyebutkan bahwa Badan POM sebagai unit pengampu program, dan kewajiban kabupaten kota untuk mengisi tools penilaian mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi berkelanjutan kepada OPD di Kabupaten Kota untuk persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai data dukung untuk dapat disiapkan mulai saat ini.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Koordinasi secara langsung kepada Sekda Kabupaten Kota, dan meminta Bappeda sebagai koordinator di daerah untuk pengisian tools penilaian Mandiri karena sebagai Bappeda sebagai OPD perencana semua kegiatan daerah.

g. Kendala

Tidak ada anggaran bagi Program ini, sehingga tidak bisa melakukan koordinasi secara langsung kepada semua Kabupaten Kota.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	130.504.125	111.034.151	85,08	#VALUE!	#VALUE!	-

Tingkat efisiensi anggaran belum dapat diperhitungkan dikarenakan belum ada target kinerja pada TW III Tahun 2025. Anggaran pada indikator ini dimanfaatkan untuk pengadaan dan pengujian sampel makanan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025, diperoleh informasi bahwa seluruh progres kegiatan telah selesai dilaksanakan dan saat ini tengah menunggu hasil *assessment* oleh penilai.

**Sasaran Kegiatan 02
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi
Pangan Fortifikasi**

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	65	70,27	108,11%	Sangat Baik	

- Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi

- kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
- d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 70,27% dengan target 65%. Capaian yang diperoleh sebesar 108,11% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	48,75	5,41	11,10%
TW II Tahun 2025	51,46	18,92	36,77%
TW III Tahun 2025	65	70,27	108,11%

Pada triwulan III tahun 2025, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana pada triwulan I realisasi kinerja adalah 5,41 dengan capaian kinerja 11,10% kemudian realisasi kinerja meningkat pada triwulan II yaitu 18,92 dengan capaian kinerja 36,77 dan di triwulan meningkat tajam dengan realisasi 70,27 dengan capaian kinerja 108,11%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	70,27	108,11% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 70,27% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 65% sehingga capaiannya adalah 108,11%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi dapat tercapai/melampaui.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian akumulatif pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi Sampai dengan Triwulan III adalah 26 sarana atau nilai cakupan 70,27% dari target 24 sarana atau nilai cakupan 65%. Capaian terhadap cakupan sarana produksi pangan fortifikasi pada TW III adalah 108,11%, sementara pada triwulan II capaiannya masih 29,11% dengan kategori Perlu Upaya Keras. Pada TW III, dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai renlak yang telah direvisi sehingga seluruh target pemeriksaan sarana telah selesai di TW

III. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan secara sinkronisasi terhadap rencana sampling dan pengujian.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan adalah:

1. Koordinasi tim pemeriksaan dengan tim sampling dan pengujian pada saat perencanaan.
2. Penambahan 2 sarana produksi fortifikasi yang dilakukan pengawasan agar dapat mencapai target indikator.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sudah selesai dilaksanakan. Berdasarkan data yang diperoleh, tindak lanjut dari indikator ini adalah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi fortifikasi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan fortifikasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam mengikuti renlak, pembuatan tindak lanjut dan ketepatan dalam pelaporan dalam SIPT. Hal ini membutuhkan pengawasan atau verifikasi berjenjang serta monev berkala.

g. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan sarana produksi pangan olahan fortifikasi adalah

- a. Beberapa sarana produksi tidak berproduksi sehingga diperlukan penggantian sarana untuk diperiksa.
- b. Adanya perubahan renlak pelaksanaan pemeriksaan.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	70,27	108,11	18.935.700	14.388.000	75,98	1,42	0,42	92 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah efisien. Efisiensi anggaran ini didukung oleh

- Kesesuaian antara rencana pelaksanaan (renlak) terhadap capaian hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan fortifikasi dan ditindaklanjuti.
- Kesesuaian antara anggaran yang direncanakan terhadap serapan anggaran yang digunakan pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan fortifikasi.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target Triwulan III telah tercapai dengan kategori sangat baik. Serapan anggaran cukup baik. Evaluasi kinerja ini bisa menjadi masukan untuk pencapaian yang lebih baik di TW/tahun berikutnya.

Sasaran Kegiatan 03
Meningkatnya Efektivitas KIE di Wilayah kerja BBPOM di
Bandar Lampung

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

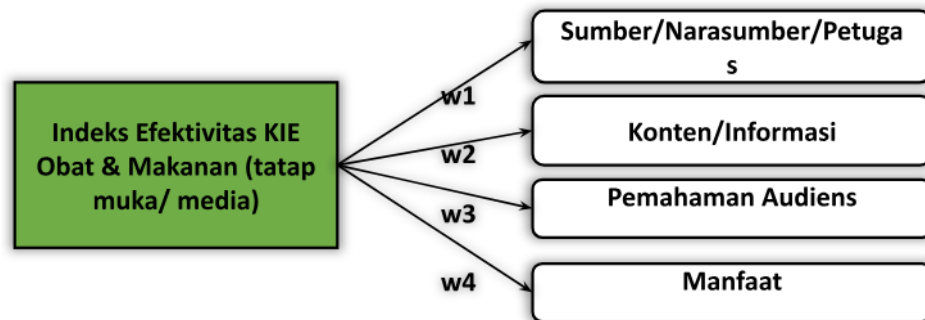
Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	89,6	91,50	102,12%	Sangat Baik	

- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 - 1. Sumber atau Narasumber KIE
 - 2. Konten atau Informasi KIE
 - 3. Pemahaman Audiens KIE
 - 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung adalah 91,5 dengan target 89,6. Capaian yang diperoleh sebesar 102,12% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	89,6	88,02	98,24%
TW II Tahun 2025	89,6	91,03	101,60%
TW III Tahun 2025	89,6	91,50	102,12%

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana sebelumnya pada triwulan I realisasi kinerja adalah 88,02 kemudian meningkat pada triwulan II menjadi 91,03 dan meningkat lagi pada triwulan III menjadi 91,50.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	91,50	102,12% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung adalah 91,50 dibandingkan dengan target tahunan sebesar 89,6 sehingga capaiannya adalah 102,12%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Telah dilaksanakannya kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagaimana halnya sebelumnya ,BBPOM di Bandar Lampung

melaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Pariwisata, Kwarda Pramuka, Perguruan tinggi dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dimana dengan adanya efisiensi anggaran, BBPOM di Bandar Lampung mampu berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang minim,

Salah satu bentuk nyata sinergi tersebut terlihat dalam kegiatan KIE Kosmetik Aman bersama kegiatan festival aesthetic lampung, KIE bersama pramuka dan partisipasi dalam KIE dengan Perguruan Tinggi seperti UNILA dll yang menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan kosmetik yang aman. Selain itu, pelaksanaan KIE juga diperluas melalui pemanfaatan mediasosial sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif dan menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda.

Keberhasilan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam hal jangkauan dan kualitas edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pesan yang disampaikan, konsistensi publikasi di media sosial, serta penguatan peran mitra kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KIE secara berkelanjutan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah:

1. Lebih memperkuat Kerjasama dengan berbagai pihak (Eksternal)
2. Meefektifkan KIE melalui media sosial

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE juga didukung oleh peran Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman dan

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan melibatkan Kader Keamanan Pangan yang telah terbentuk (melalui Bimbingan Teknis Keamanan Pangan). Selain itu BBPOM di Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang tercapainya target tingkat efektivitas KIE yaitu melalui kegiatan KIE yang menunjang keberhasilan lainnya dengan adanya penambahan jumlah follower dan engagement yang cukup signifikan pada akun media sosial BBPOM di Bandar Lampung merupakan salah satu data penunjang yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti informasi dan edukasi dari BPOM. BBPOM di Bandar Lampung mencapai target dalam pembuatan konten yang sesuai dengan agenda *setting* Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan dalam berbagai kegiatan, namun pelaksanaannya tidak sesuai ekspektasi dengan

tidak tersedianya anggaran sehingga kegiatan KIE baik secara luring (pameran, sosialisasi), menjadi terbatas maupun secara daring melalui media sosial (ig, you tube), media elektronik (televisi), spanduk, banner dan media cetak juga terbatas, dikarenakan minimnya anggaran publikasi KIE dengan melibatkan dan berkolaborasi lebih banyak dengan lintas sektor seperti :

1. Adanya inovasi tour edukasi GALAKSI bersama komunitas sekolah/universitas dengan anggaran yang minim
2. Adanya pelaksanaan KIE secara langsung,
3. Adanya kerjasama dengan Dinas Parekraf Provinsi Lampung sehingga dapat melaksanakan KIE Kosmetik Aman dengan pesertanya dalam pameran miss aesthetic Lampung
4. Adanya Pengembangan Media sosial Instagram dll , instagram sudah mendapatkan fitur centang biru
5. Adanya Kerjasama dengan Unila dengan bekerjasama dengan Muli Mekhanai UNILA
6. Adanya Kerjasama melaksanakan KIE Stunting
7. Adanya pelaksanaan KIE dengan mengundang seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan FKP tahun 2025 dengan tema sosialisasi Layanan

8. Adanya Pelaksanaan KIE kerjasama dengan Kwarcab Bandar Lampung

g. Kendala

1. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan KIE
2. Perlunya penambahan kompetensi petugas KIE

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	91,5	102,12	2.065.499.759	687.278.810	33,27	3,07	2,07	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa capaian anggaran jika dilihat termasuk anggaran masih terlalu rendah dalam mencapai kinerja sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. Anggaran pada indikator ini dimanfaatkan untuk kegiatan KIE rutin dan peningkatan kompetensi petugas. Pencantuman RPD pada halaman III DIPA masih termasuk anggaran blokir sehingga tidak dapat terserap menjadi penyebab rendahnya prosentase realisasi terhadap target RPD. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti pada saat revisi halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2025.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. BBPOM di Bandar Lampung yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja yang diukur melalui peningkatan Nilai Tingkat efektivitas KIE Tahun 2025 terutama di TW III pemanfaatan informasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui proses usulan revisi target kinerja untuk optimalisasi

pelaksanaan kegiatan, serta telah dilakukan revisi anggaran untuk dipilih berdasarkan prioritas, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian anggaran, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian strategi dalam pencapaian target kinerja terutama berkaitan dengan sinergitas lintas sektor.

2. Telah melaksanakan pengisian survey efektifitas KIE di Media sosial
3. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan obat dan makanan. Penyesuaian terhadap pelaksanaan program KIE adalah dalam penyusunan strategi pelaksanaan KIE mengacu pada pedoman strategi KIE Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh Badan POM dengan mempertimbangkan target *audience* dan memperhatikan kebutuhan informasi di masyarakat serta sebagai dasar dalam melakukan pengembangan program yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik local Provinsi Lampung termasuk pemilihan kanal/saluran KIE yang dapat menjangkau cakupan target yang lebih luas yaitu antara lain dengan memanfaatkan media antara lain media cetak, media social (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan subsite), media elektronik (TV/radio), media luar ruang (baliho/spanduk) di area strategis Kota Bandar Lampung maupun hingga Kabupaten/kota, sarana transportasi umum serta KIE secara langsung dengan memanfaatkan produk promosi yang dibagikan kepada masyarakat.
4. Telah menunjuk PJ Pelaksanaan survey KIE di setiap pelaksanaan kegiatan KIR Peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor dan dengan organisasi masyarakat seperti pramuka.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	100%	100%	100%	Baik	

- a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 - A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 - B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
 - C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. Jika Kab/Kota banyak maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 - 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- e. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah.
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

f. Target 2025

- 489 Sekolah Full Intervensi
- 2.511 Sekolah Perluasan

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progreSK tahapan.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 100% dengan target 100%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%
TW II Tahun 2025	95%	78,3%	82,42%
TW III Tahun 2025	100%	100%	100%

Pada triwulan III tahun 2025, terjadi peningkatan kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana pada triwulan I realisasi kinerja adalah 0% dengan capaian kinerja 0% kemudian realisasi kinerja meningkat pada triwulan II yaitu 78,3% dengan capaian kinerja 82,42%. Namun pada 2 triwulan ini, realisasi kinerja sebesar 78,3% masih belum mencapai target 95%. Hal ini disebabkan karena pada tahap perencanaan tidak mempertimbangkan pada akhir bulan Mei dan pada bulan Juni merupakan jadwal anak sekolah melaksanakan ujian

semester dan setelah itu merupakan waktu liburan sekolah serta mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pertengahan bulan Juli 2025. Pada triwulan III seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan telah selesai mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	100%	100% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 100% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 12 sekolah sehingga capaiannya adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada TW III tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yaitu lanjutan tahap Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta tahap pengawalan sekolah yang diintervensi tahun 2024. Untuk lanjutan tahap Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta tahap pengawalan sekolah yang diintervensi tahun 2024 dapat terlaksana dengan melakukan perencanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak sekolah/madrasah serta lintas sektor terkait.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk tahap Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah serta pendampingan kepada sekolah/madrasah untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah berupa SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah untuk Menjaga Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada siswa dan orang tua siswa serta evaluasi pemahaman siswa dan orang tua siswa/komite sekolah setelah diberikan sosialisasi keamanan pangan melalui pre test dan post test.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada TW III tahun 2025 telah berhasil dilaksanakan lanjutan tahap 4 dan tahap 5 yaitu tahap Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan tahap pengawalan sekolah yang diintervensi tahun 2024, hal ini disebabkan perencanaan dan koordinasi yang baik dengan dinas pendidikan dan Kemenag kab. Lampung Selatan, pihak sekolah dan komunitas sekolah serta untuk pengawalan sekolah dengan dinas pendidikan dan Kemenag kab. Lampung Barat dan kota Bandar Lampung, pihak sekolah dan komunitas sekolah.

g. Kendala

Padatnya kegiatan sekolah/madrasah dengan adanya kurikulum yang baru sehingga perlu dilakukan komunikasi yang intens dengan kepala sekolah/madrasah untuk pelaksanaan tahap Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100,00	317.064.902	41.458.900	13,08	7,65	6,65	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah dalam mencapai kinerja sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. Anggaran yang terserap baru dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi lintas sektor, advokasi lintas sektor di tingkat kabupaten, dan sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Pencantuman RPD pada halaman III DIPA masih termasuk anggaran blokir sehingga tidak dapat terserap menjadi penyebab rendahnya prosentase realisasi terhadap target RPD. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti pada saat revisi halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2025.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang capaian tahapan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, sekolah yang dilakukan intervensi penuh, sekolah perluasan dan pengawalan sekolah tahun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi serta menetapkan upaya-upaya pencapaian target seperti yang telah direncanakan. Juga laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh dinas pendidikan dan kementerian agama kab. Lampung Selatan untuk melakukan replikasi program ini untuk memperluas program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada sekolah/madrasah di sekitarnya.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	95%	100%	105,26%	Sangat Baik	

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
- kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah desa pangan aman adalah 100% dengan target 95%. Capaian yang diperoleh sebesar 105,26% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%
TW II Tahun 2025	70%	70%	100%
TW III Tahun 2025	95%	100%	105,26%

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana pada triwulan I belum ada realisasi kinerja karena adanya perubahan target jadwal tahapan program oleh unit pengampu, yaitu PMPUPO. Namun pada triwulan II meningkat menjadi 70% dan mencapai target. Hal ini karena telah terlaksana tahap Advokasi di bulan April, yang dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan yang menyampaikan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah, dan menyampaikan kepada OPD terkait untuk ikut mendukung semua tahapan pelaksanaan program. Kemudian pada triwulan III seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan telah selesai mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	5	100%	100% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Jumlah desa pangan aman adalah 100% dibandingkan dengan target tahunan sebesar sebanyak 5 desa

sehingga capaiannya adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Target dan *timeline* setiap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman dapat tercapai karena adanya perencanaan yang baik, dukungan penuh dan koordinasi yang intensif dengan semua OPD terkait, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan adanya efisiensi anggaran, strategi untuk mencapai target adalah dengan melakukan komunikasi intensif kepada Kepala Desa dan Tim. Karena tahapan Bimbingan Teknis kepada Komunitas dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa dan dibantu pelaksanaannya oleh Tim Desa.

Tahapan program telah dilaksanakan sampai monitoring dan evaluasi, semua Desa telah memiliki SK Kader Keamanan Pangan Desa dan Tim Keamanan Pangan Desa, Profil Desa, dan Rencana Aksi Keamanan Pangan yang diketahui oleh Pemda Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengawasan Desa juga telah dilakukan terhadap 4 Desa intervensi tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat, dan 5 Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah:

Akan melakukan Advokasi di triwulan 1 pada tahun 2026 untuk dapat memulai tahapan berikutnya lebih cepat dan memenuhi *timeline*.

Melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan Kepala Desa dan Tim Desa, juga stakeholder terkait di Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat mengawal Rencana Aksi Keamanan Pangan di Desa.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Dimulainya program Desa Pangan Aman dengan Advokasi yang mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Lampung Selatan. Komitmen Bupati sebagai pimpinan daerah bersama OPD terkait tertuang dalam lembaran Pernyataan Dukungan/Komitmen, sehingga stakeholder Dinas PMD sebagai mitra kerja dalam program ini sangat membantu pelaksanaan program, termasuk untuk berkoordinasi dengan pihak aparat desa. Ini membuat pelaksanaan semua tahapan program dapat terlaksana tepat waktu dan mencapai target yang sudah ditetapkan.
- Saat Pelatihan Kader disampaikan dengan jelas bahwa kader mempunyai kewajiban untuk dapat menyebarluaskan informasi kepada komunitas. Pelaksanaan dilakukan oleh Kader yang telah dilatih dan dibantu pelaksanaannya oleh Tim dari Desa.
- Membuat WhatsApp Group untuk setiap Desa yg memungkinkan terjadinya dialog langsung terkait semua tahapan program antar Tim Desa, Kader Keamanan Pangan Desa, dan Tim dari Infokom BBPOM di Bandar Lampung.
- Pemberian penghargaan sebagai Desa Pangan Aman kepada semua Desa intervensi yang telah melengkapi persyaratan administrasi

g. Kendala

Beberapa pemahaman komunitas masyarakat yang masih perlu mendapat pendampingan terkait Bimtek Komunitas yang memerlukan data pre test dan post test. Tapi bisa diatasi dengan dipandu dengan link yang memudahkan untuk mengisi pre dan post test, termasuk data dukung pelaksanaan seperti foto kegiatan.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah desa pangan aman	95	100	105,26	547.554.636	56.721.500	10,36	10,16	9,16	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah dalam mencapai kinerja sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. Anggaran yang terserap digunakan untuk melakukan Pelatihan Kader dan Bimbingan Teknis kepada Komunitas Masyarakat. Inefisiensi ini disebabkan karena Pencantuman RPD pada halaman III DIPA masih termasuk anggaran blokir sehingga tidak dapat terserap menjadi penyebab rendahnya prosentase realisasi terhadap target RPD. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti pada saat revisi halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2025.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun sebelumnya, maka kepada Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan diharapkan untuk melakukan replikasi program untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa. Kegiatan ini dapat dikoordinir dan disinergikan dengan program dari OPD terkait. Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk melakukan replikasi program ini untuk memperluas program desa pangan aman.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	100%	100%	100%	Baik	

- a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawasan pada tahun berikutnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 100% dengan target 100%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%
TW II Tahun 2025	90%	90%	100%
TW III Tahun 2025	100%	100%	100%

Pada triwulan II tahun 2025, terjadi peningkatan kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana pada triwulan I realisasi kinerja adalah 0% dengan capaian kinerja 0% kemudian realisasi kinerja meningkat pada triwulan II yaitu 90% dengan capaian kinerja 100%. Hal ini didukung karena koordinasi dan sinergitas yang kuat dengan dinas perdagangan kab. Lampung Selatan, kepala UPT Pasar Natar dan petugas pasar Natar. Pada triwulan III, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan selesai mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100%	100% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 100% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 1 pasar sehingga capaiannya adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada TW III tahun 2025 telah dilaksanakan tahap 5 program pasar aman berbasis komunitas yaitu pengawalan pasar yang diintervensi tahun 2024, hal ini disebabkan perencanaan dan koordinasi yang baik dengan dinas perdagangan kab. Lampung Barat dan kota Bandar Lampung, kepala UPT Pasar dan petugas pasar.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Melakukan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan dinas perdagangan kab. Lampung Barat dan kota Bandar Lampung, kepala UPT Pasar dan petugas pasar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adanya perencanaan dan koordinasi yang baik dengan dinas perdagangan kab. Lampung Barat dan kota Bandar Lampung, kepala UPT Pasar dan petugas pasar.

g. Kendala

Tidak ada kendala.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	85.717.596	15.842.000	18,48	5,41	4,41	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah dalam mencapai kinerja sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. anggaran yang terserap baru dimanfaatkan untuk kegiatan survey pasar dalam rangka intervensi pasar aman dari bahan berbahaya, sosialisasi keamanan

pangan pasar, dan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar. Pencantuman RPD pada halaman III DIPA masih termasuk anggaran blokir sehingga tidak dapat terserap menjadi penyebab rendahnya prosentase realisasi terhadap target RPD. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti pada saat revisi halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2025.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang capaian tahapan pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas dan pengawalan pasar tahun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi serta menetapkan upaya-upaya pencapaian target seperti yang telah direncanakan. Juga laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh dinas perdagangan kab. Lampung Selatan untuk melakukan replikasi program ini untuk memperluas program pasar pangan aman berbasis komunitas pada pasar di sekitarnya.

Sasaran Kegiatan 04 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	88,33%	94,05%	106,48%	Sangat Baik	

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
- a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan:

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Perhitungan target tahunan (B12):

$$\frac{((\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB} + \text{Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap} + \text{Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB}) \text{ dari tahun 2025 sd tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029}} \times 100\%$$

Contoh:

UPT A memiliki target pendampingan UMKM :

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = $(4+6+8) / (4+6+8+10+10) \times 100\%$

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh:

UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = (% Progress UMKM A + % Progress UMK B + ... + % Progress UMKM E) / 5

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

Berdasarkan hasil pemutakhiran terhadap manual IKU pada bulan Agustus, perubahan pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan terletak pada cara perhitungan yaitu:

Semula:

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = $(A + B + C)/3$

A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap / Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

C = Jumlah rekomendasi SPA CPKB / Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Menjadi:

Perhitungan target tahunan (B12):

$(\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB} + \text{Jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap} + \text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}) / \text{Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029}$

Perhitungan target B1 - B11:

Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja menggunakan manual IKU lama digunakan pada bulan Januari sampai dengan Juli, selanjutnya mulai bulan Agustus perhitungan sudah menggunakan manual IKU baru.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi tahapan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 94,05% dengan target 88,03%. Capaian yang diperoleh sebesar 106,48% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	22,5%	42,60%	189,33%
TW II Tahun 2025	71,67%	71,67%	100%
TW III Tahun 2025	88,33%	94,05%	106,48%

Pada triwulan III tahun 2025, terjadi peningkatan kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana pada triwulan I realisasi kinerja adalah 42,60% meningkat pada triwulan II yaitu 71,67% kemudian pada triwulan III progres pendampingan UMKM telah meningkat hingga 94,05%.

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan

Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Perbandingan capaian kinerja dengan manual IKU yang terbaru secara rinci sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan Manual IKU Lama

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Januari	3,33	0,00	0,00	40,00	40,00
Februari	13,33	0,00	10,00	80,00	45,00
Maret	22,50	12,80	22,50	92,50	42,60
April	50,00	25,00	42,50	92,50	53,33
Mei	65,00	55,00	47,50	92,50	65,00
Juni	71,67	65,00	55,00	95,00	71,67
Juli	76,67	75,00	60,00	95,00	76,67

Realisasi Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan Manual IKU Baru

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
Januari	3.33	0.00	0.00	40.00	1.90	21
Februari	13.33	95.00	10.00	80.00	8.81	21
Maret	22.5	433.20	22.50	92.50	26.10	21
April	50	1086.00	42.50	92.50	58.14	21
Mei	65	1390.00	47.50	92.50	72.86	21
Juni	71.67	1575.00	55.00	95.00	82.14	21
Juli	76.67	1725.00	60.00	95.00	89.52	21
Agustus	81.67	1800.00	65.00	95.00	93.33	21
September	88.33	1805.00	72.50	97.50	94.05	21

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan III dengan triwulan sebelumnya menggunakan manual IKU baru sebagai berikut:

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025 (Manual IKU baru)	22,5%	26,10%	116%
TW II Tahun 2025 (Manual IKU baru)	71,67%	82,14%	114,61%
TW III Tahun 2025 (Manual IKU baru)	88,33%	94,05%	106,48%

Perhitungan realisasi indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan Manual Indikator yang baru, diperoleh bahwa capaian kinerja pada triwulan I, II dan III terus menurun namun seluruhnya mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,94%	94,05%	Tidak dapat diperbandingkan	-

Realisasi kinerja tahap pendampingan untuk indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 94,05% namun

tidak dapat diperbandingkan dengan target tahunan dikarenakan perbedaan formulasi pada realisasi bulanan dan tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, telah dilaksanakan tahapan pendampingan sesuai dengan perencanaan sehingga target indikator tercapai dengan capaian 106,48%.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Regulasi dan prosedur saat ini lebih banyak memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam memperoleh perizinan membuat UMKM bersemangat untuk mengajukan legalitas produk.
2. Telah dilakukan pendampingan terhadap 1 UMKM OBA dalam rangka perbaikan sarana produksi, penyusunan dokumen, dan coaching untuk pengajuan Sertifikasi CPOTB Bertahap sesuai dengan ketentuan. Hingga Triwulan III UMKM sedang berproses dalam pengajuan CPOTB Bertahap di e-sertifikasi.pom.go.id.
3. Telah dilakukan pendampingan terhadap 19 UMK Pangan Olahan mulai dari dilakukannya gap assessment awal pemenuhan persyaratan CPPOB di UMK, identifikasi saran perbaikan untuk UMK, mendesain perbaikan UMK, mendampingi penyusunan dokumen CPPOB, dan coaching e-sertifikasi dalam rangka pengajuan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB). Hingga TW III semua UMK yang didampingi (19 UMK) telah memperoleh IP CPPOB.
4. Telah dilakukan pendampingan terhadap 1 UMKM Kosmetika dengan realisasi tahapan pendampingan hampir seluruhnya telah terlaksana hingga memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB di bulan Maret 2025 (TW I). Faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah karena UMKM Kosmetika telah siap melalui seluruh tahapan pendampingan yang ditetapkan sehingga pelaksanaan pendampingan dapat terealisasi lebih cepat dari perencanaan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- Perlu dipastikan pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan dan *timeline* yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan UMKM
- Monitoring dan evaluasi kinerja pendampingan UMKM

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya pencapaian BBPOM di Bandar Lampung ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

1. Pelaksanaan tugas secara aktif sebagai fasilitator UMK Pangan Olahan, UMKM Obat Bahan Alam dan UMKM Kosmetik
2. Dilaksanakan bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pendampingan UMKM
4. Kegiatan magang Mahasiswa pada Program SAPA (Sadar Pangan Aman) KAMPUS yang bersinergi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Platform Perguruan Tinggi. Pada program ini Mahasiswa melakukan pendampingan secara intensif terhadap UMK Pangan Olahan dalam penerapan CPPOB, membantu UMK dalam penyusunan dokumen CPPOB, dan membantu dalam proses pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) secara *online*.
5. Dilaksanakan Desk Mandiri dalam rangka Registrasi Pangan Olahan (RPO) yang bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan izin edar. Penyelenggaraan Desk Mandiri RPO di bulan Agustus 2025 memotivasi UMK

supaya segera mengajukan IP CPPOB sebagai salah satu syarat pengajuan akun ereg-RBA untuk pengajuan izin edar pangan olahan.

g. Kendala

Tidak ada kendala selama TW III dalam pelaksanaan pendampingan UMKM. Kegiatan pendampingan UMKM telah dilaksanakan sesuai tahapan dan *timeline* yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan UMKM.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,33	94,05	106,48	131.177.198	14.081.638	10,73	9,92	8,92	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah dalam mencapai kinerja sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. Capaian anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan kegiatan baik pada TW I, TW II, maupun TW III berdasarkan ketersediaan anggaran efisiensi sesuai Inpres No. 1 tahun 2025. Sedangkan perhitungan dalam tabel di atas berdasarkan ketersediaan anggaran sebelum ditetapkan instruksi efisiensi anggaran. Tahapan kegiatan pendampingan UMKM yakni KIE/Sosialisasi, seleksi UMKM target pendampingan, Bimtek (CPPOB/CPOTB/CPKB) dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan layanan meeting online seperti *Zoom Meeting* dan video call melalui media komunikasi *WhatsApp*. Pelaksanaan secara daring dilakukan untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi capaian di TW III dimanfaatkan sebagai dasar pemantauan progress terhadap pemenuhan capaian semua tahap (100%) pendampingan terhadap 21 UMKM yang didampingi (terdiri dari 19 UMK Pangan Olahan, 1 UMKM OBA, dan 1 UMKM Kosmetik). Capaian saat ini menunjukkan bahwa realisasi masih *on track* dengan target rata-rata triwulan, sehingga untuk Triwulan berikutnya (TW IV) strategi akan difokuskan pada mempertahankan konsistensi pelaksanaan tahap pendampingan.

Sasaran Kegiatan 05
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di
Bandar Lampung

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	51	61,67	120,92	Tidak Dapat Disimpulkan	●

a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi tahapan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung adalah 61,67% dengan target 51%. Capaian yang diperoleh sebesar 120,92% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-
TW II Tahun 2025	21	18,33	87,29
TW III Tahun 2025	51	61,67	120,92

Pada triwulan II tahun 2025, terjadi peningkatan realisasi kinerja yaitu 18,33% dengan capaian kinerja 87,29%. Namun realisasi kinerja masih belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena laporan informasi hasil operasi intelijen masih

belum memadai sehingga Penyidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan Pro Justitia terhadap hasil operasi penindakan yang telah dilakukan dan adanya P.19 dari Jaksa terhadap perkara yang sedang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung mengakibatkan proses lebih lanjut (P.21) masih memerlukan waktu untuk penyelesaiannya. Pada triwulan III, realisasi kinerja adalah 61,67% dan telah melebihi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	89	61,67	69,29% 	Perlu upaya keras

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung adalah 61,67% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 89% sehingga capaiannya adalah 69,29%. Hal ini menandakan bahwa BBPOM perlu menyusun strategi dan upaya keras untuk dapat mencapai target kinerja tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada TW III tahun 2025 telah dilakukan operasi penindakan terhadap hasil pendalaman informasi yang menjadi target sehingga target output 2 perkara pada triwulan III tahun 2025 terpenuhi. Selain itu pemenuhan P-19 terhadap 2

(dua) perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilakukan secara optimal sehingga hasil penyidikan 2 (dua) perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21). Pada triwulan III tahun 2025 juga telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti perkara pertama yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung, sehingga target kinerja triwulan III tahun 2025 terpenuhi/melebihi.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/meningkatkan kinerja adalah :

1. Intensifikasi profiling siber dan operasi intelijen terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara daring.
2. Koordinasi dengan Jaksa dan Korwas PPNS terkait proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung secara intensif.
3. Melakukan pelatihan berkelanjutan terkait teknik penyidikan, pengumpulan barang bukti elektronik, dan penyusunan berkas perkara.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan ditunjang oleh beberapa hal yaitu :

1. Melakukan perencanaan dan evaluasi operasi intelijen dan operasi penindakan dengan baik
2. Melakukan *profiling* siber dan operasi intelijen terhadap sarana yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan dan menjadi target secara intensif

3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Badan POM terkait pendalaman informasi akun-akun yang diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan secara rutin
4. Monev terhadap proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung secara berkala

g. Kendala

Beberapa informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil *profiling* siber masih memerlukan verifikasi lebih lanjut karena kurangnya data pendukung yang valid. Hal ini menyebabkan proses pendalaman informasi dan penetapan target operasi penindakan memerlukan waktu yang lebih lama.

Pada TW III tahun 2025, koordinasi antara Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Jaksa dan Korwas PPNS terkait proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilakukan dengan baik, sehingga proses penyelesaian berkas perkara sesuai *timeline*.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	51	61,67	120,92	251.971.237	154.644.304	61,37	1,97	0,97	88 % (Efisien)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga pemanfaatan anggaran pada indikator ini adalah efisien. Efisiensi anggaran ini didukung oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran perjadi, belum digunakannya anggaran penangkapan dan penahanan karena 2 (dua) perkara yang ditangani Penyidik

Balai Besar POM di Bandar Lampung, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, dimana tersangka melakukan wajib lapor selama proses penyidikan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja penindakan sediaan farmasi dan pangan olahan memiliki peran yang penting dalam memantau efektifitas, efisiensi dan keberhasilan dari upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung. Laporan kinerja ini tidak hanya berguna untuk evaluasi internal, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan perencanaan yang lebih baik. Dengan laporan ini, substansi penindakan dapat merencanakan kegiatan operasi intelijen dan operasi penindakan yang terukur di masa depan sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sasaran Kegiatan 06
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja
BBPOM di Bandar Lampung

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	50	50	100%	Baik	

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan sesuai

dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan

Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 50% dengan target 50%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	50	50	100%
TW II Tahun 2025	50	50	100%
TW III Tahun 2025	50	50	100%

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja dapat dipertahankan dari realisasi kinerja triwulan I dan II dikarenakan laporan selalu dikirimkan tepat waktu.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56% 	Perlu Upaya Keras

Pada indikator ini, pencapaian kinerja diproyeksikan akan maksimal pada akhir tahun, sejalan dengan target penyelesaian seluruh komponen laporan analisis kerawanan kejahatan. Hingga triwulan ini, laporan analisis patroli siber yang berkontribusi sebesar 50% terhadap indikator ini telah berhasil diselesaikan.

Sementara itu, laporan analisis rekomendasi cegah tangkal yang memiliki porsi 25% masih dalam tahap proses dan baru dimulai pada bulan Juli. Sedangkan laporan analisis kerawanan kejahatan lainnya sebesar 25% juga masih dalam proses penyelesaian. Kedua laporan tersebut direncanakan akan selesai dan disampaikan pada triwulan IV, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Kegiatan patroli dan *profiling* siber di Balai Besar POM di Bandar Lampung dilakukan oleh petugas yang telah dilengkapi dengan surat tugas periode bulanan, sehingga pelaksanaan patroli dan *profiling* siber menjadi lebih terarah dan konsisten. Selain itu dilakukan monev terhadap hasil patroli dan *profiling* siber yang dilakukan pada tanggal 25 tiap bulan, maka pelaporan berjalan efektif dan tidak terjadi keterlambatan. Kegiatan berbagi pengalaman dan pengetahuan di internal bertujuan agar petugas memiliki kemampuan teknis dan analitis yang baik dalam melakukan pelacakan dan identifikasi pelaku kejahatan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan tersebut, BBPOM di Bandar Lampung akan melaksanakan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan patroli dan *profiling* siber dengan penetapan prioritas berdasarkan tingkat risiko dan potensi pelanggaran
2. Meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan berkala dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan tetap sesuai target dan jadwal.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil patroli dan *profiling* siber sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penindakan.
4. Melaksanakan pelatihan teknis berkelanjutan dalam bidang intelijen, patroli dan *profiling* siber.

- Menjadikan kegiatan berbagi pengetahuan sebagai agenda rutin untuk membahas temuan, teknik baru dalam pelacakan atau *profiling* terhadap target.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan patroli dan *profiling* siber secara rutin untuk melakukan pemantauan, pelacakan, dan penelusuran aktivitas ilegal di media daring dan *marketplace*.
- Penggunaan metode penelusuran berbasis risiko sehingga fokus pemantauan diarahkan pada *platform* dengan potensi pelanggaran tinggi.
- Penyusunan laporan hasil patroli dan *profiling* siber sesuai *timeline*.
- Kegiatan berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman antar petugas dalam pengumpulan serta pengolahan data hasil patroli dan *profiling* siber.

g. Kendala

- Belum semua petugas memiliki kemampuan teknis yang sama dalam melakukan *profiling*, atau penilaian risiko terhadap akun-akun di *marketplace*.
- Ketergantungan pada beberapa personil yang berpengalaman menimbulkan risiko penurunan kinerja apabila terjadi rotasi dan mutasi.
- Kegiatan berbagi pengalaman sering dilakukan tanpa dukungan biaya pelatihan formal, sehingga proses peningkatan kapasitas cenderung bersifat informal dan bergantung pada inisiatif individu.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	85.864.764	8.085.000	9,42	10,62	9,62	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga pemanfaatan anggaran tidak efisien. Program efisiensi penggunaan anggaran dari pemerintah berdampak pada realisasi anggaran pada substansi penindakan mengalami penurunan hal ini akibat dari adanya revisi anggaran dari perubahan regulasi terkait mekanisme pelaksanaan program yang telah dibuat. Revisi anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap rencana kerja dan penjadwalan ulang kegiatan. Hal ini berdampak langsung pada beberapa program kegiatan seperti pelatihan, pertemuan, koordinasi yang awalnya direncanakan secara luring akhirnya dilakukan secara daring hal ini mengakibatkan tidak terserapnya anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, rendahnya capaian realisasi anggaran pada Substansi Penindakan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yaitu sampai dengan bulan September kondisi anggaran masih diblokir sebesar 92% sehingga capaian anggaran rendah jika dibandingkan dengan anggaran sebelum dilakukan efisiensi. Efisiensi terhadap anggaran ini berdampak langsung pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan, sehingga sejumlah kegiatan yang semula direncanakan secara luring menjadi daring.

Perubahan bentuk pelaksanaan kegiatan ini menyebabkan biaya operasional, perjalanan dinas, dan akomodasi tidak terserap secara optimal. Meskipun secara administratif pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai output, namun secara finansial realisasi anggaran menjadi tampak rendah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan serapan anggaran, di mana capaian kinerja tercapai tetapi capaian realisasi anggaran rendah.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan instrumen penting yang mendokumentasikan capaian, tantangan, serta data operasional di Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dalam analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, memiliki nilai strategis sebagai dasar pengambilan keputusan dan

perencanaan, sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan pelanggaran, seperti jenis produk yang paling sering disalahgunakan, serta memetakan wilayah yang berpotensi tinggi terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Menyusun peta risiko dan mitigasi risiko yang tepat, sehingga prioritas pengawasan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sasaran Kegiatan 07 Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang Prima

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-	-

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.
- d. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03
- e. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada triwulan III tahun 2025, belum terdapat target pada indikator indeks pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I-III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,75	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di BBPOM Bandar Lampung menunjukkan pencapaian positif dengan predikat “Pelayanan Prima” dan berbagai program meraih Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), keterbukaan informasi publik melalui PPID, serta berbagai inovasi seperti “QRIS PUSAKA”, GALAKSI, LIVE BAGI BAGI KOMISI dan layanan “Call Me Back Ulun Lampung” yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang memengaruhi kinerja IPP, seperti belum meratanya distribusi informasi standar pelayanan, dan perlunya sosialisasi peningkatan aplikasi layanan yang digunakan evaluasi kinerja yang lebih transparan dan terukur. Selain itu, Untuk mengatasi tantangan tersebut, BBPOM perlu meningkatkan sosialisasi informasi layanan, dan meningkatkan kompetensi SDM pelayanan. Keterlibatan masyarakat, khususnya UMKM dan kelompok rentan, juga perlu diperluas melalui konsultasi publik yang lebih inklusif. Upaya mempertahankan zona integritas dan memperkuat budaya pelayanan bersih dan cepat menjadi kunci perbaikan berkelanjutan ke depan. Dengan langkah-langkah tersebut, kinerja pelayanan publik BBPOM dapat terus meningkat secara berkesinambungan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah: Mempertahankan aspek pemenuhan IPP.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja Upaya pencapaian Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung ditunjang oleh pencapaian kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan SKM Mandiri BBPOM di Bandar Lampung beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM dan dipublikasikan setiap bulannya.
2. Pemutakhiran media layanan/informasi secara berkala di subsite/media sosial BBPOM di Bandar Lampung setiap harinya baik berupa publikasi/edukasi Obat dan Makanan.
3. Melakukan pengelolaan konsultasi dan pengaduan BBPOM di Bandar Lampung dengan melakukan monitoring dan evaluasi konsultasi dan Pengaduan
4. Pelaksanaan implementasi inovasi Call Me Back Ulun Lampung, Galaksi, PIOM Pintas, QRIS-PUSAKA, Cawa Cawa Bareng BPOM dan Live Bagi Bagi KOMISI.
5. Pelaksanaan evaluasi kualitas pelayanan publik melalui evortala.pom.go.id
6. Revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
7. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana agar meminimalisir anggaran perbaikan
8. Melaksanakan publikasi dan sosialisasi standar pelayanan yang baru ke masyarakat melalui berbagai media

g. Kendala

1. Belum terupdatenya secara keseluruhan Layanan Informasi melalui PPID.

2. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Berdasarkan perhitungan tersebut.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	51.897.999	16.639.620	32,06	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum ada target kinerja pada triwulan III tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk audit dalam rangka ski/ske/labelisasi/registrasi/cdob/koordinasi lintas sektor dan sosialisasi program pengawasan melalui media cetak dan elektronik.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks pelayanan public BBPOM Bandar Lampung yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai:

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui proses usulan revisi atas target indikator kinerja indeks pelayanan publik tahun 2025
2. Menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pelayanan public serta pengawasan obat dan makanan. Pemerintah mengamanatkan penyelenggara pelayanan public wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2025 dengan melibatkan 5 unsur (pentahelix) yaitu pemerintah, pelaku usaha (pelanggan/responden), media, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat untuk mendapatkan saran maupun masukan terkait pelayanan public yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung kedepannya serta dalam pelaksanaan maupun pelaporan FKP sesuai juknis yang diberikan oleh

Badan POM. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Balai Besar POM di Bandar Lampung juga telah menyelenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan sebagai sarana peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan informasi publik yang dapat diakses secara luas.

3. Penyesuaian terhadap hasil kinerja tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.
4. Pelayanan terhadap masyarakat melalui keberadaan BBPOM di Bandar Lampung di Mall Pelayanan Publik Di Lampung Tengah, Kota Metro, Kota Bandar Lampung dan Lampung selatan (baru) untuk tahun 2025

Sasaran Kegiatan 08
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	-	-	-	-	-

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja

diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
 - Baseline Data sebagai Dasar Perhitungan
 - Nilai ZI tahun 2022: 87,38 (sebagai baseline awal).
 - Pencapaian tahun 2023: 90,37 (melampaui target).
 - Tahun 2024 mengalami penurunan, sehingga perlu perbaikan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai.
 - Target Realistis dan Bertahap
 - Target 90,20 pada 2025 ditetapkan berdasarkan tren pencapaian sebelumnya dan mempertimbangkan adanya penurunan di 2024.
 - Kenaikan 0,2 per tahun adalah angka yang terukur dan dapat dicapai dengan perbaikan berkelanjutan tanpa membebani sumber daya yang tersedia.
 - Persyaratan Menuju Predikat WBBM
 - BBPOM Bandar Lampung telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 - Untuk menjadi calon penerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), nilai minimal yang harus diperoleh adalah 90,00.

- Target 90,20 pada 2025 memastikan BBPOM Bandar Lampung tetap berada dalam jalur pencapaian WBBM.

Pada triwulan III tahun 2025, belum terdapat target pada indikator Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I-III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI BBPOM Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung	90	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilaksanakan desk dengan Inspektorat terkait kegiatan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) serta pemenuhan data dukung sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Proses ini

merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Bandar Lampung sebesar 89,35 dengan rincian sebagai berikut :

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,19	4,00	7,19	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	2,75	2,50	5,25	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,35	4,25	8,60	MS
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	3,91	8,91	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	6,53	7,50	14,03	MS

			Pemenuhan	Reform	Nilai	MS/TMS)
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,85	4,86	9,71	MS
TOTAL PENGUNGKIT					53,69	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
	I. 1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,89	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	TMS
	II. Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,28	MS
TOTAL HASIL					35,67	
NILAI PMPZI					89,35	

Berdasarkan hasil tersebut realisasi masih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,00.

Adapun hasil ringkasan evaluasi PMPZI dari Inspektorat sebagai berikut :

1. Penentuan anggota tim pembangunan ZI belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pada dokumen monitoring dan evaluasi rencana kerja belum terdapat perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI.
3. Nilai implementasi BerAKHLAK (BerAKHLAK implementation index) Balai Besar POM di Bandar Lampung di bawah rata-rata BPOM.
4. Monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital belum dilaksanakan untuk seluruh teknologi informasi yang digunakan baik untuk pelayanan internal maupun layanan publik.
5. Belum terdapat bukti bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatikan kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai).
6. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
7. Pemberian *reward* berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal oleh Kepala Unit Kerja.
8. Capaian kinerja telah dijadikan salah satu unsur dalam pemberian *reward and punishment*.
9. Terdapat inovasi terkait penguatan pengawasan, namun belum terdapat laporan implementasi inovasi tersebut.
10. Monitoring pengaduan telah dilakukan secara berkala, namun belum terdapat analisis atas hasil monitoring pengaduan yang nihil.
11. Belum seluruhnya rekomendasi laporan SKM ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.
12. Laporan inovasi pelayanan publik belum menjelaskan latar belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap.
13. Sebagian besar capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,72 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,86 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 3,75) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka upaya perbaikan diperlukan komitmen dari seluruh Pokja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Seluruh pokja telah diminta membuat *back up data* dukung LKE yang telah dikirim kepada Tim Penilai Internal dan mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI TW 3 sd TW 4 tahun 2025 secara akurat untuk mempermudah pengisian LKE di tahun 2026. *Back up data* di dokumentasikan dalam Aplikasiku. Selain itu, pada LKE tahun 2025 juga telah dilakukan perbaikan terhadap hasil penilaian (rekomendasi TPI) tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian PMPZI oleh Inspektorat, BBPOM di Bandar Lampung belum dapat mengajukan WBBM pada tahun 2025. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam memperoleh capaian kinerja dan perbaikan LKE, sehingga dapat mempersiapkan dalam meraih WBBM. Upaya perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa penentuan anggota tim belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan lengkap meliputi perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI, kendala, dan tindak lanjut apabila terdapat rencana kerja yang tidak terealisasi.
3. Meningkatkan upaya internalisasi nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital secara berkala terhadap seluruh teknologi informasi yang digunakan sehingga dapat diketahui dampak transformasi digital tersebut.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatikan kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai).
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi agar dikaitkan dengan perbaikan kinerja belum dilakukan.
7. Menetapkan pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja.
8. Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai unsur dalam pemberian reward and punishment.
9. Melengkapi laporan implementasi inovasi terkait area perubahan penguatan pengawasan.
10. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil.
11. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi laporan SKM sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.
12. Melengkapi laporan inovasi pelayanan publik yang memuat belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap.
13. Melakukan penguatan tata kelola kinerja, perbaikan layanan dan mendorong inovasi sehingga capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
14. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai nilai pembangunan Zona Integritas pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan penguatan pada aspek monitoring dan evaluasi (monev) terhadap rencana kerja yang telah disusun. Hal ini sejalan dengan rekomendasi TPI pada hasil penilaian pembangunan ZI tahun 2025. Monev yang berkala dan terstruktur akan membantu memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal, indikator capaian dapat terpenuhi, serta potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditangani secara dini. Selain itu, diperlukan pemantauan target prioritas pembangunan Zona Integritas dan memastikan rencana aksi yang disusun untuk masing-masing target terlaksana dan terdokumentasi dengan baik oleh masing-masing pokja. Dengan penguatan pada kedua aspek tersebut, diharapkan pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

g. Kendala

1. Nilai total LKE kurang dari 90 dan Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 3,75) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB sehingga tidak dapat diusulkan untuk WBBM.
2. Beberapa anggota tim ZI masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal penyusunan rencana kerja, pengisian LKE, audit internal dan pemenuhan data dukung sesuai kriteria penilaian. Hal ini berpengaruh pada kualitas dokumen yang dihasilkan serta kecepatan respons terhadap review dari auditor internal maupun TPI.
3. Waktu untuk fokus pada pembangunan ZI menjadi terbatas. Ini mempengaruhi kelancaran penyusunan dokumen, tindak lanjut monev, dan penyusunan tindak korektif atas temuan.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum terdapat target dan realisasi kinerja pada triwulan III tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat diperhitungkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja supaya efisien antara lain :

1. Meskipun tidak tersedia SDM khusus, efisiensi bisa ditingkatkan dengan pembagian tugas yang jelas dan proporsional dalam tim ZI. Pada masing-masing pokja telah disusun sasaran kerja pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya pada pengisian LKE ZI dan pemantauan rencana kerja.
2. Sinergi kegiatan ZI dengan kegiatan rutin sehingga mempermudah memperoleh data dukung seperti : sinergi kegiatan QMS dan SPIP dengan pokja tata laksana, sinergi kegiatan tata usaha dengan pokja akuntabilitas dan SDM, sinergi kegiatan pelayanan publik (infokom dan sertifikasi) dengan pokja pelayanan publik, sinergi kegiatan manajemen risiko dan SMAP dengan pokja pengawasan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Laporan ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan rencana kerja dan pemenuhan indikator ZI telah berjalan sesuai yang diharapkan.

Dari hasil evaluasi laporan kinerja TW III dan penilaian oleh Inspektorat, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan ditingkatkan. Informasi ini sangat krusial untuk menyusun rencana aksi cepat (*quick wins*) dalam rangka persiapan menuju WBBM di masa yang akan datang.

2. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-	-

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.
- Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;

- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada triwulan III tahun 2025, belum terdapat target pada indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I-III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,9	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

- Pada tahun 2025 ini Badan POM melalui Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan Bimbingan Teknis Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dengan melibatkan tim penyusun Renstra dari masing-masing substansi BBPOM di Bandar Lampung dan Ketua Tim. Pada TW 3 juga dilaksanakan Sosialisasi RHPK UPT Sesuai Finalisasi Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
- Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan panduan bagi pimpinan UPT dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu, Renstra disusun untuk menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja UPT dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.
- Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disahkan. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja.
- Pada TW III ini dilaksanakan revisi PK dan RAPK dengan penambahan 3 IKU yaitu
 1. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT

- 
- 2. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standart
 - 3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman
 - Implementasi SOP Mikro tentang pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja
 - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja (IKU) dilaksanakan setiap bulan secara rutin dengan keterlibatan pimpinan UPT dalam setiap monev tersebut.
 - Pelaporan kinerja dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu.
 - Pada TW III ini telah dilaksanakan Desk SAKIP, adanya saran serta perbaikan akan dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah:

- Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan
- Melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
- Melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 dengan melibatkan substansi.
- Melaksanakan desk SAKIP tahun 2025 dengan Inspektorat dan menindaklanjuti perbaikan hasil desk tersebut
- Melaksanakan SOP mikro *Reward dan punishment* kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan *punishment* kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran.
- Melaksanakan SOP mikro *Reward dan punishment* pegawai secara individu sesuai dengan pedoman

- Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP. Pada TW 3 ini seluruh tim pengelola akuntabilitas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait SAKIP
- Pengembangan inovasi SIPADUPINTER sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja
- Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai *timeline*.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada TW 3 sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. BBPOM di Bandar Lampung akan melakukan perbaikan atas saran/rekomendasi pada desk SAKIP

Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024 pada TW selanjutnya berupa :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun matriks reviu target untuk seluruh indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi penetapan target;
- b. Menyusun SK Penetapan IKU yang memuat seluruh indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pelaksanaan SOP Mikro yaitu Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dengan :
 - Penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja;

- Menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data.
- b. Mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja pada Notulen rapat evaluasi internal;
- c. Menetapkan mekanisme pemberian *reward dan punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;
- d. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan
 - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;
 - Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;
 - Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi;
- b. Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;
- c. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pada TW sebelumnya telah dilakukan pengisian LKE SAKIP dan menyiapkan data dukung untuk penilaian SAKIP
- b. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
 - Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya;
 - Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target;

- Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai).

c. Melaksanakan pengembangan kompetensi personil Tim SAKIP terkait implementasi SAKIP;

g. Kendala

- Penentuan kertas kerja penetapan target yang belum memenuhi semua aspek SMART-C
- Belum semua pegawai BBPOM di Bandar Lampung memahami SAKIP
- Perbedaan persepsi antara Inspektorat dan Biro Perencanaan dan keuangan terkait dengan penyusunan Lapkin

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum terdapat target dan realisasi kinerja pada triwulan III tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat diperhitungkan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja supaya lebih efisien antara lain :

1. Pembagian tugas yang jelas dan proporsional atas penanggungjawab IKU
2. Peningkatan pemahaman Ketua Tim dan anggota tim adanya penambahan 3 IKU baru
3. Menyelenggarakan Sosialisasi terkait revisi IKU adanya penambahan 3 IKU

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, nilai hasil evaluasi AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah 80,58 dengan tingkat akuntabilitas kinerja A dengan target pada tahun 2024 sebesar 79,12. Untuk mengawal agar pada tahun ini nilai meningkat dilakukan tindak lanjut rekomendasi SAKIP tahun 2024 dan terus mengawal pengembangan inovasi yang ada untuk memudahkan dalam pengelolaan pelaporan. Pada tahun 2024 hasil penilaian AKIP melebihi target yang ditetapkan. BBPOM di Bandar Lampung akan terus mengawal dan meningkatkan dalam pencapaian AKIP di tahun mendatang.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-	-

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)

7. Capaian Output (bobot 25%)

8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Pada triwulan III tahun 2025, belum terdapat target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I-III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penilaian IKPA pada TW 3, berdasarkan penilaian 8 parameter IKPA, terdapat nilai yang kurang dari 100 yaitu nilai halaman III DIPA, sedangkan 6 parameter lainnya mendapatkan nilai 100 pada penyerapan anggaran, Revisi anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP dan Capaian Output. Satu parameter yaitu Dispensasi SPM akan dinilai di akhir tahun anggaran.

Tidak tercapainya penilaian IKPA terkait parameter RPD disebabkan ketidaksesuaian dalam penginputan Belanja pegawai dan belanja modal yang berakibat besarnya deviasi (Melebihi 5 %).

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah:

- Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas.
- Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya.
- Pemantauan parameter penilaian IKPA TW 3 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi plus pada belanja pegawai dan deviasi minus pada belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 4 awal bulan Oktober dilakukan pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada TW 4.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan monev setiap bulan terhadap parameter Indikator Kinerja Pengelola Anggaran yaitu :

1. Kualitas perencanaan

- Pengawasan revisi anggaran. Berdasarkan penilaian IKPA nilai revisi anggaran sebesar 100
- Pengawasan Rencana Penarikan Dana setiap bulan maupun triwulan. Berdasarkan penilaian IKPA TW 3 Capaian nilai halaman III/RPD sebesar 77,98 lebih kecil dibandingkan dengan capaian pada TW 2. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian dalam penginputan RPD pada aplikasi SAKTI

2. Kualitas Pelaksanaan anggaran

- Melakukan pengawasan realisasi anggaran. Hasil penilaian IKPA penyerapan anggaran sebesar 100 sesuai target karena adanya relaksasi
- Pemantauan terhadap belanja kontraktual. Hasil penilaian IKPA belanja kontraktual sebesar 100 sesuai target
- Pemantauan terhadap penyelesaian tagihan. Hasil penilaian IKPA penyelesaian tagihan adalah 100 %

- Pemantauan terhadap pengelolaan UP dan TUP. Hasil penilaian IKPA Pengelolaan UP dan TUP sebesar 100 %
3. Kualitas Hasil pelaksanaan Anggaran
- Pemantauan Capaian Output. Hasil penilaian IKPA Capaian Output sebesar 100 %

g. Kendala

- Adanya efisiensi anggaran akan mengubah perencanaan kegiatan
- Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran baik operasional perkantoran maupun kegiatan di substansi
- Capaian RPD tidak sesuai dengan target karena ketidaksesuaian penginputan di SAKTI pada saat pemutakhiran di TW 3 ini

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum tersapat ada target kinerja pada triwulan III tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat diperhitungkan. Adapun upaya untuk mencapai efisiensi di TW 4 adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat pada seluruh parameter penilaian IKPA terutama untuk parameter RPD.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 bahwa target tahun 2024 sebesar 89,11 dan capaian 92,49 tercapai dengan kategori Sangat Baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai kinerja anggaran dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan dan monitoring parameter yang mempengaruhi

penilaian IKPA dan Nilai Kinerja Perencanaan. Pada tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran melebihi target.

Nilai IKPA dapat diketahui setiap bulan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya untuk mencapai target di TW 4 tahun 2025.

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW III Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>

<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total/6

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada triwulan III tahun 2025, belum terdapat target pada indikator indeks manajemen risiko BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW III dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I-III Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung	2,9	-	-	-

Pada triwulan III tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada tahun 2024 nilai Indeks manajemen Risiko yang diperoleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 2,844 dengan tingkat maturitas Risk Aware. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 2,9. Upaya pencapaian Indeks manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung Triwulan II tahun 2025 dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Melakukan rivi u dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian inspektorat pada desk tahun 2024.

Dari hasil penilaian inspektorat ada beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen risiko yang ada di BBPOM bandar Lampung, diantaranya:

- Perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko belum dilakukan secara berkesinambungan;
- Identifikasi risiko belum dilakukan secara komprehensif dikarenakan masih terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai target;
- Penilaian setiap risiko belum disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai;
- Pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya secara aktif telah melibatkan auditor internal sebagai lini kedua;

- e. Proses revidir risiko belum sepenuhnya memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit;
- f. Program/proyek baru belum seluruhnya telah dikelola ke dalam manajemen risiko.

2. Melakukan penyusunan identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang ada di BBPOM Bandar Lampung dilakukan dan diperbaharui minimal 2 x dalam setahun dan dilaporkan kepada inspektorat utama melalui SAPA APIP pada bulan Januari dan Juli. Pada TW III mulai disusun lagi identifikasi risiko yang akan dilaporkan pada bulan Juli maksimal tanggal 20. Penambahan identifikasi risiko ini mengakomodir risiko-risiko yang belum teridentifikasi pada semester 1 dan juga mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul dengan adanya IKU-IKU baru di tahun 2025 IKU yang belum ada identifikasi risikonya. Identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing pemilik risiko di substansi dengan melakukan riviur terhadap daftar risiko yang sudah ada apakah masih sesuai atau sudah tidak relevan.

Selain itu risiko bisa muncul dari adanya isu internal dan eksternal, hasil temuan audit ataupun pencapaian IKU tahun sebelumnya. Dari risiko yang sudah diidentifikasi selanjutnya dibahas dalam rapat anggota tim manajemen risiko dan juga ketua tim penanggung jawab IKU serta Kepala BBPOM di Bandar Lampung.

3. Sosialisasi manajemen risiko kepada pegawai baru

Pada bulan Juni terdapat 3 pegawai baru (CPNS) dan sudah disosialisasikan terkait manajemen risiko dan juga pelatihan manajemen risiko melalui platform IDEAS.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian Indeks Manajemen Risiko sekaligus untuk menjawab kelemahan penerapan manajemen risiko dari hasil penilaian inspektorat adalah sebagai berikut:

- 
- i. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan;
 - ii. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan tercapai;
 - iii. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai;
 - iv. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; pada pelaporan risiko melalui SAPA APIP untuk semester 2 sudah diakomodir peran auditor internal melalui form pemantauan manajemen risiko yang harus diisi oleh auditor internal
 - v. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko;
 - vi. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko.
 - vii. Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini dan memastikan data dukung nya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang pencapaian Indeks Manajemen Risiko di tahun 2025 antara lain:

1. Perencanaan pelatihan secara berkesinambungan sudah disusun untuk rentang waktu 2023-2026 untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai terkait manajemen risiko. Di tahun 2025 pelatihan yang diselenggarakan adalah Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko dengan narasumber dari Inspektorat II dan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025 secara daring dan diikuti oleh seluruh pegawai BBPOM di Bandar Lampung.

2. Sudah ditetapkan kriteria yang lebih detail terkait dampak dan frekuensi risiko dalam bentuk Surat keputusan Kepala BBPOM di Bandar Lampung NOMOR : HK.02.02.6A.01.25.45 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Risiko di Lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung dan telah disosialisasikan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan level risiko. Dengan begitu penetapan level risiko lebih seragam untuk semua substansi, tidak lagi berdasarkan persepsi masing-masing substansi.
3. Penetapan level risiko dilakukan menggunakan kertas kerja dengan acuan kriteria yang sudah ditetapkan.
4. Penyusunan identifikasi risiko dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua IKU yang diampu, isu internal-eksternal, hasil audit, dan juga capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
5. Pendokumentasian seluruh dokumen dan data dukung manajemen risiko dalam subsite yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung sehingga lebih mudah ketika mencari dokumen-dokumen terkait pada saat dibutuhkan. Sebelumnya data dukung aktivitas pengendalian dari masing-masing substansi disimpan di substansi masing-masing sehingga aksesibilitasnya terbatas.
6. Secara aktif melibatkan tim auditor internal untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko. Pelaporan risiko melalui SAPA APIP untuk semester 2 sudah diakomodir peran auditor internal melalui form pemantauan manajemen risiko yang harus diisi oleh auditor internal
7. Program / proyek baru sudah dilakukan identifikasi risiko diantaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah melaksanakan program MBG bagi siswa sekolah mulai dari TK-SMA, lansia dan ibu hamil dimana dalam program tersebut melibatkan kinerja BBPOM di Bandar Lampung sebagai instansi yang melakukan pengujian terhadap sampel MBG yang disalurkan dan juga melakukan edukasi keamanan pangan terhadap personel yang terlibat dalam program tersebut. Selain itu juga 3 IKU baru yang ditetapkan di TW III juga sudah dilakukan identifikasi risikonya.

g. Kendala

Pemahaman pegawai dalam menyusun identifikasi risiko masih belum seragam sehingga perlu terus dilakukan pengembangan kompetensi baik melalui bimbingan teknis atau internalisasi dan sharing dari pegawai yang sudah mengikuti pelatihan atau dari tim manajemen risiko melalui media apel pagi yang diselenggarakan setiap pagi di BBPOM Bandar Lampung

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum terdapat target dan realisasi kinerja pada triwulan III tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat diperhitungkan. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pembinaan pegawai oleh Badan POM, koordinasi/advokasi lintas sektor dan layanan dukungan manajemen.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks manajemen risiko BBPOM Bandar Lampung yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai:

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui usulan revisi atas target indikator kinerja indeks manajemen risiko pada tahun selanjutnya.
2. Menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan/ peningkatan program implementasi manajemen risiko BBPOM di Bandar Lampung. Perbaikan dalam implementasi manajemen risiko dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan nilai maturitas manajemen risiko sehingga nanti akan dicapai nilai maturitas 5 dengan kategori *risk enable*.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
1.	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada Triwulan 1 tahun 2025 telah dilakukan sampling sebanyak 80 sampel sediaan farmasi dari target tahunan sebanyak 1085 sampel (11,4%) yang meliputi obat 12 sampel, obat bahan alam 24 sampel, suplemen kesehatan 1 sampel dan kosmetik 43 sampel. Dari 12 sampel obat, terdapat 7 sampel yang pelaporan penandaannya melalui SIPT melebihi SLA (5 hari kerja). Sampai akhir TW I, ada 4 surat dari 10 surat edaran obat bahan alam yang sudah ditindaklanjuti sehingga masih ada 6	- Terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Lampung - Memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi yang Baik agar produk sediaan farmasi yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai. Selain itu juga mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi.			- sampling - Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi - Monitoring tindak lanjut surat pusat	Desember 2025	tercapainya target IKU Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			surat edaran lagi yang akan ditindak lanjuti di TW 2. Untuk komoditi kosmetik sudah berhasil menindaklanjuti 17 surat edaran dari 21 surat edaran kosmetik dan ada 4 surat lagi yang membutuhkan tindak lanjut. Dari 80 sampel sediaan farmasi yang di sampling pada TW I seluruhnya sudah dilakukan evaluasi penandaan dan terdapat 1 sampel TIE yaitu sampel sediaan kosmetik sehingga tidak dilanjutkan uji di laboratorium, selebihnya terhadap seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah dilakukan pengujian sesuai dengan							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			parameter uji kritis, dan dilaporkan tepat waktu melalui SIPT sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari 12 sampel obat semua memenuhi syarat (MS), begitu juga untuk sampel suplemen kesehatan hasilnya MS terhadap 1 sampel yang diuji. Sampel kosmetik dari 42 sampel yang diuji terdapat 2 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk parameter uji Angka lempeng Total (ALT) pada sampel make up kit dan lulur, sedangkan untuk sampel Obat Bahan Alam dari 24 sampel yang diuji terdapat 9 sampel TMS dengan rincian 3 sampel TMS							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			ALT, 3 sampel TMS Enterobacteriaceae, 2 sampel TMS Angka Kapang Khamir (AKK) dan 1 sampel TMS Kadar Air. Dari 9 sampel yang TMS tersebut ada 3 sampel yang memiliki riwayat TMS pada hasil pengawasan di tahun sebelumnya. Seluruh sampel TMS tidak diproduksi di wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Dalam tahap pelaksanaan tindak lanjut atas sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, BBPOM di Bandar Lampung telah melaporkan hasil pengujian sampel melalui SIPT.							
		Juni	- Terdapat 22 sampel bulan Mei yang baru selesai di bulan Juni dan melewati timeline 15 HK	- dilakukan monitoring bulan berikutnya - melakukan pengaturan waktu masuk sample ke	30 Juli 2025		Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling	30 Juli 2025	Masih dalam proses tindak lanjut terhadap rencana aksi (akan dilakukan evaluasi	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			- Terdapat 18 sampel obat yang belum selesai uji (7 sampel diuji di BPOM Jambi, 2 sampel diuji di BBPOM Palembang, 8 sampel diuji di BBPOM Pekanbaru dan 1 sampel vaksin diuji di Balai Pengujian produk Biologi)	laboratorium pada bulan juli sehingga tidak terjadi penumpukan sampel - sampel komoditi pangan dan obat masuk ke lab pada minggu I sedangkan sampel OBASKK dan Kosmetik masuk ke lab pada minggu ke 3, diharapkan dengan pembagian jadwal masuk ke lab ini timeline pengujian untuk semua komoditi tidak jatuh pada saat yang bersamaan - melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline			dan pengujian menjadi 2 tahap		terhadap mekanisme yang baru apakah dapat mengatasi penumpukan sampel di lab mikrobiologi)	
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Pada komoditi obat dari 95 sampel yang sudah di di sampling dan diperiksa terdapat 18 sampel yang	1. Melakukan pengaturan waktu masuk sample ke laboratorium pada bulan juli dan						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			belum selesai uji yaitu (7 sampel diuji di BPOM Jambi, 2 sampel diuji di BBPOM Palembang, 8 sampel diuji di BBPOM Pekanbaru dan 1 sampel vaksin diuji di Balai Pengujian produk Biologi). Terhadap sampel tersebut sudah dikoordinasikan agar mempercepat penyelesaian pengujiannya. Dari 531 sampel yang sudah dilakukan pengujian terdapat 20 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari 4 sampel kosmetik dan 16 sampel obat bahan alam. Sampel kosmetik yang TMS semuanya terkait parameter uji mikrobiologi yaitu 3 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT)	seterusnya sehingga tidak terjadi penumpukan sampel di lab mikrobiologi, sampel komoditi pangan dan obat masuk ke laboratorium pada minggu I sedangkan sampel OBASKK dan Kosmetik masuk ke laboratorium pada minggu ke III, diharapkan dengan pembagian jadwal masuk ke lab ini timeline pengujian untuk semua komoditi tidak jatuh pada saat yang bersamaan sehingga timeline pengujian dapat terpenuhi. 2. Melakukan koordinasi dengan anggota region Pekanbaru untuk menyelesaikan pengujian sampel terutama sampel obat sesuai timeline						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dan 1 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang Kamir (AKK), Sedangkan untuk obat bahan alam sampel TMS terdiri dari 1 sampel TMS Kadar Air, 7 sampel TMS ALT, 4 sampel TMS Angka Enterobacteriaceae, 2 sampel TMS AKK, 1 sampel TMS ALT dan AKK serta 1 sampel TMS ALT dan Angka Enterobacteriaceae. Seluruh sampel TMS tidak diproduksi di wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Dalam tahap pelaksanaan tindak lanjut atas sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, BBPOM di Bandar Lampung telah melaporkan hasil pengujian sampel melalui SIPT.	pengujian. 3.Mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi dan juga melakukan monitoring terhadap Surat Edaran yang masuk pada bulan selanjutnya untuk memastikan semua SE sudah ditindaklanjuti.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Juli	- Terdapat 6 sampel bulan Juni yang melewati timeline 15 HK dikarenakan antrian di lab mikrobiologi dan juga ada uji konfirmasi terhadap hasil TMS di lab mikrobiologi	- hasil evaluasi terhadap pengaturan masuknya sampel OBASKK-Kosmetik menjadi minggu ke 3 (tidak berbarengan dengan masuknya sampel semua komoditi) dapat mengurai antrian sampel di lab mikrobiologi sehingga timeline pengujian untuk sampel OBASKK-Kosmetik pada bulan Juli dapat tercapai. Dengan begitu pengaturan masuknya sampel ke laboratorium akan terus dilanjutkan untuk bulan agustus dan seterusnya			Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	31 Agustus 2025	Timeline pengujian sampel OBASKK-Kosmetik dapat tercapai	Progres
		Agustus	Sampel sediaan farmasi yang sudah selesai diuji di BBPOM Lampung semua memenuhi PUK dan Timeline, ada sampel yang belum selesai uji	- melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline			Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling	31 september 2025	Sampel sediaan farmasi yang disampling dan diuji terpenuhi sesuai standar (PUK dan Timeline)	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			tetapi belum jatuh timeline nya				dan pengujian menjadi 2 tahap			
		September	Ada 2 sampel Obat bahan alam yang melewati timeline uji dikarenakan menunggu hasil uji konfirmasi dari balai regional Pekanbaru	- melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline			Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap mempercepat pengirimn sampel yang harus dilakukan uji konfirmasi ke balai lain	31 October 2025	Sampel sediaan farmasi yang disampling dan diuji terpenuhi sesuai standar (PUK dan Timeline)	Progres
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTDESO	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada tanggal 25 Februari 2025 telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans yang mencakup 45 sarana pelayanan kesehatan (fasyankes) di Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan	Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time. Penyusunan						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			pemahaman dan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali serta melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) kepada Badan POM. Pasca pelaksanaan KIE, hingga Triwulan I (TW I) tahun 2025 tercatat sebanyak 4 sarana telah menyampaikan laporan KTD/ESO. Meskipun target pelaporan bersifat tahunan, yaitu sebesar 26% dari jumlah sarana yang diberikan KIE (setara dengan sekitar 12 sarana), kami tetap melakukan pemantauan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan progres berjalan sesuai arah yang diharapkan. Jika	Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk turut aktif melaporkan.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dirata-rata, maka diperlukan setidaknya 4 laporan dari sarana pelayanan kesehatan setiap triwulan untuk memenuhi target tahunan tersebut. Namun, penting untuk dipahami bahwa laporan KTD/ESO bersifat insiden—dengan kata lain, tidak selalu dapat diprediksi jumlah atau waktu kejadiannya. Oleh karena itu, sebagai upaya antisipatif, kami terus melakukan engagement aktif dengan seluruh sarana yang telah mengikuti KIE. Fokus utama dalam engagement ini adalah memberikan pemahaman lebih lanjut terkait jenis laporan yang wajib disampaikan serta cara mengidentifikasi KTD/ESO dengan							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			tepat. Secara keseluruhan, capaian pelaporan hingga TW I masih sejalan dan realistis terhadap target tahunan yang telah ditetapkan. Upaya edukasi dan pendampingan akan terus kami intensifkan agar pelaporan KTD/ESO dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas, demi mendukung sistem farmakovigilans yang lebih efektif di Provinsi Lampung.							
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Secara keseluruhan, capaian pelaporan hingga TW II masih sejalan dan realistis terhadap target tahunan yang telah ditetapkan. Upaya edukasi dan pendampingan akan terus kami intensifkan agar pelaporan	Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			KTD/ESO dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas, demi mendukung sistem farmakovigilans yang lebih efektif di Provinsi Lampung.	secara real-time. Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk turut aktif melaporkan.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Juli	9 laporan	reminder kepada fasyankes agar lebih teliti memantau ktd eso	N/A	reminder kepada fasyankes untuk lenih teliti memantau ktd eso			10 laporan	Close
		Agustus	10 laporan	reminder kepada fasyankes agar lebih teliti memantau ktd eso	N/A	reminder kepada fasyankes untuk lenih teliti memantau ktd eso			12 laporan	Close
		September	12 laporan	Melakukan pemantauan pelaporan KTS ESO melalui aplikasi E-Meso	N/A	Melakukan pemantauan pelaporan KTS ESO melalui aplikasi E-Meso			12 laporan	Close
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	Sebanyak 115 sampel yang disampling telah selesai uji balai sendiri sebanyak 114 sampel, 1 sampel TIE.	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai			Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai	15 Juli 2025	penyelesaian pengujian terhadap 3 sampel oleh BBPOM Jambi yang belum dapat dilaporkan bulan Juni masih dalam proses.	Progress
Lapkin Interim TW II Tahun 2025		Sampai dengan bulan Juni 2025, sebanyak 115 sampel target UPT sesuai Pedoman Sampling dan rencana pelaksanaan telah diperiksa 100%. Dari 115 sampel yang	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai agar pengujian dapat dipercepat dan hasil uji dapat dilaporkan	15 Agustus 2025		Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai	15 Agustus 2025	penyelesaian pengujian terhadap 3 sampel oleh BBPOM Jambi yang belum dapat dilaporkan bulan Juni	Progress	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			diperiksa ditemukan 1 sampel Tanpa Izin Edar (TIE) dan sebanyak 114 sampel lainnya dilakukan pengujian. Selain menguji sampel yang disampling balai sendiri, laboratorium pengujian BBPOM di Bandar Lampung juga menguji 41 sampel pangan olahan dari BPOM Tulang Bawang dan 53 sampel pangan yang dikirimkan dari anggota region Pekanbaru. Total 208 sampel pangan olahan telah diuji sesuai ketentuan dengan memperhatikan parameter uji kritis sesuai Pedoman Sampling dan batas timeline yang telah ditetapkan. Sampai dengan 30 Juni 2025 sebanvak 10 sampel	tepat waktu. Selain itu, untuk perbaikan kinerja, terus dilakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Cara Distribusi Pangan Olahan agar produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.					masih dalam proses.	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			belum dapat dilaporkan karena masih dalam proses uji. Namun pada awal Juli sebanyak 7 sampel dari 10 sampel yang belum dapat dilaporkan per akhir Juni telah selesai uji dan dilaporkan tepat waktu via SIPT. Terdapat 3 sampel pangan olahan yang belum dapat dilaporkan karena belum selesai uji oleh balai lain. Ketiga sampel tersebut merupakan sampel yang sebagian parameter ujinya dikerjakan di BPOM Jambi sesuai pembagian kebijakan regionalisasi laboratorium. Terhadap hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan BPOM Jambi agar mempercepat							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			penyelesaian pengujian terhadap ketiga sampel tersebut. Dari 208 sampel yang telah diuji sebanyak 12 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terhadap kedua belas sampel tersebut telah dilakukan tindak lanjut yang diperlukan. Selain itu dilakukan juga tindak lanjut terhadap 2 sampel sesuai edaran pembersihan pasar dari pusat.							
		Juli	Sebanyak 175 sampel telah disampling, 1 sampel TIE dan 174 sampel diuji, Sebanyak 4 sampel masih dalam proses uji (3 sampel BPOM Jambi, 1 sampel uji balai sendiri)	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai	15 Agustus 2025		Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai	15 Agustus 2025	penyelesaian pengujian terhadap 3 sampel oleh BBPOM Jambi yang belum dapat dilaporkan bulan Juni masih dalam proses. Mempercepat penyelesaian	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
									pengujian 1 sampel yang belum selesai uji balai sendiri.	
		Agustus	Sebanyak 235 sampel telah disampling, 234 sampel diuji, 1 sampel TIE. Sebanyak 39 masih belum dapat dilaporkan per 31 Agustus 2025	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 September 2025	15 September 2025		Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 September 2025	15 September 2025	Penyelesaian pengujian terhadap 39 sampel yang belum dapat dilaporkan pada bulan Agustus.	Close
		September	Sebanyak 295 sampel telah disampling, 294 sampel diuji, 1 sampel TIE. Sebanyak 22 masih dalam proses uji	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 Oktober 2025	15 Oktober 2025		Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 Oktober 2025	15 Oktober 2025	Penyelesaian pengujian terhadap 22 sampel yang belum selesai uji	Progres
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada Triwulan 1 belum ada sampel KLB KP yang diterima dan diuji Balai Besar POM di Bandar Lampung sehingga belum ada realisasi kinerja terhadap IKU ini.	BBPOM di Bandar Lampung siap sedia melakukan pengujian dan investigasi atas sampel KLB KP jika diperlukan.	31 Juli 2025	Melaksanakan pengujian sampel KLB yang diterima sesuai pedoman				Close
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Pada Triwulan II tahun 2025 terdapat dua Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang	Melakukan koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait melalui partisipasi dalam Tim Gerak Cepat	TW III	Telah terlaksana koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait partisipasi BBPOM Bandar	Rencana aksi telah dilaksanakan		Telah terlaksana koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait partisipasi	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			diinvestigasi dan diambil sampel terduga penyebabnya. Pada kejadian pertama telah dilakukan sampling dan pengujian sebanyak 4 sampel pangan terduga penyebab keracunan, sedangkan pada kejadian kedua telah disampling 1 sampel pangan terduga penyebab keracunan. Hasil uji kelima sampel pada kejadian pertama dan kedua terkonfirmasi positif parameter uji dugaan penyebab keracunan sesuai hasil investigasi.	penanganan KLB. Selain itu, dalam rangka menjaga validitas pengujian dan menemukan agen penyebab keracunan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan investigasi dan menerapkan JMHP dalam setiap proses pengujian atas sampel KLB KP yang diterima.		Lampung dalam TGC. Bandar Lampung melakukan investigasi dan menerapkan JMHP dalam setiap proses pengujian atas sampel KLB KP yang diterima.			BBPOM Bandar Lampung dalam TGC. Bandar Lampung melakukan investigasi dan menerapkan JMHP dalam setiap proses pengujian atas sampel KLB KP yang diterima.	
		Juli	Jumlah sampel tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian sesuai kaidah 5plo	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	31 Juli 2025	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	Rencana aksi telah dilaksanakan	31 Juli 2025	Sampel telah diuji dengan penerapan JMHP dan telah diperoleh agen penyebab keracunan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Agustus	Jumlah sampel tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian sesuai kaidah 5plo	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	31 Agustus 2025	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	Rencana aksi telah dilaksanakan	31 Agustus 2025	Sampel telah diuji dengan penerapan JMHP dan telah diperoleh agen penyebab keracunan	Close
		September	Jumlah sampel tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian sesuai kaidah 5plo	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	30 September 2025	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	Rencana aksi telah dilaksanakan	30 September 2025	Sampel telah diuji dengan penerapan JMHP dan telah diperoleh agen penyebab keracunan	Close
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	Seluruh sampel telah selesai diuji dan dilaporkan via SIPT	mempercepat proses tindak lanjut	15 Juni 2025	mempercepat proses tindak lanjut			1 sampel TMS dalam proses tindak lanjut	Close
		Juni	Seluruh sampel telah selesai diuji dan dilaporkan via SIPT	mempercepat proses tindak lanjut	15 Juli 2025		mempercepat proses tindak lanjut	15 Juli 2025	6 sampel TMS dalam proses tindak lanjut	Close
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Sampai dengan Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan sampling sebanyak 35 sampel PIRT dari target tahun 2025 sebanyak 35 sampel (100%). Pelaksanaan pengujian telah sesuai dengan parameter uji kritis sesuai pedoman,	Mempercepat proses tindak lanjut terhadap sampel TMS. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan industri rumah tangga pangan yang beredar	15 Juli 2025	Tindak lanjut atas 6 sampel TMS telah dilaksanakan	Seluruh sampel TMS telah ditindaklanjuti	15 Juli 2025	Seluruh sampel TMS telah ditindaklanjuti	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			begitu juga dengan pengambilan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari 35 sampel yang diperiksa dan diuji diperoleh 26 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 9 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel yang TMS antara lain 3 sampel TMS Angka Kapang Khamir, 1 sampel TMS pemerian, 1 sampel TMS kadar cemaran logan As, 1 sampel TMS kadar pewarna dan kadar siklamat, 1 sampel TMS siklamat, 1 sampel TMS kadar pengawet sorbat, dan 1 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Enterobacteriaceae. Terhadap 3 sampel TMS telah dilakukan tindak lanjut berupa	di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk industri rumah tangga pangan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dikirimkannya surat dinas terkait tindak lanjut hasil pengawasan kepada pemerintah daerah sesuai lokasi sarana produksi sampel PIRT tersebut. Sementara itu 6 sampel TMS masih dalam proses tindak lanjut.							
6	Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Januari	Belum ada rekomendasi ke lintas sektor yang diterbitkan	Melakukan monitoring feed back rekomendasi dari lintas sektor jika sudah ada rekomendasi yang diterbitkan	TW 2		Melakukan monitoring feed back rekomendasi dari lintas sektor jika sudah ada rekomendasi yang diterbitkan	TW 2	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha tercapai	Progres
		Februari	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha belum tercapai	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin 2. Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor	TW2	Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online	Menyusun KAK Inovasi "Klinik CAPA"	TW2	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				BBPOM di Bandar Lampung atau online						
		Maret	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha pangan UMKM belum tercapai	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin 2. Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online	TW2	1. KAK kegiatan sudah disusun 2. Aplikasi pendaftaran konsultasi di inovasi "Klinik CAPA" telah selesai dan akan dilaunching pada Bulan Mei 2025	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha	TW2	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha pangan UMKM tercapai	Progres
		Mei	Terdapat sarana produksi MD UMKM dan saryanfar yang belum memberikan CAPA	Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA			Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA	TW2	JUmlah pelaku usaha yang memberikan CAPA meningkat	Progres
		Juni	Capaian IKU belum optimal	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan			- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA	TW3	Kenaikan capaian IKU	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal		Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
							Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
								Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
					koordinasi lintas sektor			- meningkatkan koordinasi lintas sektor			
		Juli	Capaian IKU belum optimal	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW4		- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW4	Kenaikan capaian IKU	Progres	
		Agustus	Capaian IKU belum optimal	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW4		- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW4	Kenaikan capaian IKU	Progres	
		September	Capaian IKU belum optimal	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan	TW4		- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan	TW4	Kenaikan capaian IKU	Progres	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				koordinasi lintas sektor			koordinasi lintas sektor			
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		Pembuatan BA dan Pernyataan Tutup dari Pemilik						
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target, namun perlu dilakukan lagi peningkatan dalam hal sosialisasi kepada Petugas terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi terutama kosmetik.	Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilaksanakan sesuai renlak dan melakukan sosialisasi terhadap pedoman IKU / Definisi operasional dan pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi kosmetik melalui media internal (inspection index)						
		Juli	Pemeriksaan sarana sesuai renlak	Pemeriksaan sarana sesuai renlak					Pemeriksaan sarana sesuai renlak	Close
		Agustus	Pemeriksaan sarana sesuai renlak	Pemeriksaan sarana sesuai renlak					Pemeriksaan sarana sesuai renlak	Close
		September	Pemeriksaan sarana sesuai renlak	Pemeriksaan sarana sesuai renlak					Pemeriksaan sarana sesuai renlak	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Terlaksana sesuai renlak	Progres
		Februari	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Terlaksana sesuai renlak	Progres
		Maret	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Terlaksana sesuai renlak	Progres
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Terdapat 9 sarana produksi pangan olahan (non fortifikasi) yang diperiksa dan sudah dilakukan pengiriman surat tindak lanjut selama TW I. Secara jumlah masih cukup kecil dibandingkan total pemeriksaan selama tahun 2025 yaitu 124 sarana, hal ini dikarenakan adanya beberapa kali perubahan dan penyesuaian target karena adanya efisiensi dan	1. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 2. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 3. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA 4. Melakukan Pembinaan melalui surat tindak lanjut atau melalui KIE secara tematik						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			relaksasi. Dari segi pencapaian IKU tidak ada kendala. Hal-hal yang mendukung pencapaian adalah tersedianya personil inspeksi yang kompeten, adanya pengendalian dan monitoring capaian IKU, dan evaluasi terhadap akurasi surat tindaklanjut dan ketepatan dan akurasi dalam penginputan data melalui SIPT. Terdapat 9 sarana produksi pangan olahan (non fortifikasi) yang diperiksa dan sudah dilakukan pengiriman surat tindak lanjut selama TW I. Secara jumlah masih cukup kecil dibandingkan total pemeriksaan selama tahun 2025 yaitu 124 sarana, hal ini dikarenakan adanya beberapa kali	kepada pelaku usaha terkait						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			perubahan dan penyesuaian target karena adanya efisiensi dan relaksasi. Dari segi pencapaian IKU tidak ada kendala. Hal-hal yang mendukung pencapaian adalah tersedianya personil inspeksi yang kompeten, adanya pengendalian dan monitoring capaian IKU, dan evaluasi terhadap akurasi surat tindaklanjut dan ketepatan dan akurasi dalam penginputan data melalui SIPT.							
		April	Tindaklanjut PSK terlambat	Komunikasi TL dengan Ditwasprod PO			Koordinasi TL berupa PSK dengan Ditwasprod PO	Mei 2025	Proses Penerbitan surat PSK	Progres
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Sampai dengan bulan Juni 2025, sebanyak 51 sarana produksi pangan olahan telah diperiksa termasuk 4 sarana PIRT. Dari jumlah tersebut	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sesuai renlak dan revisi target sehingga capaian						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			terdapat 1 sarana produksi pangan olahan yang terlambat dalam pelaksanaan tindak lanjut. Keterlambatan disebabkan oleh perlunya waktu untuk penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama antara Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dengan tindak lanjut Pemberhentian Sementara Kegiatan. Tercapai/Melampaui terhadap IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilakukan penyesuaian target melalui revisi.	kinerja tidak dalam status melampaui. Kesesuaian koordinasi terutama untuk sarana PIRT perlu ditingkatkan terutama dengan pemerintah kabupaten/kota.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Juli	Pemeriksaan sesuai renlak	Pemeriksaan sesuai renlak	Agustus 2025	Pemeriksaan sesuai renlak				Close
		Agustus	Pemeriksaan sesuai renlak	Pemeriksaan sesuai renlak	September 2025	Pemeriksaan sesuai renlak				Close
		September	Pemeriksaan sesuai renlak	Pemeriksaan sesuai renlak	Oktober 2025		Pemeriksaan sesuai renlak	Oktober 2025		Progres
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak			Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Juni	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Juni	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 49,80 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak			Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Juli	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Capaian jumlah sarana terhadap target tahunan setelah dilakukan relaksasi anggaran masih kecil.	Agar kinerja dapat dipertahankan maka perlu dilakukan revisi renlak menyesuaikan dengan perubahan target tahunan kembali ke target awal.						
		Juli	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 61,48 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025		Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Des 2025	Target sarana yang diperiksa dapat diselesaikan dengan tepat waktu	Progres
		Agustus	Capaian jumlah sarana yang diperiksa	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025		Pemeriksaan sarana berdasarkan	Des 2025	Target sarana yang diperiksa dapat	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			terhadap target tahunan 75,29 %				renlak pasca relaksasi anggaran		diselesaikan dengan tepat waktu	
		September	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 86,57 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025		Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Des 2025	Target sarana yang diperiksa dapat diselesaikan dengan tepat waktu	Progres
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Menyesuaikan kembali renlak setelah dilakukan relaksasi	TW2		Menyusun renlak relaksasi	Des 2025	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Februari	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Menyesuaikan renlak setelah dilakukan relaksasi	TW2		Menyusun renlak relaksasi	TW2	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Maret	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Menyesuaikan renlak setelah dilakukan relaksasi	TW2		Menyusun renlak relaksasi	TW2	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Mei	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak			Realisasi sesuai renlak relaksasi	Juni	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Juni	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak			Realisasi sesuai renlak relaksasi	Juli	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Dari segi jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan sebesar 52,34%.	- Pemeriksaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan - Monitoring dan						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				evaluasi capaian secara berkala						
		Juli	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 68,75 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025		Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025	Target IKU tercapai	Progres
		Agustus	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 75,78 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025		Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025	Target IKU tercapai	Progres
		September	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 82,03 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025		Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025	Target IKU tercapai	Progres
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada TW I, sudah dilaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target. Keberhasilan program dikarenakan 1. Pedoman pengawasan iklan sudah tersedia di awal tahun 2. Target capaian sudah ditentukan dari awal dan tidak ada perubahan 3. Tidak terlalu terpengaruh dengan	1. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan. 2. Memastikan pedoman pengawasan iklan dipenuhi dengan melakukan rapat monitoring pengawasan iklan secara internal.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			perubahan anggaran, karena sebagian iklan berasal dari online dan sebagian menumpang anggaran kegiatan lain seperti inspeksi sarana distribusi. 4. Sudah ada petugas yang ditunjuk dan sudah mengikuti pelatihan 5. Monitoring penginputan dan akurasi data pada SIPT.							
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Sampai dengan TW II, iklan obat yang sudah diawasi sejumlah 92, kosmetik 180, obat bahan alam 67, suplemen kesehatan 24, dan pangan olahan sejumlah 144 iklan.	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan iklan. Selain itu diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan.						
		Juli	Masih memenuhi target	Sesuai renlak	Sesuai	Pengawasan iklan sesuai renlak			Memenuhi target IKU	Close
		Agustus	Masih memenuhi target	Sesuai renlak	Sesuai	Pengawasan iklan sesuai renlak			Memenuhi target IKU	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		September	Masih memenuhi target	Sesuai renlak	Sesuai	Pengawasan iklan sesuai renlak			Memenuhi target IKU	Close
12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Agustus	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	Sesuai renlak	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu			Mencapai Target	Close
		September	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	Sesuai renlak	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu			Mencapai Target	Close
13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah BBPOM di Bandar Lampung	Agustus	0 kegiatan	Melakukan pembahasan untuk alokasi SDM dan Anggaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan, utamanya untuk kegiatan yang melibatkan stakeholder dan harus dilakukan secara luring, seperti Bimtek dan Advokasi.			1. Rapat tim kerja dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan Advokasi 2. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek 3. Mengumpulkan dan menganalisis data pengawasan AMR untuk dipublikasikan pada media informasi	November 2025	1. Tools penggunaan AMR 100%, 2. Bimtek 100% (target 1x dalam setahun telah terlaksana) 3. Advokasi 0% (target pelaksanaan TW 4/2025), 4. Publikasi 0% target bulan September dan Desember 2025)	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
							resmi BBPOM di Bandar Lampung			
		September	1. Tools penggunaan AMR 100%, 2. Bimtek 100% (target 1x dalam setahun telah terlaksana) 3. Advokasi 0% (target pelaksanaan TW 4/2025), 4. Publikasi 0% target bulan September dan Desember 2025)	Melaksanakan kegiatan advokasi sesuai pembahasan dari hasil rapat			1. Menyusun kepanitian pelaksanaan kegiatan Advokasi 2. Melakukan koordinasi dengan Ditwasdis ONPP 3. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek	November 2025	1. Tools penggunaan AMR 100%, 2. Bimtek 100% (target 1x dalam setahun telah terlaksana) 3. Advokasi 10% (target pelaksanaan TW 4/2025, telah dilakukan pembahasan awal dengan anggota tim kerja), 4. Publikasi 50% (target 2x dalam setahun dengan rincian 1x tiap TW, telah terlaksana 1x untuk target TW 3)	Progres
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di	Januari	Alat Laboratorium tidak dapat diadakan	Pengadaan alat lab sesuai prioritas dengan adanya kebijakan penambahan	TW 2		Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	TW2	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
	Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			anggaran belanja modal						
		Februari	Alat Laboratorium tidak dapat diadakan	Pengadaan alat lab sesuai prioritas dengan adanya kebijakan penambahan anggaran belanja modal	TW 2		Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	TW2	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Close
		Maret	Alat Laboratorium tidak dapat diadakan	Pengadaan alat lab sesuai prioritas dengan adanya kebijakan penambahan anggaran belanja modal	TW 2		Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	TW2	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Close
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Nilai pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium (SKL) merupakan indikator kinerja dengan pengampu dari PPPOMN. Pada bulan Januari 2025, Tim PPPOMN mengirimkan tools pemenuhan SKL sebagai exercise untuk setiap UPT dalam menghitung rencana pemenuhan	1. Dilakukan pemantauan capaian SKL oleh PIC masing-masing komponen (SRL, Peralatan, Kompetensi Laboratorium, MA terverifikasi) secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pemenuhan SKL sesuai dengan rencana sehingga	TW 4		- Pemantauan rutin setiap bulan oleh PIC SKL dan koordinasi dengan PPK dan Penyelia - Berkoordinasi dengan PIC SKL PPPOMN terkait kelengkapan dokumen SKL	Tiap TW	SKL terpantau dan target SKL tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			target di tiap Triwulan hingga mencapai target tahunan di Triwulan 4. Dengan pengisian tools ini dapat diestimasi capaian tiap komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), standar peralatan, standar kompetensi laboratorium, dan standar metode Analisa terverifikasi per Triwulan. Pada bulan Maret 2025, PPPOMN selaku pengampu mengirimkan surat pemberitahuan kepada UPT terkait monitoring dan evaluasi TW 1 sehingga UPT segera menindaklanjuti dengan mengisi tools penilaian lengkap beserta data dukungannya. PPPOMN juga memberikan	target pada Triwulan berikutnya dapat tercapai. 2. Berkoordinasi dengan PIC dari PPPOMN jika terdapat kendala						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			fasilitas diskusi melalui zoom meeting terkait pengisian tools baik saat perencanaan maupun monev, sehingga membantu pemahaman UPT dalam pengisian tools dengan benar. Selain itu juga sudah ditunjuk PIC dari PPPOMN untuk tiap UPT sebagai tim penilai dan fasilitator. Pada TW 1 tools pemenuhan SRL komoditi Obat, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, Kosmetika, Pangan Olahan dan Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (MBM), diisi oleh penyelia masing-masing komoditi dengan mempertimbangkan kemampuan laboratorium terkait							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			ketersediaan baku pembanding, reagen, media, peralatan pendukung, dan kompetensi personilnya. Adanya perbedaan pada tools pemenuhan SRL komoditi MBM yang digunakan saat perencanaan di awal tahun dengan tools yang digunakan saat monitoring evaluasi di akhir TW 1 dikarenakan laboratorium MBM PPPOMN melakukan penyesuaian terhadap SRL tersebut, menyebabkan capaian untuk SRL secara umum di TW 1 lebih rendah sedikit dari target dengan capaian 98.25%. Pada TW 1 pemenuhan standar peralatan sesuai dengan target							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			rencana dengan capaian sebesar 101.85%. Standar peralatan tahun 2025 berbeda dengan standar tahun sebelumnya. Daftar peralatan dibuat lebih ringkas dengan mengutamakan alat-alat utama yang dimasukkan dalam standar (termasuk jumlah per itemnya), terutama untuk peralatan laboratorium kimia. Selain jenis alat, jumlah per item alat juga mempengaruhi persentase pemenuhan. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan anggaran, menjadi kendala dalam pemenuhan target standar peralatan. Beberapa alat besar pengadaan TA 2025							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			sudah berkontrak di awal tahun 2025, namun dengan adanya Inpres maka pengadaan alat ditunda sehingga berpotensi menyebabkan target pemenuhan tidak tercapai. Kondisi negara yang serba tidak pasti menyebabkan perubahan kebijakan secara cepat, sehingga beberapa alat besar akhirnya bisa diadakan di TW 1 (Freezer dan Water Purification System), namun terdapat 1 peralatan yang tidak dapat diadakan yaitu incubator mikrobiologi. Pada TW 1 pemenuhan kompetensi laboratorium sesuai dengan target rencana dengan							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			capaian sebesar 103,23%. Kompetensi laboratorium dinilai dari kemampuan minimal 2 orang personil dalam melakukan pengujian sesuai SRL. Bukti kemampuan personil ini dapat berupa CP-LCP hasil uji, laporan verifikasi metode Analisa, keikutsertaan dalam uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding, atau bukti sertifikat hasil pelatihan. Pada TW 1 terdapat penambahan kompetensi laboratorium yaitu dari laboratorium Obat (karena penggantian personil) dan laboratorium Pangan Olahan (penambahan SRL). Persentase pemenuhan kompetensi laboratorium pada TW							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			1 adalah sebesar 80, merupakan angka yang cukup tinggi, dan perlu perencanaan untuk memenuhi kekurangan sebesar 20% untuk mencapai 100%. Upaya peningkatan dapat berupa penambahan SRL, pemberian pelatihan, berpartisipasi dalam uji profisiensi / uji kolaborasi / uji banding, dan verifikasi metode Analisa. Pada TW 1 pemenuhan Metode Analisa terverifikasi sesuai dengan target rencana dengan capaian sebesar 102,56%. Masing-masing laboratorium merencanakan penambahan verifikasi MA selama tahun 2025. Realisasi metode Analisa							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			terverifikasi adalah sebesar 44,1%, menunjukkan angka yang masih jauh dari 100%. Komponen metode Analisa terverifikasi ini merupakan komponen baru SKL 2025. Dari tools yang digunakan terlihat bahwa antara SRL dan standar metode Analisa terverifikasi tidak selalu saling berkaitan, sehingga akan ada 2 perencanaan verifikasi MA yaitu dalam rangka pemenuhan SRL dan dalam rangka pemenuhan standar MA terverifikasi. Hal ini tentunya cukup memberatkan bagi laboratorium. Untuk komoditi MBM tidak ada perencanaan pemenuhan verifikasi MA sesuai standar.							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			namun dilakukan verifikasi MA dalam rangka pemenuhan SRL. Perencanaan berkelanjutan perlu dilakukan untuk masa RPJMN 2025-2029 dengan mempertimbangkan faktor pendukung seperti reagen, media, baku pembanding, peralatan, kompetensi serta jumlah SDM.							
		April	Realisasi SKL masih sama dengan Bulan Maret 2025	- Segera melaksanakan pengadaan alat lab sesuai dengan anggaran setelah relaksasi - melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan			- Pengadaan alat lab sudah berproses akan tetapi masih indent - Melaksanakan semua kegiatan peningkatan SKL yang sudah direncanakan	TW2	- Beberapa alat laboratorium sudah terinstal di akhir TW2 ; - Ada Peningkatan nilai SKL dari komponen peralatan, SRL, Verifikasi MA maupun Kompetensi Laboratorium	Close
		Mei	- Ada penambahan realisasi peralatan kimia yaitu Dissolution Tester,	- melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan			- Melaksanakan semua kegiatan peningkatan SKL	TW2	- Ada Peningkatan nilai SKL dari komponen	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			TLC System dan Kjeldahl - Peningkatan SRL direncanakan Bulan Juni				yang sudah direncanakan		peralatan, SRL, Verifikasi MA maupun Kompetensi Laboratorium	
		Juni	Peningkatan semua komponen SKL sesuai dengan perencanaan di TW 2	- melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan di TW 3			- Melaksanakan semua kegiatan peningkatan SKL yang sudah direncanakan di TW 3	TW 3	Ada Peningkatan nilai SKL sehingga target SKL TW 3 dapat tercapai	Close
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Pemenuhan standar peralatan sampai dengan TW 2 dapat terpenuhi dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran untuk belanja modal. Alat-alat utama seperti Alat Uji Disolusi, GC-MS, Kjedhal system dan TLC system selesai diadakan pada TW 2, dan terdapat penambahan alat spindown yang semula tidak jadi diadakan menjadi dapat diadakan. Namun beberapa alat	- Melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan di TW 3 - Berkoordinasi dengan Infalabs dan Balai lain terkait ketersediaan baku pembanding - Penataan pengujian sampel mikrobiologi agar target uji rutin dan pemenuhan SKL dapat tercapai	TW 3	- Pelaksanaan pemenuhan SKL sesuai rencana TW 3 - Berkoordinasi dengan BBPPOM di Palembang untuk meminta baku pembanding deksametason dan sudah tersedia di TW 3 - Kesepakatan antara Inspeksi dan Pengujian untuk melakukan 2 tahap sampling yaitu awal bulan (pangan dan obat) dan pertengahan tahun (OBA-SKK, Kosmetik) sehingga		TW 3	Ada Peningkatan nilai SKL sehingga target SKL TW 3 dapat tercapai	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			tetap tidak dapat diadakan pada tahun 2025 yaitu timbangan analitik dan inkubator. 2. Pemenuhan SRL sampai dengan TW 2 dapat terpenuhi sesuai target untuk komoditi pangan. Pemenuhan ini didukung dengan diselenggarakannya In House Training pada bulan Juni 2025 dengan instruktur dari PPPOMN. Dengan adanya In House Traning ini maka syarat pemenuhan SRL dapat dipenuhi yaitu metode analisa sudah terverifikasi. Selain itu kompetensi dari tim penguji pangan juga bertambah dengan adanya training. 3. Pemenuhan target SRL sampai dengan TW 2 tidak dapat terpenuhi untuk			sampel tidak semua masuk di awal bulan				

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			komoditi obat, obat bahan alam, dan mikrobiologi disebabkan hal sebagai berikut : a. Sampel obat untuk pemenuhan SRL pada TW 2 belum tersedia b. Verifikasi metode analisa untuk SRL obat bahan alam selesai di akhir Juni, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam penilaian TW 2 c. Verifikasi metode analisa untuk uji mikrobiologi dalam rangka pemenuhan SRL belum terlaksana pada TW 2 karena : • Load sampel pada TW 2 meningkat setelah relaksasi anggaran. Sumber daya yang tersedia dikerahkan untuk penyelesaian sampel rutin dan regional. • Sampel untuk keperluan verifikasi							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			metode analisa belum tersedia pada TW 2. 4. Peningkatan kompetensi laboratorium melalui In House Training Pengujian Pangan dan juga pelatihan dasar untuk personil pengujian baru 5. Pemenuhan metode analisa terverifikasi untuk komoditi obat (sebanyak 7 metode analisa dari semula rencana 2 metode analisa pada TW 2) dan pangan (sebanyak 2 metode analisa). Namun rencana verifikasi metode analisa komoditi kosmetik tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya stok baku pembanding Deksametason (hanya bisa untuk uji rutin), sedangkan stok di							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			infalabs juga kosong. Sudah diupayakan meminta stok baku pembeding dari Balai lain.							
		Juli	- Belum terlaksananya penambahan SRL sesuai perencanaan terutama untuk komoditi MBM karena semua sampel rutin masuk ke lab di awal bulan - Pengembangan kompetensi direncanakan untuk personil laboratorium Obat dan Obat Bahan Alam	- Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampling untuk dibagi menjadi 2 tahap (awal dan pertengahan bulan) - Pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk personil Lab Obat dan Obat Bahan Alam di bulan Juli sesuai anggaran yang tersedia	TW 3		- Koordinasi dengan fungsi inspeksi agar sampling mulai bulan Juli dilakukan 2 tahap (awal dan pertengahan bulan) - Melaksanakan penambahan SKL sesuai perencanaan TW 3 dan perencanaan penambahan SKL yang tertunda di TW 2 - Pelaksanaan In House Training untuk personil Lab Obat dan Obat Bahan Alam di bulan Juli	TW 3	- Penambahan SRL sesuai perencanaan TW 3 dapat dilaksanakan karena sampel masuk ke lab menjadi 2 tahap - IHT untuk personil Obat dan OBA terlaksana di bulan Juli	Close
		Agustus	Sampel obat Nystatin tablet ED < 6 bulan, sampel artesunate steril injeksi tidak tersedia di pasaran,	- Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi atau UPT lain terkait sampling sampel-sampel	TW 3		- Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi atau UPT lain terkait sampling sampel-sampel	TW 3	Penambahan SRL sesuai perencanaan TW 3 dapat dilaksanakan	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			sampel meloxicam rektal suppositorian tidak tersedia di pasaran	tersebut - Inspeksi berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Provinsi untuk sampel artesunate steril			tersebut - Inspeksi berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Provinsi untuk sampel artesunate steril		karena sampel obat sudah tersedia	
		September	Sampel artesunate steril injeksi tidak tersedia di pasaran, sampel meloxicam rektal suppositorian tidak tersedia di pasaran	- Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi atau UPT lain terkait sampling sampel-sampel tersebut - Inspeksi berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Provinsi untuk sampel artesunate steril	TW 3		- Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi atau UPT lain terkait sampling sampel-sampel tersebut - Inspeksi berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Provinsi untuk sampel artesunate steril	TW 3	Penambahan SRL sesuai perencanaan TW 3 dapat dilaksanakan karena sampel obat sudah tersedia	Progres
15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Agustus	Advokasi KKPA kepada 10 Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 dan dihadiri oleh 65 peserta yang merupakan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah	Melakukan pendampingan intensif baik daring dan luring kepada 10 kabupaten/kota agar mengisi self assesment	30 Agustus 2025	Pendampingan luring/daring kepada OPD di Kabupaten/Kota, jadwal menyesuaikan			Telah dilakukan pendampingan luring/daring kepada OPD di Kabupaten/Kota, jadwal menyesuaikan	Close
		September	Sudah semua kabupaten kota melakukan pengisian	Memaksimalkan pendampingan kepada 2	30 September 2025	Verifikasi data dukung Kota Metro dan Kabupaten			Rangkaian kegiatan Kabupaten/Kota	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			tools self asesment KKPA	kabupaten/kota yang menjadi target capaian KKPA di catchment area BBPOM di Bandar Lampung		Pringsewu sebagai target, dengan nilai di atas 60			yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman telah selesai tinggal menunggu penjurian	
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada TW I, baru dilaksanakan pemeriksaan terhadap 2 sarana produksi pangan olahan fortifikasi. Tidak tercapainya kegiatan adalah disebabkan: 1. Pada awal tahun terutama belum tersedia anggaran yang digunakan untuk pengawasan, terutama pada bulan Januari. 2. Adanya ketidakpastian target jumlah sarana produksi pangan olahan fortifikasi yang akan diperiksa. Awalnya adalah 24	1. Dilakukan perencanaan yang lebih akurat terkait target cakupan sarana produksi pangan fortifikasi 2. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 3. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 4. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			sarana dari 37 sarana, selanjutnya karena relaksasi terjadi perubahan target menjadi 4 sarana, dan selanjutnya kembali lagi menjadi 24 sarana.							
		Juni	Sesuai renlak	Penyesuaian renlak			Penyesuaian renlak	Juli 2025		Progres
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Sampai dengan Triwulan kedua capaian pemeriksaan adalah 7 sarana. Tidak tercapainya IKU persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena belum dilakukan revisi terhadap waktu pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sehingga menyesuaikan	penyesuaian renlak pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui revisi dan pelaksanaan pada TW III sehingga ditargetkan 24 sarana secara akumulatif dapat tercapai. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan secara berkala.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dengan jadwal pengujian di laboratorium							
		Juli	Sesuai renlak	Sesuai renlak	Agustus 2025	Sesuai renlak				Close
		Agustus	Sesuai renlak	Sesuai renlak	September 2025	Sesuai renlak				Close
		September	Sesuai renlak	Sesuai renlak			Sesuai renlak	Oktober 2025		Progres
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Januari	Tingkat EFektivitas KIE mencapai target	1, Merencanakan untuk Menyusun POA KIE 2. Merencanakan pelaksanaan Inovasi tour edukasi (GALAKSI) , sehingga KIE dapat terlaksana dengan anggaran yang sangat kecil	1 Bulan	1.Membuat POA KIE 2. Mensosialisasikan Inovasi KIE Tour Edukasi supaya komunitas masyarakat dan Pelajar/mahasiswa tertarik untuk mengikutinya		1 Bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	closed
		Februari	Tingkat EFektivitas KIE mencapai target	1. Merencanakan revisi anggaran dan	1 bulan	1. Melaksanakan revisi anggaran		1 bulan	KIE dapat terlaksana	closed

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 2. Merencanakan melaksanakan pengisian survey efektifitas KIE terutama KIE media sosial (baru)		dengan anggaran yang di efisiensi 2. Melaksanakan pengisian survey KIE Media sosial			dengan baik dan hasil survey lebih optimal	
		Maret	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	"1. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam 2. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE 3. Melakukan revisi anggaran, sehingga KIE Tomas diharapkan dapat terlaksana di TW 2 4. Merencanakan pelaksanaan KIE melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik"	3 bulan	1,Melaksanakan KIE langsung dengan tokoh masyarakat dan dilaksanakan dengan lokasi yang beragam 2. Menunjuk PJ Pelaksanaan Survey di setiap lokus kegiatan KIE, sehingga pengisian surveynya dapat berjalan dengan baik 3. Melaksanakan revisi anggaran dengan relaksasi anggaran KIE Tomas 4. Selain KIE di		3 bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	closed

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						media sosial juga akan dilakukan KIE di Radio, Baliho/Spanduk , Media digital dll				
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Adanya efisiensi anggaran dan perubahan POA , tidak adanya anggaran pelaksanaan KIE langsung, adanya perubahan pelaksanaaan juknis dan pengisian survey efektifitas KIE, serta juknis pelaksanaan KIE baru keluar pada minggu ke 2 Maret 2025 ,sehingga KIE tomas belum dapat terlaksana, Sedangkan KIE Tour edukasi di Galaksi tidak dapat diberikan konsumsi gratis kepada peserta KIE, sehingga mempengaruhi dalam pengisian survey,	1. Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 2. Merencanakan melaksanakan pengisian survey efektifitas KIE terutama KIE media sosial (baru) 3. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam 4. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE dan survey semakin terkontrol 5. Merencanakan pelaksanaan KIE	2 bulan	1. Telah dilakukan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 2. Melakukan melaksanakan pengisian survey efektifitas KIE terutama KIE media sosial (baru) 3. SUDah terdapat jadwal KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam 4. Dibentuknya PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE dan survey semakin terkontrol 5.Dilaksanakannya KIE Tomas dan		2 bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	closed

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			sementara itu tidak adanya anggaran Publikasi untuk Media sosial dan media lainnya juga mempengaruhi pelaksanaan KIE melalui media	Tomas dan melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik		melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik				
		April	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	1. Merencanakan KIE sesuai rencana dan akuntabel, 2. Merencanakan pelaksanaan sosialisaii pertanggung jawaban dengan mitra	1 bulan	1. Melaksanakan KIE dengan sesuai rencana dan akuntabel 2. Melaksanakan sosialisasi dan komunikasi intens untuk menjelaskan pertanggung jawaban		KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal		closed
		Mei	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	1. Mensosialisasikan cara pengisian survey yang baik sebelum diminta mengisi survey	1 bulan	1. Melaksanakan sosialisasi survey KIE sebelum kegiatan		KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal		closed
		Juni	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	Melaksanakan KIE lebih banyakkoordinasi dengan pihak eksternal	3 bulan	Melaksanakan KIE dengan kerjasama parekraf dan Bank Indonesia		KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil		closed

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
								survey lebih optimal		
		Juli	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	Melaksanakan KIE lebih banyakkoordinasi dengan pihak eksternal	3 bulan	Melaksanakan KIE dengan kerjasama parekraf		3 bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	closed
		Agustus	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	Melaksanakan KIE lebih banyak dan koordinasi dengan pihak eksternal	3 bulan	Melaksanakan KIE dengan kerjasama parekraf		3 bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	closed
		September	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	Melaksanakan KIE lebih banyak dan koordinasi dengan pihak eksternal	3 bulan	Melaksanakan KIE dengan kerjasama parekraf dan kwarcab		3 bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	closed
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rekomendasi dari tahun 2024	Jumlah sekolah intervensi masih sedikit untuk setiap kabupaten kota, sehingga informasi terkait PJAS Aman belum terlalu tersebar	Menambah target sekolah yang lebih tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Lampung, bekerja sama dengan instansi terkait di antaranya Dinas Pendidikan dan Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi, dengan	triwulan 2 tahun 2025	Telah dilakukan Sosialisasi kepada sekolah perluasan, sebanyak 30 sekolah. Total sekolah perluasan 87, tercapai 100 %				Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				maksud mendorong pemerintah daerah untuk melakukan replikasi program PJAS Aman dan ikut mengawal konsistensi sekolah intervensi dalam menerapkan tahapan program PJAS Aman di sekolah.						
		Januari	Persentase target 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Close
		Februari	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Close
		Maret	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0%	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada			Advokasi belum terlaksana,	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)		bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO			tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Target pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu target pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Unit Pengampu Pusat yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI. Untuk pelaksanaan tahap awal adalah kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada rentang waktu Januari - April 2025 (TW 1 - TW 2). Dengan adanya Inpres No. 1 tahun 2025 berkaitan efisiensi anggaran	Telah dilakukan perencanaan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada bulan April 2025 (TW 2). Setelah dilakukan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kegiatan Program berupa pengurangan tahapan dan beberapa kali revisi anggaran sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus. Juga dengan adanya pelantikan kepala daerah di bulan Februari 2025 dan padatnya kegiatan kepala daerah di bulan Ramadhan dan ditambah cuti bersama, sehingga dilakukan revisi capaian persentase tahapan pelaksanaan kegiatan ini. Awalnya target ditetapkan sudah dilaksanakan advokasi dengan nilai 25% tetapi telah	Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan bulan Juni 2025 serta pengawalan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan pada bulan Juli 2025.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dilakukan perubahan berdasarkan permasalahan di atas menjadi 0% di TW 1 tetapi di dalam perhitungannya masih tertulis 25% pada TW 1. Kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah belum terlaksana maka tahapan selanjutnya belum bisa dilaksanakan karena kegiatan ini membangun komitmen dan koordinasi di antara lintas sektor di daerah dalam menghasilkan peta program intervensi keamanan sekolah akan menjadi langkah awal yang terarah dalam melaksanakan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Sasaran ini mendukung sasaran strategis BPOM yaitu meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan.							
		Juni	Kegiatan tahap 4 yaitu monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan bulan Juni 2025	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah	Agustus 2025	Pelaksanaan tahap 4 dilanjutkan pada bulan Juli dan Agustus 2025			Terlaksananya kegiatan tahap 4 paling lambat pada bulan Agustus 2025	Close
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Pada TW II tahun 2025 direncanakan empat tahapan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Tahap pertama sampai ketiga dapat dilaksanakan yaitu advokasi lintas sektor program SAPA sekolah, sosialisasi keamanan pangan	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah berupa SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah untuk	TW III	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah berupa SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Surat Pernyataan			Seluruh tahapan kegiatan PJAS telah selesai dilaksanakan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dan bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah disebabkan perencanaan dan koordinasi yang baik dengan dinas pendidikan, kemenag dan pihak sekolah/madrasah. Pada tahap keempat yaitu monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak tercapai sepenuhnya disebabkan jadwal ujian dan libur sekolah.	Menjaga Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada siswa dan orang tua siswa serta evaluasi pemahaman siswa dan orang tua siswa/komite sekolah setelah diberikan sosialisasi keamanan pangan melalui pre test dan post test. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya direncanakan pada		Komitmen Kepala Sekolah untuk Menjaga Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada siswa dan orang tua siswa serta evaluasi pemahaman siswa dan orang tua siswa/komite sekolah setelah diberikan sosialisasi keamanan pangan melalui pre test dan post test. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan pengawalan sekolah yang sudah				

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				bulan Juli dan Agustus 2025.		diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya direncanakan pada bulan Juli dan Agustus 2025.				
		Juli	Pelaksanakan tahap 5 yaitu pengawalan sekolah yang diintervensi th 2024 direncanakan bulan Juli 2025	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025			Terlaksananya pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
		Agustus	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025			Terlaksananya pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
19	Jumlah desa pangan aman	Rekomendasi dari tahun 2024	Beberapa perencanaan belum sesuai karena menyesuaikan kondisi di Kabupaten/Kota, terkait adanya Pilkada dll	Meningkatkan Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan	triwulan 2 tahun 2025	- Koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan untuk menentukan desa yang akan menerima intervensi			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Close
		Rekomendasi dari tahun 2024		Meningkatkan Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama lintas sektor terkait, pihak	triwulan 2 tahun 2025	penuh - Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit				Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				Desa/Kelurahan sebagai pelaksana di lapangan sehingga tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		Pengampu Pusat PMPUPO				
		Januari	Anggaran dan KAK mengacu kepada baseline tahun 2024	Melakukan koordinasi awal dengan stakeholder untuk menentukan desa yang akan menjadi lokus intervensi	triwulan 2 tahun 2025	- Audiensi dengan stakeholder dalam hal ini berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pendidkan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dan mendapat rekomendasi lokus sekolah, desa dan pasar yang dianggap strategis untuk dilakukan implementasi - Advokasi akan dilaksanakan pada			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO				
		Februari	Anggaran dan target mengacu kepada baseline 2024	Terus melakukan koordinasi awal dengan OPD terkait dan desa yang direkomendasikan	triwulan 2 tahun 2025	- Melakukan survei ke desa yang direkomendasikan, dan menetapkan 5 desa yang akan menjadi lokus intervensi, yaitu: Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro, Desa Bumi Daya Kecamatan Palas, Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung, Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji. - Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	Anggaran dan target mengacu kepada baseline 2024	Koordinasi lebih intens kepada stakeholder untuk mengarah kepada terlaksananya advokasi	triwulan 2 tahun 2025	- Koordinasi intensif untuk menentukan jadwal Advokasi - Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Close
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Target capaian dan timeline setiap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman mengalami perubahan yang signifikan karena adanya efisiensi anggaran. Unit pengampu program di Badan POM yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPUPO) mengubah strategi kegiatan termasuk mempertimbangkan adanya pergantian Kepala Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Berkoordinasi secara maksimal dengan pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat melaksanakan Advokasi di bulan April 2025	triwulan 2 tahun 2025	Berkoordinasi secara maksimal dengan pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat melaksanakan Advokasi di bulan April 2025			Berkoordinasi secara maksimal dengan pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat melaksanakan Advokasi di bulan April 2025	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Hal ini cukup berdampak bagi Program Desa Pangan Aman untuk memulai Advokasi di Kabupaten yang menjadi lokus intervensi, di mana beberapa stakeholder masih terus melakukan koordinasi internal dalam pemerintahan yang baru. Advokasi merupakan tahap awal yang menjadi entry point atau pintu masuk bagi dimulainya Program Desa Pangan Aman, dan kegiatan baru direncanakan pada bulan April setelah masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Sehingga capaian tahapan program secara keseluruhan belum ada (0 %).							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		April	Belum dilakukan tahapan Advokasi	Advokasi dilakukan di bulan April sesuai timeline dari Unit pengampu	Apr-25	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO			Advokasi telah terlaksana pada tanggal 22 april 2025	Close
		Mei	Pelatihan Kader sudah selesai, Bimtek Komunitas dilakukan di 2 desa	Pelatihan Kader dilakukan di 5 desa	Mei 2025	Melanjutkan tahapan Bimtek Komunitas yang dilakukan oleh Kader Desa yang telah dilatih pada Pelatihan Kader sebelumnya			Tahapan Bimtek Komunitas telah terlaksana 50% (10% dari bobot tahapan)	Close
		Juni	Bimtek Komunitas telah selesai dilaksanakan di 5 desa	Memantau kelengkapan dokumen untuk tahapan monev yang meliputi SK TKPD dan Kader, pembuatan Profil Desa dan Rencana Aksi terkait kemandirian pangan di Desa	Juni 2025	Koordinasi dengan Desa terkait Bimtek Komunitas Desa			Tahapan Bimtek Komunitas telah terlaksana 100% (20% dari bobot tahapan)	Close
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Target dan timeline setiap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman dapat tercapai karena adanya dukungan penuh dan koordinasi	Terus berkoordinasi secara maksimal dengan pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat menyusun Rencana Aksi Desa terkait	TW III	Terus berkoordinasi secara maksimal dengan pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat menyusun Rencana			Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman telah selesai dilaksanakan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			yang intensif dengan semua OPD terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kesehatan. Adanya efisiensi anggaran membuat strategi untuk mencapai target adalah dengan cara mengutamakan komunikasi intensif kepada Kepala Desa dan Tim. Sebagai pimpinan di desa, mereka adalah ujung tombak untuk dapat menunjuk masyarakat desa yang potensial dan kooperatif untuk dilatih sebagai Kader Keamanan Pangan Desa, karena dari kader inilah nanti yang diharapkan dapat menyebarluaskan pesan keamanan pangan kepada komunitas masyarakat lebih luas.	implementasi Keamanan Pangan di Desa. Ini dapat dilakukan dengan memantau kelengkapan dokumen untuk tahapan monev yang meliputi SK TKPD dan Kader, pembuatan Profil Desa dan Rencana Aksi terkait keamanan pangan di Desa yang diharapkan dapat diselesaikan di bulan Juli, sesuai tahapan Monev Program.		Aksi Desa terkait implementasi Keamanan Pangan di Desa. Ini dapat dilakukan dengan memantau kelengkapan dokumen untuk tahapan monev yang meliputi SK TKPD dan Kader, pembuatan Profil Desa dan Rencana Aksi terkait keamanan pangan di Desa yang diharapkan dapat diselesaikan di bulan Juli, sesuai tahapan Monev Program.				

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Juli	Monev untuk 5 desa telah dilakukan	Berkoordinasi dengan desa dan stakeholder terkait rencana aksi yang telah disusun	Juli 2025	Monev telah dilaksanakan dan melanjutkan koordinasi untuk implementasinya			Tahapan Monev telah terlaksana 100% (20% dari bobot tahapan)	Close
		Agustus	Monev untuk 5 desa telah dilakukan dan lengkap, pengawalan desa intervensi 2024 belum dilakukan	Berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk implementasi selanjutnya dari Desa Pangan Aman	Agustus 2025	Telah dilakukan koordinasi dengan Sekda Kab Lamsel dan lintas sektor terkait implementasi Prohram Nasional termasuk Desa Pangan Aman			Koordinasi telah dilakukan di Desa, melengkapi Profil Desa dan Pengawalan Desa intervensi 2024 di Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan	Close
		September	Pengawalan untuk 9 desa intervensi tahun 2024 telah dilakukan dan lengkap	Berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk implementasi Rencana Aksi Desa intervensi	September 2025	Koordinasi dengan Dinas PMD untuk implementasi rencana aksi Desa Pangan Aman			Telah diberikan sertifikat Desa Pangan Aman kepada 5 Desa intervensi di Kabupaten Lampung Selatan	Close
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rekomendasi dari tahun 2024	Pasar yang sudah diintervensi tahun sebelumnya banyak mengalami pergantian petugas, sehingga harus dilakukan	Akan terus dilakukan koordinasi yang efektif kepada Dinas Perdagangan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengawal	triwulan 3 tahun 2025	- Koordinasi intensif untuk menentukan jadwal Advokasi, dan melibatkan salah satunya Pasar Kalianda yang			Pengawalan Pasar belum dilakukan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			pengawasan baik secara langsung atau melalui komunikasi daring	pasar-pasar yang telah diintervensi tahun-tahun sebelumnya, serta menghimbau agar program dilaksanakan di pasar lain di luar pasar yang sudah diintervensi (proses replikasi).		sudah pernah diintervensi program PPABK pada tahun 2017 - Pengawasan Pasar akan dilakukan sampai bulan Juli 2025				
		Januari	Telah dilaksanakan survey terhadap 1 pasar, dimana pada awal ada tahapan survey pasar, dengan efisiensi anggaran tidak ada tahapan ini, target awal 5%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Close
		Februari	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO			Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Close
		Maret	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai			Advokasi belum terlaksana, tahapan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)		juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO			selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	
	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Target pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu target pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Unit Pengampu Pusat yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI. Untuk pelaksanaan tahap awal adalah kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada rentang waktu Januari - April 2025 (TW 1 - TW 2). Dengan adanya Inpres No. 1 tahun 2025 berkaitan efisiensi anggaran yang cukup signifikan	Telah dilakukan perencanaan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar pada bulan April 2025 (TW 2). Setelah dilakukan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu bimbingan teknis dan dan penyuluhan komunitas pasar serta sosialisasi keamanan pangan pasar pada bulan Mei 2025. Pengawasan keamanan pangan di pasar direncanakan bulan Juni 2025 serta	TW 2	Telah dilakukan perencanaan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar pada bulan April 2025 (TW 2). Setelah dilakukan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu bimbingan teknis dan dan penyuluhan komunitas pasar serta sosialisasi keamanan pangan pasar pada bulan Mei 2025. Pengawasan keamanan pangan di pasar			Telah dilakukan perencanaan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar pada bulan April 2025 (TW 2). Setelah dilakukan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu bimbingan teknis dan dan penyuluhan	Close	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			menyebabkan adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kegiatan Program berupa pengurangan tahapan dan beberapa kali revisi anggaran sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus. Juga dengan adanya pelantikan kepala daerah di bulan Februari 2025 dan padatnya kegiatan kepala daerah di bulan Ramadhan dan ditambah cuti bersama, sehingga dilakukan revisi capaian persentase tahapan pelaksanaan kegiatan ini. Awalnya target ditetapkan sudah dilaksanakan advokasi dengan nilai 25% tetapi telah dilakukan perubahan	pengawasan program pasar pangan aman berbasis komunitas pada bulan Juli 2025.		direncanakan bulan Juni 2025 serta pengawasan program pasar pangan aman berbasis komunitas pada bulan Juli 2025.			komunitas pasar serta sosialisasi keamanan pangan pasar pada bulan Mei 2025. Pengawasan keamanan pangan di pasar direncanakan bulan Juni 2025 serta pengawasan program pasar pangan aman berbasis komunitas pada bulan Juli 2025.	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			berdasarkan permasalahan di atas menjadi 0% di TW 1 tetapi di dalam perhitungannya masih tertulis 25% pada TW 1. Kegiatan forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar belum terlaksana maka tahapan selanjutnya belum bisa dilaksanakan karena kegiatan ini membangun komitmen dan koordinasi di antara lintas sektor di daerah dalam menghasilkan peta program intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas akan menjadi langkah awal yang terarah dalam melaksanakan program pasar pangan aman berbasis komunitas.							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Sasaran ini mendukung sasaran strategis BPOM yaitu meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan.							
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Pada TW II tahun 2025 direncanakan 4 tahapan pelaksanaan program pasar aman berbasis komunitas yaitu forum advokasi komitmen pemda dan lintas sektor pasar; bimtek dan penyuluhan komunitas pasar; sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar serta pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dapat terlaksana dengan baik disebabkan perencanaan dan koordinasi yang baik dengan dinas	Koordinasi yang lebih baik lagi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Selatan, kepala UPT Pasar Natar dan petugas pasar Natar.	TW III	Koordinasi yang lebih baik lagi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Selatan, kepala UPT Pasar Natar dan petugas pasar Natar.			Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas telah selesai dilaksanakan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			perdagangan kab. Lampung Selatan, kepala UPT Pasar Natar dan petugas pasar Natar.							
		Juli	Kegiatan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Juli 2025	Melakukan koordinasi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung, Ka UPT Pasar Liwa, pasar Tamin, pasar Cimeng	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025			Terlaksananya pengawalan pasar intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
		Agustus	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Melakukan koordinasi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung, Ka UPT Pasar Liwa, pasar Tamin, pasar Cimeng	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025			Terlaksananya pengawalan pasar intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
21	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Februari	Penyusunan RAPK untuk pendampingan UMK Pangan Olahan berdasarkan tahapan pendampingan tertuang dalam Kepka BPOM no. 82 tahun 2022 sebagai berikut: 1. Penetapan target UMK pangan olahan	1. Usulan revisi RAPK untuk IKU 18 (Persentase UMKM memperoleh rekomendasi Sertifikasi CP OBA, Kos, dan IP-CPPOB) sesuai dengan tahapan pendampingan yang	Desember 2025		1. Penyampaian usulan revisi RAPK 2. Dilakukan penyesuaian realisasi tahapan Pendampingan sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan	Desember 2025	Pendampingan UMK Pangan Olahan akan terlaksana sesuai perencanaan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			2. Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMK pangan olahan 3. Fasilitasi Penerapan CPPOB 4. Coaching Clinic aplikasi e-sertifikasi CPPOB 5. Coaching Clinic aplikasi e-Registration 6. Pemeriksaan sarana oleh UPT BPOM 7. Pelaporan 8. Monitoring pasca pendampingan	tertuang dalam Manual IKU yang telah ditetapkan 2. Realisasi Pendampingan UMK Pangan Olahan sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan sebagai berikut: 2.1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2.2. Penetapan UMK pangan olahan target 2.3. Bimtek CPPOB 2.4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 2.5. Monev dan Pelaporan						
		Lapkin Interim TW I- II Tahun 2025	Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan tahapan pendampingan UMKM OBA, Kosmetik, dan Pangan Olahan dengan capaian 42,6% yakni Tercapai/Melampaui Target.	Untuk meningkatkan capaian kinerja Meningkatkan Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu, maka dilakukan beberapa rencana aksi: Pendampingan UMKM dengan	TW 2	Pendampingan UMKM dengan tahapan dan timeline sesuai juknis pusat Pelaksanaan pendampingan UMK Pangan Olahan disinergikan dengan kegiatan magang Mahasiswa dalam			Pendampingan UMKM dengan tahapan dan timeline sesuai juknis pusat Pelaksanaan pendampingan UMK Pangan Olahan disinergikan dengan kegiatan magang	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut sebagai berikut: 1. Telah dilakukan penetapan target 1 UMKM Obat Bahan Alam dan telah dilakukan pendampingan terhadap UMKM yakni hingga pelaksanaan bimbingan teknis 2. Realisasi tahapan pendampingan terhadap target 1 UMKM Kosmetika hampir seluruhnya telah terlaksana di TW I yakni telah dilakukan pendampingan terhadap UMKM hingga memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB di bulan Maret 2025. Faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah karena UMKM	tahapan dan timeline sesuai juknis pusat Pelaksanaan pendampingan UMK Pangan Olahan disinergikan dengan kegiatan magang Mahasiswa dalam program SAPA Kampus		program SAPA Kampus			Mahasiswa dalam program SAPA Kampus	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Kosmetika telah siap melalui seluruh tahapan pendampingan yang telah ditetapkan sehingga dapat terealisasi lebih cepat dari perencanaan.							
		Juni	2 UMK pengganti yang diperoleh di bulan Juni 2025 belum mendapatkan Bimtek CPPOB	Melaksanakan Bimtek CPPOB untuk 2 UMK pengganti yang diperoleh di bulan Juni 2025	Agustus 2025	Melaksanakan Bimtek CPPOB untuk 2 UMK pengganti yang diperoleh di bulan Juni 2025			Seluruh UMK Pendampingan Pangan Olahan (19 UMK) telah memperoleh Bimtek CPPOB	Close
		Juli	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	Sesuai renlak	Pendampingan UMKM sesuai renlak			Pendampingan UMKM sesuai renlak	Close
		Agustus	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	Sesuai renlak	Pendampingan UMKM sesuai renlak			Pendampingan UMKM sesuai renlak	Close
		September	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	Sesuai renlak	Pendampingan UMKM sesuai renlak			Pendampingan UMKM sesuai renlak	Close
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Februari	Operasi intelijen belum banyak dilakukan karena adanya efesiensi anggaran	Intensifikasi penelusuran siber dan operasi intelijen dan mengusulkan untuk mengurangi jumlah target perkara	pada akhir TW1	Pengurangan target perkara, dengan tetap melakukan kegiatan investigasi dan patroli siber			kegiatan operasi intelijen telah dilakukan dengan efesiensi anggaran dengan pengurangan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
	BBPOM di Bandar Lampung								target perkara semula 3 menjadi 1 perkara	
		Maret	Operasi penindakan belum dilakukan karena laporan informasi dari hasil operasi intelijen belum memadai/ informasi belum A1	Lakukan pendalaman informasi dari hasil operasi intelijen sesuai anggaran yang ada	pada akhir TW 1	Menyusun kembali rencana kegiatan sesuai dengan anggaran setelah buka blokir dan melaksanakan kegiatan investigasi (Operasi Intelijen)			Jumlah target perkara kembali semula menjadi 3 perkara	Close
		April	Nilai BB hasil intensifikasi penindakan kecil sehingga belum layak untuk ditingkatkan menjadi pro justitia	Intensifikasi penelusuran siber dan operasi intelijen, koordinasi dengan lintas sektor terkait peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara online melalui jasa ekspedisi	30 Mei 2025	Melaksanakan patroli siber dan operasi intelijen secara intensif, Melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi terkait peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara online			Terpenuhinya target perkara	Close
		Mei	Akan melakukan operasi penindakan terhadap sarana yang telah ditargetkan	Koordinasi dengan JPU dan Korwas PPNS terkait perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung	30 Juni 2025	Melakukan koordinasi yang intensif dengan JPU dan Korwas PPNS terkait perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung			Proses penyidikan sudah tahap 1	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Juni	a. Telah dilakukan operasi penindakan terhadap hasil operasi intelijen yang menjadi target, b. Pengiriman berkas perkara (tahap I) ke Jaksa	a. Perlu dukungan informasi intelijen berupa informasi dengan validitas tinggi (A1) terhadap sarana yang menjadi target, b. Pemenuhan P.19 oleh Penyidik atas petunjuk yang diberikan oleh Jaksa	31 Juli 2025	a. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Badan POM terkait pendalaman informasi akun-akun yang diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan, b. Melakukan koordinasi dengan Jaksa dalam rangka pemenuhan kelengkapan formil maupun materiil atas petunjuk Jaksa yang menangani perkara tersebut			Perkara P.21 dan tahap 2	Close
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Kurangnya informasi intelijen yang akurat dan valid terkait kejahatan obat dan makanan (A1) sehingga kegiatan operasi penindakan yang akan dilakukan menjadi tidak efektif dimana operasi	1. Lakukan intensifikasi penelusuran siber dan operasi intelijen terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara online dengan dukungan informasi	31 Juli 2025	1. Melakukan penelusuran siber dan operasi intelijen terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara online terhadap sarana yang menjadi target 2.			Perkara pertama telah tahap II. Telah dilakukan operasi penindakan terhadap target hasil penelusuran siber dan operasi intelijen,	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			penindakan sangat tergantung dengan informasi awal yang memadai disebabkan oleh petugas yang kurang kapabel. Untuk meningkatkan kapabilitas petugas, substansi penindakan telah melakukan sharing knowledge dan berbagi pengalaman dalam hal pengumpulan, analisis, penggunaan data dan informasi yang diterima agar dapat dikelola secara efektif. Dengan peningkatan kapabilitas petugas dalam menganalisis, diharapkan dapat lebih cepat dan tepat untuk merespon situasi sehingga data yang dikelola dapat disajikan dengan benar. Selain itu informasi yang bersumber dari data	intelijen berupa informasi dengan validitas tinggi (A1) terhadap sarana yang menjadi target. 2. Koordinasi dengan JPU, Korwas PPNS dan jasa ekspedisi terkait penyelidikan dan penanganan perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung. 3. Pemenuhan P.19 oleh Penyidik atas petunjuk yang diberikan oleh Jaksa agar penyidikan perkara dinyatakan lengkap (P.21)		Melakukan koordinasi dengan JPU, Korwas PPNS dan jasa ekspedisi terkait penyelidikan dan penanganan perkara yang ditangani Penyidik. 3. Penyidik telah melakukan pemenuhan P-19 atas petunjuk Jaksa sehingga penyidikan perkara pertama dinyatakan lengkap (P-21)			sehingga mendapatkan perkara kedua.	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			terbuka atau berasal dari masyarakat belum begitu kuat untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan operasi penindakan. Pelaku kejahatan siber peredaran obat dan makanan sering mengganti modus operandi, nama akun, platform, atau menggunakan proxy/VPN untuk menghindari deteksi terhadap keberadaan dan identitas pelaku kejahatan.							
	Juli	Adanya P.19 terhadap perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung, Telah dilakukan operasi penindakan terhadap hasil operasi intelijen yang menjadi target	Koordinasi dengan Korwas PPNS dan Jaksa terkait proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung	31 Agustus 2025	Koordinasi dengan Korwas PPNS dan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung			Proses penyidikan perkara kedua sesuai timeline	Close	
	Agustus	Pekara pertama telah tahap 2, SPDP perkara kedua sudah disampaikan	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS	30 September 2025	Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara			Perkara kedua P21	Close	

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				BBPOM di Bandar Lampung		yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung				
		September	Perkara kedua telah tahap 1	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	31 Oktober 2025		Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung		Perkara kedua telah tahap 2	Progres
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Intensifikasi penelusuran dalam kegiatan patroli siber merujuk pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pelacakan, pemantauan, serta penindakan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal atau mencurigakan pada media daring terutama pada marketplace daring. Keberhasilan ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah dan kapabilitas personel yang melakukan kegiatan	1. Kerjasama antar instansi pemerintah seperti Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga terkait lainnya untuk terus ditingkatkan. 2. Petugas penerima Informasi dari masyarakat untuk dapat mengelola dan mengidentifikasi informasi yang diterima secara detail, sehingga efektif dan efisien untuk menindaklanjuti informasi tersebut.	30 Mei 2025	Telah dilakukan kolaborasi dengan Polri terkait bantuan penelusuran pelaku kejahatan obat dan makanan melalui media daring (cek post).	Akan dibuat Nota Dinas ke substansi infokom (petugas penerima informasi dari masyarakat) agar dalam menerima informasi tersebut lebih lengkap dan rinci (nama, alamat, nomor kontak, komoditi) yang dilaporkan	31 Oktober 2025	Telah didapatkan hasil cekpost dari Polri dan petugas telah melakukan verifikasi lokasi terhadap sarana yang ditargetkan.	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			siber tersebut. Ketepatan waktu pelaporan oleh petugas siber sesuai time line menjadi faktor penilaian. Untuk meningkatkan kapabilitas personel siber, substansi penindakan telah melakukan pelatihan berupa sharing knowledge dan berbagi pengalaman agar dalam hal pengumpulan, analisis, penggunaan data dan informasi yang diterima dapat dikelola secara efektif. Dengan peningkatan kapasitas dalam menganalisis petugas diharapkan dapat lebih cepat dan tepat dalam merespon situasi sehingga data yang dikelola dapat disajikan dengan benar.							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		April	Laporan selalu dikirimkan sesuai timeline	Mengirimkan laporan sesuai timeline	30 April 25	Melaporkan kegiatan patroli siber sesuai timeline			Target tercapai	Close
		Mei	Laporan selalu dikirimkan sesuai timeline	Mengirimkan laporan sesuai timeline	31 Mei 2025	Melaporkan kegiatan patroli siber sesuai timeline			Terget Tercapai	Close
		Juni	Laporan selalu dikirimkan sesuai timeline	Mengirimkan laporan sesuai timeline	30 Juni 2025	Melaporkan kegiatan patroli siber sesuai timeline			Terget Tercapai	Close
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Penjadwalan kegiatan patroli siber yang lebih intensif dan terencana dalam melakukan penelusuran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pelacakan, pemantauan, serta penindakan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal atau mencurigakan pada media daring terutama pada marketplace daring. Keberhasilan ini juga disebabkan oleh kapabilitas personil yang melakukan kegiatan	1. Kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga terkait lainnya untuk terus ditingkatkan. 2. Petugas penerima Informasi dari masyarakat untuk dapat mengelola dan mengidentifikasi informasi yang diterima secara lengkap, sehingga proses tindak lanjut terhadap informasi yang diterima lebih	30 Mei 2025	1. Telah dilakukan kolaborasi dengan Polri terkait bantuan penelusuran pelaku kejahatan obat dan makanan melalui media daring (cek post). 2. Melakukan pengiriman laporan patroli dan profiling siber sesuai timeline			Target tercapai	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			patroli siber dan pelaporan oleh petugas siber sudah sesuai timeline. Untuk meningkatkan kapabilitas personil siber, substansi penindakan telah melakukan sharing knowledge dan berbagi pengalaman dalam hal pengumpulan, analisis, penggunaan data dan informasi yang diterima dapat dikelola secara efektif. Dengan peningkatan kapabilitas petugas dalam menganalisis diharapkan dapat lebih cepat dan tepat untuk merespon situasi sehingga data yang dikelola dapat disajikan dengan benar.	efektif dan efisien. 3. Mengirimkan laporan patroli dan profiling siber sesuai timeline setiap bulan.						
		Juli	data patroli siber dilaporkan sebelum timelime	Mengirimkan laporan sesuai timeline	31 Juli 2025	Melakukan input data pada aplikasi berupa laporan patroli siber			Target Tercapai	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						maksimal tanggal 25 bulan berjalan				
		Agustus	Laporan Patroli Siber dan Profiling melalui aplikasi sesuai timeline	Laporan dikirim sebelum timeline	31 Agustus 2025	Melakukan input data pada aplikasi berupa patroli siber dan profiling maksimal tanggal 25 bulan berjalan			Target Tercapai	Close
		September	Laporan Patroli Siber dan Profiling melalui aplikasi sesuai timeline	Laporan dikirim sebelum timeline	30 September 2025	Melakukan input data pada aplikasi berupa patroli siber dan profiling maksimal tanggal 25 bulan berjalan			Target Tercapai	Close
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	Maret	Nilai IPP Tercapai sesuai target	Membbackup update di subsite BBPOM Lampung dan tetap menyiapkan draft untuk SIPPN	1 bulan	1. Membuat konten atau materi tentang pelayanan publik yang ditayangkan di media sosial yang ada , serta memutarakan sebagai iklan layanan masyarakat pada saat sebelum kegiatan KIE berlangsung		1 bulan	Target IPP Tercapai	closed
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Upaya pencapaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di	Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka	Desember 2025		1. Tetap melaksanakan layanan dengan		Target IPP Tercapai	closed

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Bandar Lampung Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan (SP) dilakukan dengan berpedoman kepada hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) BBPOM di Bandar Lampung yang dilaksanakan di Bulan Desember 2024, yang diikuti oleh pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa. Standar pelayanan juga dipublikasikan pada media secara non-elektronik, media social dan subsite. Selain SP, Unit BBPOM di Bandar Lampung mempunyai Maklumat pelayanan	peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan layanan dengan anggaran yang minim 2. Mengembangkan inovasi yang sudah ada dan menciptakan inovasi baru yang terukur dan berdampak langsung kepada Masyarakat 3. Mengupdate informasi di subsite sebagai pengganti SIPPN			anggaran yang ada , dilakukan pemilihan proritas 2. Selalu meimplementasikan inovasi yang ada dan mengembangkan nya 3. Telah membuat draft materi yang akan diupload di SIPPN sembari menunggu perbaikan dari Kemenpan			

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			yang berisi pernyataan tertulis dengan keseluruhan rincian kewajiban, janji yang tedapat dalam standar pelayanan dan kesiapan menerima sanksi bila melanggar yang akan ditetapkan Januari 2025 serta dipublikasi dalam media non elektronik dan elektronik. 2. BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan SKM secara periodik tahunan baik langsung dan/atau online yang dikoordinir oleh Inspektorat I. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung juga melakukan SKM secara mandiri setiap bulan beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM bulan sebelumnya dimana nilai SKM juga dipublikasikan pada							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			media non elektronik, elektronik, media sosial, dan website, Pelaksanaan SKM di Tahun 2025 juga dibagi penanggung jawabnya langsung dari ke-3 jenis Layanan (Substansi Infokom, setrtifikasi dan pengujian) 3. BBPOM di Bandar Lampung telah menetapkan kode etik yang berisi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan di lingkungan BBPOM Manado. Selain itu juga dilakukan perbaikan kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi sesuai rekomendasi. 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			(SIPP) BBPOM di Bandar Lampung merupakan sistem nformasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional dan dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap subsite BBPOM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung senantiasa melaksanakan pemutakhiran informasi rutin melalui subsite lampung.pom.go.id termasuk didalamnya konsistensi terhadap keterbukaan Informasi Publik di BBPOM di							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Bandar Lampung, dimana tahun lalu BBPOM di Bandar Lampung telah berhasil meraih juara 1 terbaik PPID untuk kategori Balai Besar oleh Badan POM , meraih Gold Winner dalam anugerah Humas Indonesia dan menjadi PPID Informatif dengan nilai 100 dari Komisi Informasi Provinsi. 5. BBPOM di Bandar Lampung telah menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang berkualitas baik secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, maupun secara elektronik melalui SMS/telepon ke Layanan Call Me Back Ulun Lampung ke nomer 0821 8080							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			6008 dan SPAN LAPOR sebagai media pengaduan yang harus digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah serta dilakukan pengelolaan melalui monitoring dan evaluasi dengan penambahan analisis hambatan/kendala serta rencana aksi tindak lanjutnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi dan pengaduan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi SIMPEL LPK, Simetris dan RHPK serta RAPK. 6. UPP BBPOM di Bandar Lampung memiliki satu inovasi unggulan dibidang pelayanan publik yaitu Layanan Call Me							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Back Ulun Lampung, Layanan Tour Edukasi “ Galaksi” , Layanan PIOM PINTAS , QRIS-PUSAKA , Live Bagi Bagi KOMISI dan One Day Service untuk Layanan Pengujian sampel pihak ke-3. , Inovasi PIOM PINTAS pelaksanaannya bukan hanya sekedar KIE dan kerjasama dengan ASDP , namun termasuk melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di Pintu Masuk Sumatera dengan bekerja sama dengan Bea Cukai, BNN,dan Kepolisian 7. Terhadap Sarana Prasarana , BBPOM di Bandar Lampung terus menerus melakukan pemeliharaan 8. Melaksnakan Pelatihan internal							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			petugas layanan ter-SBM ‘ 9. Adanya program Reward dan Punishment Petugas layanan ter SBM							
		Juli	Nilai IPP Tercapai sesuai target	Mempertahankan aspek pemenuhan IPP	1 bulan	Pelaksanaan IPP sesuai rencana			Target IPP Tercapai	Close
		Agustus	Nilai IPP Tercapai sesuai target	Mempertahankan aspek pemenuhan IPP	1 bulan	Pelaksanaan IPP sesuai rencana			Target IPP Tercapai	Close
		September	Nilai IPP Tercapai sesuai target	Mempertahankan aspek pemenuhan IPP	1 bulan	Pelaksanaan IPP sesuai rencana			Target IPP Tercapai	Close
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung	Rekomendasi dari tahun 2024		Memastikan inovasi yang dibangun telah diimplementasikan dan memiliki dampak bagi unit kerja dalam penilaian dan pengendalian risik						
		Rekomendasi dari tahun 2024	Dalam monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik belum memuat monev atas daftar informasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik terhadap daftar informasi publik yang dipublikasi secara berkala, serta merta,	27 Maret 2025		Monitoring baru dilakukan dengan penarikan data dari apk Simpel LPK. Akan mengadakan pertemuan untuk pembahasan monev KIP TW 1 oleh Tim PPID	Mei 2025	Belum terlaksana	Progress

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				setiap saat, dan yang dikecualikan			BBPOM di Bandar Lampung			
	Rekomendasi dari tahun 2024			Memastikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja	28 Maret 2025	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan perencanaan			Target tercapai	Progress
	Rekomendasi dari tahun 2024			Menetapkan hasil penilaian dari pengguna layanan sebagai kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan						
	Januari	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai		Melakukan pembahasan pelaksanaan rekomendasi dari Inspektorat	28-Feb-25	Pembuatan SK tim RB Melakukan pembahasan rekomendasi Inspektorat secara detail			Target tercapai	Progres
	Februari	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai		Pemenuhan pengisian LKE dan data dukung sesuai rekomendasi tahun sebelumnya	15-Apr-25		Ketua Pokja RB mengkoordinir pengisian LKE Mengumpulkan data dukung untuk pengisian LKE	15-Apr-25	Target tercapai	Progres
	Maret	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai		Pemenuhan pengisian LKE dan	15-Apr-25		Ketua Pokja RB mengkoordinir	15-Apr-25	Target tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				data dukung sesuai rekomendasi tahun sebelumnya			pengisian LKE Mengumpulkan data dukung untuk pengisian LKE			
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) serta pemenuhan data dukung sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengisian LKE ZI dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh karyawan di bawah arahan pimpinan unit kerja. Setelah pengisian dilakukan, hasilnya direviu oleh	Diperlukan komitmen dari seluruh Pokja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Seluruh pokja telah diminta membuat back up data dukung LKE yang telah dikirim kepada Tim Penilai Internal dan mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI TW 2 sd TW 4 tahun 2025 secara akurat untuk mempermudah pengisian LKE di tahun 2026. Back up data di dokumentasikan dalam Aplikasiku.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			auditor internal sebagai bentuk quality control sebelum dikirimkan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Proses reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan akurat, relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan pengisian LKE dan pemenuhan data dukung dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh TPI, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	Selain itu, pada LKE tahun 2025 juga telah dilakukan perbaikan terhadap hasil penilaian (rekomendasi TPI) tahun 2024 sehingga diharapkan nilai pembangunan ZI tahun 2025 dapat tercapai sesuai target. Dalam rangka memenuhi ketepatan waktu penyampaian LKE ke Inspektorat, Tim Auditor agar menyusun jadwal mulai dari pengisian LKE sampai dengan perbaikan dan reviu kembali oleh Tim Auditor. Sebelum melaksanakan reviu, perlunya dilakukan penyamaan persepsi Tim Auditor dan Seluruh Pokja RB						
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilaksanakan desk	- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tim RB						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dengan Inspektorat terkait kegiatan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) serta pemenuhan data dukung sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari hasil Desk dilakukan perbaikan pengisian LKE ZI dan melengkapi data dukung dengan tenggat waktu 24 jam dihitung setelah Desk selesai dilakukan. Desk dilakukan dengan melibatkan seluruh Tim RB di bawah arahan pimpinan unit kerja. Setelah perbaikan	ZI melalui sosialisasi, sharing seSKion oleh Balai lain yang telah memperoleh WBBM - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman auditor internal melalui Bimbingan teknis/pelatihan						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dilakukan, hasilnya direviu kembali oleh auditor internal sebagai bentuk quality control sebelum dikirimkan kembali kepada Tim Penilai Internal (TPI). Proses reviu proses perbaikan ini bertujuan untuk memastikan kembali bahwa seluruh data yang disampaikan akurat, relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan perbaikan pengisian LKE dan pemenuhan data dukung dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh TPI, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			pemerintahan yang baik dan akuntabel.							
		Juli	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai	Pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas	31 Juli 2025	Ketua Pokja mengkoordinir pengisian rencana kerja pembangunan Zona Integritas			Target tercapai	Close
		Agustus	Nilai RB tahun 2025 tidak tercapai	Pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas	31 Agustus 2025	Ketua Pokja mengkoordinir pengisian rencana kerja pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian RB			Target tercapai	Close
		September	Nilai RB tahun 2025 tidak tercapai	Pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas	30 September 2025	Ketua Pokja mengkoordinir pengisian rencana kerja pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian RB			Target tercapai	Close
26	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	Januari	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	25 Januari 2025	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman			Target tercapai,, pelaporan sesuai time line	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						laporan sesuai time line				
		Februari	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	25 Februari 2025	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line			Target tercapai,, pelaporan sesuai time line	Progres
		Maret	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	30 Maret 2025	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line			Target tercapai,, pelaporan sesuai time line	Progres
				Membuat pedoman Reward dan punishment kinerja	30 Maret 2025				target tercapai	Progres
				Tim penyusunan laporan kinerja telah mengikuti pengembangan kompetensi secara online dengan			Beberapa tim akuntabilitas belum mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP	TW 2 2025		Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				memanfaatkan Ideas melalui SIASN						
				Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib			Pemantauan pengisian Simetris	tw 4 2025		Progres
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Pada TW 1 tahun 2025 telah dilakukan penyusunan perencanaan kinerja Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dengan melibatkan tim penyusun Renstra dari masing-masing substansi BBPOM di Bandar Lampung. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan panduan bagi pimpinan UPT dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam	1. Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran. 2. Melaksanakan SOP mikro Reward						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			rencana kerja tahunan. Selain itu, Renstra disusun untuk menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja UPT dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Menyusun kertas kerja penetapan target IKSK tahun 2025-2029 IKU Utama dan Direktif penugasan Balai Besar POM di Bandar Lampung. 2. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disahkan. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pada TW 1 telah	dan punishment pegawai secara individu sesuai dengan pedoman 3. Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP 4. Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan 5. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP tahun 2024 Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			disusun pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan dalam SOP Mikro 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja (IKU) dilaksanakan setiap bulan secara rutin dengan keterlibatan pimpinan UPT dalam setiap monev tersebut. 4. Pelaporan kinerja dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu.							
		April	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline			1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 1 2. Pengiriman laporan sesuai time line	20-Apr-25	Target TW 1 NKO tidak tercapai (butuh perbaikan), pelaporan sesuai time line	Progres
		Mei	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan			1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap	30-May-25	Target TW 1 NKO tidak tercapai (butuh	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline			IKU yang tidak tercapai pada TW 1 2. Pengiriman laporan sesuai time line		perbaikan), pelaporan sesuai time line	
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	- Pada TW II tahun 2025 Badan POM melalui Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan Bimtek Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dengan melibatkan tim penyusun Renstra dari masing-masing substansi BBPOM di Bandar Lampung dan Ketua Tim. - Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan panduan bagi pimpinan UPT dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan	- Melaksanakan evaluasi SAKIP dengan melakukan pengisian LKE disertai data dukung - Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu, Renstra disusun untuk menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja UPT dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. - Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disahkan. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. - Implementasi SOP Mikro tentang pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja - Monitoring dan evaluasi capaian							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			kinerja (IKU) dilaksanakan setiap bulan secara rutin dengan keterlibatan pimpinan UPT dalam setiap monev tersebut. - Pelaporan kinerja dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu.							
		Juli	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	31 Juli 2025		1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 2 2. Pengiriman laporan sesuai time line	31 Juli 2025	Target TW 2 NKO kriteria Baik (untuk ditingkatkan), pelaporan sesuai time line	Progres
		Agustus	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	31 Agustus 2025		1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 2 dan bulan Agustus 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	31 Agustus 2025	Target TW 2 NKO kriteria Baik (untuk ditingkatkan), pelaporan sesuai time line	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		September	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	30 September 2025		1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 2 dan bulan September 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	30 September 2025	Target TW 2 NKO kriteria Baik (untuk ditingkatkan), pelaporan sesuai time line	Progres
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	Rekomendasi dari tahun 2024		Dilakukan monitoring secara ketat terhadap pengelolaan UP/TUP sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan			Monitoring UP/TUP	Des 2025		Progres
		Rekomendasi dari tahun 2024		Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisi dan adanya keterlambatan penyampaian SPM			Monitoring revisi dan penyampaian SPM	Desember 2025		Progres
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada TW 1 tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran beberapa kali. Adanya efisiensi anggaran ini secara normal akan berakibat capaian kinerja anggaran tidak	1. Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas 2. Melakukan penghematan sumber daya energi dan air						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			sesuai dengan target yang diharapkan untuk capaian nilai revisi anggaran, nilai halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, UP dan TUP serta capaian output. Dalam keadaan demikian dari Kementerian Keuangan memberikan relaksasi sehingga capaian nilai IKPA untuk parameter tersebut sebesar 100.	untuk menekan biaya 3. Menyusun kembali perencanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia 4. Adanya kebijakan baru terkait perpajakan yang dimulai pada TW 1 tahun 2025, perlu dilakukan sosialisasi coretax perpajakan						
		April	Relaksasi penilaian IKPA	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD, penyerapan anggaran, UP/TUP)			Memutakhirkan RPD TW 2 dan memantau pelaksanaannya Memonitor penyerapan anggaran memantau UP dan TUP	Apr-25	Target nilai IKPA tercapai	Progres
		Mei	Relaksasi penilaian IKPA	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD,			Memantau pelaksanaan RPD Memonitor penyerapan anggaran	Mei 2025	Target nilai IKPA tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				penyerapan anggaran)			memantau UP dan TUP			
	Lapkin Interim TW II Tahun 2025		Pada TW 2 tahun 2025 masih terdapat efisiensi anggaran pada belanja pegawai. Adanya efisiensi anggaran ini secara normal akan berakibat capaian kinerja anggaran tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Penilaian IKPA pada TW 2, berdasarkan penilaian 8 parameter IKPA, terdapat nilai yang kurang dari 100 yaitu nilai halaman III DIPA, sedangkan 6 parameter lainnya mendapatkan nilai 100 pada penyerapan anggaran, Revisi anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP dan Capaian Output. Satu parameter yaitu	- Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas. - Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya. - Pemantauan parameter penilaian IKPA TW 2 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi minus pada belanja barang dan deviasi plus pada belanja pegawai dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 3 awal bulan Juli dilakukan						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			Dispensasi SPM akan dinilai di akhir tahun anggaran.	pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.						
		Juli	Relaksasi penilaian IKPA	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD)	31 Juli 2025		Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	31 Juli 2025	Target nilai IKPA tercapai	Progres
		Agustus	Nilai IKPA RPD turun	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD)	31 Agustus 2025		Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	31 Agustus 2025	Target nilai IKPA tercapai	Progres
		September	Nilai IKPA RPD turun	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD)	30 September 2025		Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	30 September 2025	Target nilai IKPA tercapai	Progres
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung	Januari	Identifikasi risiko sudah dilakukan dan dilaporkan ke SAPA APIP tepat waktu (20 Januari 2025)	Dilakukan pemantauan terhadap pengendalian yang sudah direncanakan / dilakukan	20 Juli 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Target tercapai	Progres
		Februari	Identifikasi risiko sudah dilakukan dan dilaporkan ke SAPA APIP tepat waktu (20 Januari 2025)	Dilakukan pemantauan terhadap pengendalian yang	20 Juli 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Target tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				sudah direncanakan / dilakukan						
		Maret	Daftar Risiko sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 januari 2025	RHK yang belum ada identifikasi risiko nya bisa di lakukan identifikasi risiko nya dan nanti dilakukan upload ke SAPA APIP di TW 3 (20 Juli 2025)	20 Juli 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Target tercapai	Progres
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Pada tahun 2024 nilai Indeks manajemen Risiko yang diperoleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 2,844 dengan tingkat maturitas Risk Aware. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 2,9. Upaya pencapaian Indeks manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: Melakukan rivi u dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian	Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian Indeks Manajemen Risiko sekaligus untuk menjawab kelemahan penerapan manajemen risiko dari hasil penilaian inspektorat adalah sebagai berikut: 1. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			inspektorat pada desk tahun 2024. Dari hasil penilaian inspektorat ada beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen risiko yang ada di BBPOM bandar Lampung, diantaranya: 1. Perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko belum dilakukan secara berkesinambungan; 2. Identifikasi risiko belum dilakukan secara komprehensif dikarenakan masih terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai target; 3. Penilaian setiap risiko belum disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai;	telah dilakukan secara berkesinambungan; 2. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan tercapai; 3. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai; 4. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; 5. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			4. Pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya secara aktif telah melibatkan auditor internal sebagai lini kedua; 5. Proses reviu risiko belum sepenuhnya memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit; Program/proyek baru belum seluruhnya telah dikelola ke dalam manajemen risiko.	audit dalam proses reviu risiko; Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko.						
		April	Daftar Risiko sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 januari 2025	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)			Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 tercapai	Progres
		Mei	Daftar Risiko sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 januari 2025	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang			Melakukan pemantauan dan pengecekan data	20 Juli 2025	Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)			dukung pengendalian risiko			
		Juni	Daftar Risiko sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 januari 2025	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)			Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko dan menyusun Daftar Risiko untuk semester II	20 Juli 2025	Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 tercapai	Progres
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Pada tahun 2024 nilai Indeks manajemen Risiko yang diperoleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 2,844 dengan tingkat maturitas Risk Aware. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 2,9. Upaya pencapaian Indeks manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung Triwulan II tahun 2025 dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: 1. Melakukan rivi dan tindak lanjut terhadap	- Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko. - Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini dan memastikan data dukung nya.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			hasil penilaian inspektorat pada desk tahun 2024. Dari hasil penilaian inspektorat ada beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen risiko yang ada di BBPOM bandar Lampung, diantaranya: a. Perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko belum dilakukan secara berkesinambungan; b. Identifikasi risiko belum dilakukan secara komprehensif dikarenakan masih terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai target; c. Penilaian setiap risiko belum disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			yang memadai; d. Pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya secara aktif telah melibatkan auditor internal sebagai lini kedua; e. Proses reviu risiko belum sepenuhnya memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit; f. Program/proyek baru belum seluruhnya telah dikelola ke dalam manajemen risiko. 2. Melakukan penyusunan identifikasi risiko Identifikasi risiko yang ada di BBPOM Bandar Lampung dilakukan dan diperbaharui minimal 2 x dalam setahun dan dilaporkan							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			kepada inspektorat utama melalui SAPA APIP pada bulan Januari dan Juli. Pada TW II mulai disusun lagi identifikasi risiko yang akan dilaporkan pada bulan Juli maksimal tanggal 2025. Penambahan identifikasi risiko ini mengakomodir risiko-risiko yang belum teridentifikasi di TW 1 dan juga mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul dengan adanya IKU-IKU baru di tahun 2025 IKU yang belum ada identifikasi risikonya. Identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing pemilik risiko di substansi dengan melakukan rivi terhadap daftar risiko yang sudah ada apakah masih sesuai							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			atau sudah tidak relevan. Selain itu risiko bisa muncul dari adanya isu internal dan eksternal, hasil temuan audit ataupun pencapaian IKU tahun sebelumnya. Dari risiko yang sudah diidentifikasi selanjutnya dibahas dalam rapat anggota tim manajemen risiko dan juga ketua tim penanggung jawab IKU serta Kepala BBPOM di Bandar Lampung. 3. Sosialisasi manajemen risiko kepada pegawai baru Pada bulan Juni terdapat 3 pegawai baru (CPNS) dan sudah disosialisasikan terkait manajemen risiko dan juga pelatihan manajemen risiko melalui platform IDEAS.							

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Juli	Daftar Risiko semester 2 sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 Juli 2025 (ada penambahan daftar risiko di semester 2)	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)	31 Desember 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	31 Desember 2025	Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 tercapai	Progres
		Agustus	Daftar Risiko semester 2 sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 Juli 2025 (ada penambahan daftar risiko di semester 2)	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)	31 Desember 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	31 Desember 2025	Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 tercapai	Progres
		September	Daftar Risiko semester 2 sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 Juli 2025 (ada penambahan daftar risiko di semester 2)	Melakukan reviu risiko yang ada di daftar risiko semester 2	30 September 2025		masing-masing substansi mereviu risiko yang ada di substansi nya dan melengkapi data dukung nya	30 September 2025	Daftar Risiko semester 2 sudah di reviu dan di update perubahan nya dalam daftar risiko dan SAPA APIP sebagai tindak lanjut reviu risiko dan hasil Bimtek dengan inspektorat II)	Progres

Tindak Lanjut Rekomendasi Rincian Output

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
DR.3165.AEA - Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Juli	tidak ada kendala	Perencanaan Patroli Siber	Pelaksanaan Input data patroli siber	30-Sep-25	Rekomendasi akun produk sediaan farmasi dan pangan olahan pada e-commerce tidak memenuhi ketentuan maksimal tiap tanggal 25 bulan berjalan	target tercapai	close
DR.3165.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	April	Tidak ada kendala	Evaluasi perizinan dalam rangka Sertifikasi dilakukan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	April - Des 2025	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	target tercapai	progress
DR.3165.BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Sampai dengan Maret	1. Adanya Efisiensi anggaran 2. KAK dan Juknis KIE langsung baru disosialisasikan di pertengahan maret 2025, sehingga	Kegiatan KIE sesuai target	1. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam 2. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing	Desember 2025	1,Melaksanakan KIE langsung dengan tokoh masyarakat dan dilaksanakan dengan lokasi yang beragam 2. Menunjuk PJ Pelaksanaan Survey di setiap	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	closed

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
			kegiatan KIE langsung terutama dengan Tokoh masyarakat belum terlaksana di TW 1 1. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam 2. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE 3. Melakukan revisi anggaran, sehingga KIE Tomas diharapkan dapat terlaksana di TW 2 4. Merencanakan pelaksanaan KIE melalui publikasi obat		KIE 3. Melakukan revisi anggaran, sehingga KIE Tomas diharapkan dapat terlaksana di TW 2 4. Merencanakan pelaksanaan KIE melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik"		lokus kegiatan KIE, sehingga pengisian surveynya dapat berjalan dengan baik 3. Melaksanakan revisi anggaran dengan relaksasi anggaran KIE Tomas 4. Selain KIE di media sosial juga akan dilakukan KIE di Radio, Baliho/Spanduk , Media digital dll		

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
			dan makanan di media sosial dan media elektronik						
		April	Efisiensi Anggaran	KIE hanya ada KIE Tomas	Pelaksanaan KIE kerjasama dengan parekraf , Bank Indonesia untuk meminimalisir anggaran	Mei- Juni 2025	Melaksanakan KIE dengan bekerjasama dengan parekraf, Bank Indonesia untuk meminimalisir anggaran	target tercapai	closed
		Juli	Tidak ada kendala	KIE terlaksana	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan Parekraf dan juga Inovasi Tour Edukasi " Galaksi" (Galeri Layanan Edukasi	Juli 2025	Melaksanakan kie dalam rangka Pameran Aesthetic di MBK dalam bentuk talkshow, Menerima layanan tour edukasi Galaksi	target tercapai	closed
		Agustus	Tidak ada kendala	KIE terlaksana	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan Kwarcab Bandar Lampung dan juga Inovasi Tour Edukasi " Galaksi" (Galeri Layanan Edukasi)	Des 25	Melaksanakan kie dalam rangka SAKA POM di Kwarcab Bandar Lampung	target tercapai	closed

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
DR.3165.BKB - Pemantauan produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Sampai dengan Maret	Adanya efisiensi anggaran tidak mempengaruhi capaian RO	tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan	Merencanakan kegiatan prioritas	Desember 2025	Melaksanakan kegiatan sesuai prioritas	target RO tercapai	progres
		April	Efisiensi Anggaran	Beberapa kegiatan terpadu dan kegiatan lain tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas	31 September 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Progres
DR.3165.BMB - Komunikasi Publik	001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Sampai dengan Maret	Tidak ada kendala	Pelaksanaan layanan informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan sesuai target	Mempertahankan kinerja	Desember 2025	Pelaksanaan layanan informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan sesuai target	target RO tercapai	progres
		April	Efisiensi Anggaran	Tidak ada anggaran publikasi yang memadai	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas	s/d Des 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	closed
		Mei	Efisiensi Anggaran	Tidak ada anggaran publikasi yang memadai	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas	April-Des 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	closed
DR.3165.CAB - Sarana Bidang Kesehatan	001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Sampai dengan Maret	Kegiatan tidak dapat berproses karena adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal karena efisiensi anggaran	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Desember 2025	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	closed

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		April	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	April-Des 2025	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	Memiliki rekap kebutuhan dan rencana pengadaan	closed
DR.3165.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	Sampai dengan Maret	Kegiatan tidak dapat berproses karena adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal karena efisiensi anggaran	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Desember 2025	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	progres
		April	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	April-Des 2025	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	Memiliki rekap kebutuhan dan rencana pengadaan	Progress
DR.3165.CBV - Prasarana Bidang Kesehatan	001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Sampai dengan Maret	Kegiatan tidak dapat berproses karena adanya kebijakan	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal karena efisiensi anggaran	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih	Desember 2025	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	progres

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
			efisiensi anggaran		lanjut terkait relaksasi anggaran		lanjut terkait relaksasi anggaran		
		April	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	April-Des 2025	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	Memiliki rekap kebutuhan dan rencana pengadaan	Progress
DR.3165.PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sampai dengan Maret	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 tahun 2025 berdampak pada pengadaan suku cadang, reagen, media, glassware, K3, kalibrasi peralatan, dan pengembangan kompetensi personil	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal karena efisiensi anggaran	Melaksanakan kegiatan prioritas	Desember 2025	Menentukan kegiatan prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia (pengadaan glassware di TW 1)	Kegiatan prioritas terlaksana sesuai ketersediaan anggaran (pengadaan glassware di TW 1)	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		April	Relaksasi anggaran pada awal TW 2 menyebabkan perubahan rencana terkait pengadaan suku cadang, reagen, media, kalibrasi peralatan dan pengembangan kompetensi personel	Beberapa kegiatan bangkom tidak dapat diadakan sesuai rencana awal dan pengadaan reagen, media, suku cadang dilakukan sesuai anggaran efisiensi	- penyesuaian renlak pasca relaksasi anggaran - segera melakukan pengadaan reagen, media, suku cadang sesuai dengan anggaran pasca relaksasi anggaran	April - Des 2025	- Menyusun renlak baru pasca relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran - Melakukan pengadaan sesuai perencanaan	- pengadaan reagen, media dan suku cadang sudah berjalan - pengembangan kompetensi (IHT) akan di laksanakan di bulan mei (untuk lab pangan) dan di TW 3 untuk lab lainnya	Close
		Mei	-adanya penggantian narsum dan perubahan jadwal untuk IHT (bangkom lab pangan) sehingga IHT belum dapat dilaksanakan di Bulan Mei	Kegiatan bangkom yang direncanakan akan dilakukan di bulan Mei ditunda ke bulan Juni karena ada perubahan jadwal dari narasumber, pengadaan suku cadang, reagen, media dan juga peralatan laboratorium sudah dilaksanakan dan sebagian besar sudah diterima barang nya	- menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan bangkom untuk bulan Juni - memastikan pengadaan barang baik reagen, suku cadang dan peralatan berjalan sesuai perencanaan	Mei - Des 2025	- melakukan koordinasi dengan narasumber yang baru dan menentukan tanggal pelatihan untuk bulan Juni - Melaksanakan pengecekan terhadap barang-barang pengadaan yang sudah datang untuk memastikan spek sesuai	- pengadaan reagen, media dan suku cadang terlaksana sesuai kontrak - pengembangan kompetensi (IHT) akan di laksanakan di bulan Juni (untuk lab pangan) dan di TW 3 untuk lab lainnya	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		Juni	Tidak ada kendala	- pelaksanaan pengadaan reagen dan suku cadang sesuai dengan perencanaan - pengembangan kompetensi lab kimia pangan sudah terlaksana dengan baik di bulan juni	Melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan untuk bulan juli sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Mei - Des 2025	- Ada 2 pengembangan kompetensi di bulan juli yaitu lab kimia obat dan lab kimia obat bahan alam --> melakukan koordinasi dengan narasumber dan mempersiapkan semua keperluan pelatihan - mengawal proses pengadaan suku cadang dan reagen yang akan dilaksanakan di bulan Juli	- pengadaan reagen, media dan suku cadang terlaksana sesuai kontrak - pengembangan kompetensi (IHT) terlaksana di bulan Juli	Close
DR.3165.QCD - Perkara Hukum Badan Usaha	U28 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	Sampai dengan Maret	Laporan Informasi yang belum memadai karena adanya efisiensi anggaran	Kegiatan operasi intelijen belum optimal karena adanya efisiensi anggaran	Intensifikasi patroli siber dan operasi intelijen	TW2 tahun 2025	Melakukan pendalaman informasi hasil patroli siber dan operasi intelijen	Mendapatkan informasi yang memadai dan dapat ditindaklanjuti sehingga mendapatkan	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
								perkara sesuai target	
		April	laporan Informasi yang belum memadai	nilai barang bukti hasil temuan terlalu kecil untuk di TL ke tingkat projustitia	lakukan pendalaman informasi terhadap target sebelum penindakan	30 Mei 2025	operasi penindakan terhadap target	target perkara tercapai	Close
		Mei	tidak ada kendala	Akan melakukan operasi penindakan terhadap sarana yang telah ditargetkan	Koordinasi dengan JPU dan Korwas PPNS terkait perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung	30 Juni 2025	Melakukan koordinasi yang intensif dengan JPU dan Korwas PPNS terkait perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung	Proses penyidikan sudah tahap 1	Close
		Juni	Adanya P.19 terhadap perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung	Pengiriman berkas perkara (tahap I) ke Jaksa	Pemenuhan P.19 oleh Penyidik atas petunjuk yang diberikan oleh Jaksa	31 Juli 2025	Koordinasi dengan Jaksa dalam pemenuhan kelengkapan formil dan materiil atas petunjuk Jaksa tersebut	P.21 dan tahap 2 dapat dilaksanakan pada TW 3	Close
		Juli	Tidak ada kendala	Adanya P.19 terhadap perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung. Telah dilakukan operasi penindakan terhadap	Koordinasi dengan Jaksa dan Korwas PPNS terkait proses penyidikan perkara yang ditangani	31 Agustus 2025	Koordinasi dengan Jaksa dan Korwas PPNS secara intensif terkait	Terlaksananya tahap 2 pada bulan Juli 2025, Proses penyidikan sesuai timeline	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
				hasil operasi intelijen yang menjadi target	Penyidik BBPOM di Bandar Lampung		penyidikan dan penindakan		
		Agustus	Tidak ada kendala	Perkara pertama yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung telah tahap 2 (selesai). SPDP perkara kedua telah disampaikan ke Jaksa.	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait proses penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	31 Agustus 2025	Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Perkara kedua telah tahap 1	Close
		September	Tidak ada kendala	Perkara kedua yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung telah tahap 1	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait proses penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	30-Sep-25	Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Perkara kedua telah P-21	Close
DR.3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Sampai dengan Maret	Adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian KAK Program, sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program bisa dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
			implementasinya terhadap jumlah target lokus, pelantikan kepala daerah dan cuti bersama lebaran						
		April	Tidak ada kendala	Advokasi direncanakan bulan April 2025	Pelaksanaan Advokasi di bulan April 2025	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO dan renlak Balai	Realisasi sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO dan renlak Balai	Close
		Mei	Tidak ada kendala	Kegiatan tahap 2 dan 3 yaitu sosialisasi dan bimtek sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan bulan Mei 2025	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung selatan	Mei 2025	Pelaksanaan tahap 2 dan 3 pada bulan Mei 2025	Terlaksananya kegiatan tahap 2 dan 3 pada bulan Mei 2025	Close
		Juni	Pada bulan Juni bertepatan dengan ujian sekolah dan kemudian libur sekolah sehingga beberapa sekolah yang bisa	Kegiatan tahap 4 yaitu monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan bulan Juni 2025	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah	Agustus 2025	Pelaksanaan tahap 4 dilanjutkan pada bulan Juli dan Agustus 2025	Terlaksananya kegiatan tahap 4 paling lambat pada bulan Agustus 2025	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
			melaksanakan kegiatan tahap 4						
		Juli	Tidak ada kendala	Pelaksanaan tahap 4 dilaksanakan bulan Juli dan Agustus 2025	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah	Agustus 2025	Pelaksanaan tahap 4 bulan Juli 2025	Terlaksananya tahap 4 pada bulan Juli 2025	Close
		Agustus	Tidak ada kendala	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Terlaksananya pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
		September	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Sep-25	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 12 sekolah dan pengawalan 20 sekolah (intervensi tahun 2024)	Close
DR.3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Desa Pangan Aman	Sampai dengan Maret	Belum ada ketetapan pastinya terkait anggaran dan target, sehingga masih terus dilakukan penyesuaian.	Anggaran dan target mengacu kepada baseline 2024	Melakukan koordinasi awal dengan stakeholder untuk menentukan desa yang akan menjadi lokus intervensi, untuk	triwulan 2 tahun 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
					dapat segera terlaksana Advokasi				
		April	Tidak ada kendala	Belum dilakukan Advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang akan menjadi lokus intervensi	Pelaksanaan Advokasi di bulan April 2025	April 2025	Akan melaksanakan Advokasi pada tanggal 22 April 2025	Advokasi telah terlaksana di tanggal 22 April 2025	Close
		Mei	tidak ada kendala	Melakukan Pelatihan Kader untuk 5 target Desa intervensi	Berkoordinasi dengan aparat Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) untuk melaksanakan Pelatihan Kader dan 2 Desa yang melaksanakan Bimtek Komunitas	Pelatihan Kader akan selesai pada bulan Mei 2025, Bimtek Komunitas akan dilakukan di 2 Desa di bulan Mei	Menyelesaikan sampai tahap Bimtek Komunitas di bulan Juni 2025	Pelatihan Kader lengkap sudah dilaksanakan di 5 Desa, dan Bimtek Komunitas di 2 Desa	Close
		Juni	Tidak ada kendala	Pelatihan kader dan Bimtek Komunitas sudah berjalan sesuai timeline	Berkoordinasi secara berkala dengan TKPD	Juli 2025	Memantau kelengkapan dokumen untuk tahapan monev yang meliputi SK TKPD dan Kader, pembuatan Profil Desa dan Rencana Aksi terkait kemandirian di Desa	Monev akan dituntaskan sampai bulan Juli 2025	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		Juli	Tidak ada kendala	Memantau kelengkapan dokumen untuk tahapan monev yang meliputi SK TKPD dan Kader, pembuatan Profil Desa dan Rencana Aksi terkait kemandirian pangan di Desa	Koordinasi kepada Desa untuk mulai menyusun rencana implementasi kegiatan yang sudah dibuat di Dokumen Rencana Aksi Desa terkait Keamanan Pangan	Juli 2025	Memastikan dokumen Desa sudah lengkap	Dokumen SK TKPD dan Kader sudah lengkap	Close
		Agustus	Tidak ada kendala	Tahapan Desa baru sampai Monev, belum Pengawasan Desa/Kelurahan/Pekon intervensi 2024	Melakukan pengawasan untuk Desa /Kelurahan intervensi 2024 di Kota Bandar Lampung	Sep-25	Pengawasan Desa intervensi tahun 2024 baru dilaksanakan untuk Desa/Pekon di Kabupaten Lampung Barat pada bulan Agustus 2025	Terlaksananya pengawasan 4 Desa/Pekon di Lampung Barat intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
		September	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Sep-25	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 5 Desa dan pengawasan 9 Desa intervensi di tahun 2024	Close
DR.3165.QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Sampai dengan Maret	Adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian KAK Program, sehingga UPT	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program bisa dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
			harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus, pelantikan kepala daerah dan cuti bersama lebaran		- Apr 2025 (TW 1 - TW 2)				
		April	Tidak ada kendala	Advokasi direncanakan bulan April 2025	Pelaksanaan Advokasi di bulan April 2025	April 2025	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO dan renlak Balai	Realisasi sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO dan renlak Balai	Close
		Mei	Tidak ada kendala	Kegiatan tahap 2 yaitu bimtek dan penyuluhan komunitas pasar dan 3 yaitu sosialisasi keamanan pangan pasar direncanakan bulan Mei 2025	Melakukan koordinasi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Selatan dan Ka UPT Pasar Natar	Mei 2025	Pelaksanaan tahap 2 dan 3 pada bulan Mei 2025	Terlaksananya kegiatan tahap 2 dan 3 pada bulan Mei 2025	Close
		Juni	Tidak ada kendala	Kegiatan tahap 4 yaitu pengawasan kewanaman pangan di pasar direncanakan bulan Juni 2025	Melakukan koordinasi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Selatan dan Ka UPT Pasar Natar	Juni 2025	Pelaksanaan tahap 4 pada bulan Juni 2025	Terlaksananya kegiatan tahap 4 pada bulan Mei 2025	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		Juli	Tidak ada kendala	Kegiatan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Juli dan Agustus 2025	Melakukan koordinasi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung, Ka UPT Pasar Liwa, pasar Tamin, pasar Cimeng	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Juli dan Agustus 2024	Terlaksananya pengawalan pasar intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
		Agustus	Tidak ada kendala	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Melakukan koordinasi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung, Ka UPT Pasar Liwa, pasar Tamin, pasar Cimeng	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Terlaksananya pengawalan pasar intervensi tahun 2024 pada bulan Agustus 2025	Close
		September	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Agustus 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 1 pasar dan pengawalan 3 pasar (intervensi tahun 2024)	Close
DR.3165.QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	April	Tidak ada kendala	Perencanaan di bulan februari		Februari	Pelaksanaan kie bulan februari	Terlaksana sesuai rencana	close
DR.3165.QDG - Fasilitas	001 - UMKM yang didampingi dalam	Juni	2 UMK pengganti yang	2 UMK pengganti yang diperoleh di bulan Juni	Melaksanakan Bimtek CPPOB	Agustus 2025	Melaksanakan Bimtek CPPOB	Seluruh UMK Pendampingan	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
dan Pembinaan UMKM	pemenuhan standar oleh UPT		diperoleh di bulan Juni 2025 belum mendapatkan Bimtek CPPOB	2025 belum mendapatkan Bimtek CPPOB	untuk 2 UMK pengganti yang diperoleh di bulan Juni 2025		untuk 2 UMK pengganti yang diperoleh di bulan Juni 2025	Pangan Olahan (19 UMK) telah memperoleh Bimtek CPPOB	
DR.3165.QDG - Fasilitas dan Pembinaan UMKM DR.3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT 001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Juli	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	s.d. Des 2025	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	progress
		Agustus	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	s.d. Des 2025	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	progress
		September	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	Sesuai renlak	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	progress
		Sampai dengan Maret	Kebijakan Inpres 1 Tahun 2025, dilakukan Efisiensi anggaran berjalan sampai bulan Maret 2025 menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun. Selanjutnya adanya relaksasi anggaran target kembali ke	Capaian 10,93% dari target 439 produk	Menyusun Renlak dengan mendistribusikan sisa sampel (391 sampel), dan melaksanakan sampling sesuai renlak bulan April-Desember 2025	Desember 2025	-Pelaksanaan sampling sesuai dengan renlak	target RO tercapai sesuai renlak	progres

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
			target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil						
DR.3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk DR.3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT 002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	April	Relaksasi anggaran pada awal TW 2 menyebabkan perubahan renlak sampling sehingga membutuhkan penyesuaian	Realisasi jumlah sampel yang di sampling sampai bulan april masih rendah dibandingkan dengan target tahunan	- membuat renlak baru pasca relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran	April - Des 2025	- Menyusun renlak baru pasca relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran	Target tahunan dapat tercapai	progres
		Mei	capaian sampling belum optimal	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Juni 2025	melaksanakan sampling 45 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		Juni	realisasi sampling belum optimal	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Juli 2025	melaksanakan sampling 50 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		Juli	realisasi sampling belum optimal	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Agustus 2025	melaksanakan sampling 55 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		Agustus	realisasi sampling sesuai target	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Sep-25	melaksanakan sampling 61 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		September	realisasi sampling sesuai target	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Oktober 2025	melaksanakan sampling 45 sampel	realisasi sesuai renlak	close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		Sampai dengan Maret	Kebijakan Inpres 1 Tahun 2025, dilakukan Efisiensi anggaran berjalan sampai bulan Maret 2025 menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun. Selanjutnya adanya relaksasi anggaran target kembali ke target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil	Capaian 7,37% dari target 1085 produk	Menyusun Renlak dengan mendistribusikan sisa sampel (1005 sampel), dan melaksanakan sampling sesuai renlak bulan April-Desember 2025	Desember 2025	-Pelaksanaan sampling sesuai dengan renlak	target RO tercapai sesuai renlak	progres
DR.3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk DR.3165.QIC - Pengawasan dan	002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT 001 - Sarana Produksi Obat dan	April	Relaksasi anggaran pada awal TW 2 menyebabkan perubahan renlak sampling sehingga membutuhkan penyesuaian	Realisasi jumlah sampel yang di sampling sampai bulan april masih rendah dibandingkan dengan taregt tahunan	- membuat renlak baru pasca relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran	April - Des 2025	- Menyusun renlak baru pasca relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran	Target tahunan dapat tercapai	progres

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
Pengendalian Lembaga	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Mei	capaian sampling belum optimal	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Juni 2025	melaksanakan sampling 151 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		Juni	realisasi sampling belum optimal	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Juli 2025	melaksanakan sampling 156 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		Juli	realisasi sampling belum optimal	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Agustus 2025	melaksanakan sampling 151 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		Agustus	realisasi sampling sesuai target	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Sep-25	melaksanakan sampling 155 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		September	realisasi sampling sesuai target	realisasi masih rendah dibandingkan target tahunan	melaksanakan sampling sesuai renlak relaksasi	Oktober 2025	melaksanakan sampling 120 sampel	realisasi sesuai renlak	close
		April	Penyesuaian terhadap relaksasi anggaran dan sinkronisasi data antara inspeksi dan sertifikasi	Data inspeksi belum sinkron dan capaian rendah	- Membuat renlak baru dan sinkronisasi data	April-Des 2025	- Menyusun renlak - Menev data pemeriksaan	Target tahunan tercapai	Close
DR.3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga DR.3165.QIC - Pengawasan dan	001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT 003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Mei	Capaian inspeksi belum masih belum proporsional terhadap target 1 tahun	Persen capaian masih rendah	Penambahan jumlah capaian	Mei 2025	Melaksanakan inspeksi 17 sarana	Ada penambahan capaian 17 sarana	Close
		Juni	Capaian inspeksi belum masih belum proporsional	Persen capaian masih rendah	Penambahan jumlah capaian	Juni 2025	Melaksanakan inspeksi 17 sarana	Ada penambahan capaian 17 sarana	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
Pengendalian Lembaga			terhadap target 1 tahun						
		Juli	Tidak ada kendala	Capaian terhadap target setahun 63,71 %	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai renlak	Des 2025	Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	realisasi sesuai renlak	close
		April	Penyesuaian inspeksi dengan sampling pangan fortifikasi	Renlak inspeksi belum menyesuaikan dengan rencana sampling	- Membuat renlak baru	April-Des 2025	- menyusun renlak baru	Target tahunan tercapai	Close
DR.3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga DR.3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT 004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Mei	Tidak ada capaian sesuai renlak	Capaian 7 sarana	Tidak ada capaian	Mei 2025	Tidak ada	Sesuai renlak	Close
		Juni	Tidak ada capaian sesuai renlak	Capaian 7 sarana	Tidak ada capaian	Mei 2025	Tidak ada	Sesuai renlak	Close
		Juli	Tidak ada capaian pada bulan Juli, seusai renlak	Capaian 7 sarana	Tidak ada capaian	Des 2025	Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	Sesuai renlak	close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		Agustus	Tidak ada kendala	Capaian pemeriksaan 7 / 37 sarana atau 18,9%	Pemeriksaan sarana agustus 13%	Agustus 2025	Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	realisasi sesuai renlak	close
		September	Tidak ada kendala	Capaian pemeriksaan 6 / 37 sarana atau 16,2%	Pemeriksaan sesuai renlak	Sep-25	Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	realisasi sesuai renlak	close
		Sampai dengan Maret	Kebijakan adanya Efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun. Adanya relaksasi anggaran target kembali ke target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil	Capaian sampai TW1 sangat kecil	1. Penyusunan renlak pasca relaksasi dengan target RO kembali ke target awal 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak pasca relaksasi anggaran	1. April 2025 2. Kegiatan Bulan April telah menyesuaikan dengan renlak pasca relaksasi	1. Penyusunan renlak pasca relaksasi dengan target RO kembali ke target awal 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak pasca relaksasi anggaran	Capaian RO perbulan sesuai renlak yang ditetapkan	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
DR.3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga DR.3165.RAB - Sarana Bidang Kesehatan	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT 001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	April	Adanya relaksasi anggaran menyebabkan target dalam satu tahun berubah mengikuti target awal	Realisasi Jumlah sarana masih rendah dibandingkan dengan taregt tahunan	Melaksanakan renlak penyesuaian pasca relaksasi anggaran	April - Des 2025	Melaksanakan renlak penyesuaian pasca relaksasi anggaran	Realisasi tahunan tercapai sesuai target	proges
		Juli	Tidak ada kendala	Capaian terhadap target setahun 62,92 %	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target tercapai 100 %	Proges
		Agustus	Tidak ada kendala	Capaian terhadap target setahun 75,23 %	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target tercapai 100 %	Proges
		September	Tidak ada kendala	Target sarana yang diperiksa telah sesuai dengan renlak	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target pemeriksaan sarana selesai tepat waktu	Progress

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
		Sampai dengan Maret	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga harus dilakukan pembatalan kontrak pengadaan alat laboratorium yang sudah berkontrak pra DIPA (Desember 2024) dan kontrak Bulan Januari 2025. Relaksasi anggaran pengadaan alat laboratorium baru terbit pada bulan Februari sehingga harus dilakukan proses pengadaan ulang	Realisasi pengadaan alat laboratorium terlambat	Pelaksanaan proses pengadaan alat laboratorium sesuai prioritas dan kecukupan anggaran segera setelah relaksasi anggaran belanja modal alat laboratorium	TW II dan III	Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Progres

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	Bulan	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/ Close)
DR.3165.RAB - Sarana Bidang Kesehatan WA.6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 994 - Layanan Perkantoran	April	Adanya blokir pada sebagian anggaran alat laboratorium	Pengadaan alat lab dilakukan sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	Melaksanakan pengadaan alat laboratorium sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	April - Des 2025	Melaksanakan pengadaan alat laboratorium sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	Target pengadaan alat laboratorium dapat tercapai	Progress
		Sampai dengan Maret	adanya kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi capaian RO	tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan	merencanakan kegiatan prioritas dan melakukan penghematan	Desember 2025	melaksanakan kegiatan prioritas dan penghematan energi dan air	target RO tercapai	Progres
WA.6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	April	Adanya Efisiensi Anggaran	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Menyusun perencanaan sesuai dengan anggaran tersedia	April - Des 2025	Membuat renlak menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Target Tercapai	Progres

Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
A	Perencanaan Kinerja			
	A1. Menyusun matriks reviu target untuk seluruh indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi penetapan target	Menyusun kertas kerja penetapan target IKSK tahun 2025-2029 IKU Utama dan Direktif penugasan Balai Besar POM di Bandar Lampung	TW I TAHUN 2025	1. Kertas Kerja Penetapan Target IKU tahun 2025-2029 2. Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Direktif Tahun 2025
	A2. Menyusun SK Penetapan IKU yang memuat seluruh indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	Menyusun SK IKU Tahun 2025 dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029	TW I TAHUN 2025	1. SK IKU Tahun 2025
	A3. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Melakukan crosscek untuk memastikan bahwa penyajian target dan realisasi indikator kinerja pada dokumen SAKIP telah selaras.	TW IV TAHUN 2025	1. Laporan Kinerja Tahun 2024 2. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 3. RAPK Bulan Desember Tahun 2024 4. Laporan Evaluasi Internal TW I-III Tahun 2025 5. Laporan Kinerja Interim TW I-III Tahun 2025
B	Pengukuran Kinerja			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	B1. Menyempurnakan SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja :	Melakukan revisi dokumen SOP mikro terkait SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dengan menyempurnakan penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dan menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data	TW II TAHUN 2025	1. SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja BBPOM di Bandar Lampung.
	• Penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja			
	• Menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	B2. Mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja pada Notulen rapat evaluasi internal;	Arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja telah terdokumentasi pada laporan evaluasi internal TW IV Tahun 2024 dan TW 1 Tahun 2025 dan disahkan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung.	TW IV TAHUN 2025	Laporan Evaluasi Internal BBPOM di Bandar Lampung TW IV Tahun 2024 dan TW I-III Tahun 2025
	B3. Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;	Menyusun SOP pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi.	TW I TAHUN 2025	1. SOP Mikro Nomor POM-10.01/CFM.01/SOP.08/IK.6A.01 tentang Pemberian Reward (Penghargaan) Pegawai 2. SOP Mikro Nomor POM-10.01/CFM.01/SOP.08/IK.6A.02 tentang Penjatuhan Punishment (Sanksi) Pegawai 3. SOP Mikro Nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.6A.03 tentang Pemberian Reward dan Punishment Kinerja dan Anggaran
	B4. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai	Menginput analisis kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.	TW IV TAHUN 2025	1. Tangkapan Layar Simetris E-Performance Tahun 2024 2. Tangkapan Layar/Hasil download Simetris E-Performance Tahun 2025
C	Pelaporan Kinerja			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	C1. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan	Menyusun laporan kinerja interim yang dilengkapi dengan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya, dan Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi	TW IV TAHUN 2025	LAPORAN KINERJA INTERIM TW I-III TAHUN 2025
	• Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;			
	• Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya			
	• Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi			
	C2. Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;	Menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai.	TW I Tahun 2025	Laporan Kinerja Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	C3. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Melakukan croSKcek untuk memastikan bahwa penyajian target dan realisasi indikator kinerja pada dokumen SAKIP telah selaras.	TW IV TAHUN 2025	1. Laporan Kinerja Tahun 20242. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 20243. RAPK Bulan Desember Tahun 20244. Laporan Evaluasi Internal TW I-III Tahun 20255. Laporan Kinerja Interim TW I-III Tahun 2025
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	D1. Menyusun SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung yang menetapkan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja;	Menyusun SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan menetapkan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.	TW II Tahun 2025	SK TIM AKUNTABILITAS dengan penetapan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.
	D2. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim SAKIP terkait implementasi SAKIP	Personil TIM SAKIP yang terdiri dari Ketua Tim, Tim Lapkin dan Pokja Akuntabilitas melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP seluruhnya di TW 2.	TW II Tahun 2025	Laporan Pengembangan Kompetensi SAKIP Tahun 2025.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	D3. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya; Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target; dan Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai)	TW IV TAHUN 2025	1. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 2. Laporan Evaluasi Internal TW I-III Tahun 2025
	• Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya			
	• Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target;			
	• Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai)			

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan mempunyai tugas mengelola keuangan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan UU No.9 Tahun 2020 dan Kepres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, untuk melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Sampai dengan triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi Dipa 1: Revisi Penyesuaian data monsakti dan omspan 2024 periode 31 Januari 2025.
2. Revisi Dipa 2: Revisi Pemblokiran Mandiri Periode 20 Februari 2025.
3. Revisi Dipa 3: Revisi Optimalisasi Belanja Modal periode 12 Maret 2025.
4. Revisi Dipa 4: Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran periode 25 Maret 2025.
5. Revisi DIPA 5: Revisi Halaman III DIPA periode 23 April 2025.
6. Revisi DIPA 6: Revisi Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai dan Anggaran CASN TA. 2025 tanggal periode 1 Juli 2025.
7. Revisi DIPA 7: Revisi Halaman III DIPA periode 13 Oktober 2025.
8. Revisi POK dengan kewenangan Kepala BBPOM di Bandar Lampung.

Selain itu, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran serta percepatan pengadaan barang dan jasa terutama untuk alat laboratorium yang mendesak untuk dilakukan pengadaan dikarenakan anggaran belanja modal masih dalam kebijakan efisiensi.

Berikut adalah realisasi anggaran yang dicapai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sampai dengan Triwulan III Tahun 2025:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

NO	(KODE) PROGRAM	KETERA- NGAN	B.PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	REALISASI
1	(3165) Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Pagu	0	9.428.291.000	10.893.612.000	20.321.903.000
		Realisasi	0 0%	4.058.143.136 (43,04%)	6.409,879.080 (58,84%)	10.468.022.216 (51,51%)
		Sisa	0	5.370.147.864	4.483.732.920	9.853.880.784
2	(6384) Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Pagu	6.806.821.000	4.730.772.000	0	11.537.593.000
		Realisasi	5.167.905.566 (75,92%)	2.093.881.915 (44,26%)	0 0%	7.261.787.481 (62,94%)
		Sisa	1.638.915.434	2.636.890.085	0	4.275.805.519
Grand Total		Pagu	6.806.821.000	14.159.063.000	10.893.612.000	31.859.496.000
		Realisasi	5.167.905.566 (75,92%)	6.152.025.051 (43,45%)	6.409.879.080 (58,84%)	17.729.809.697 (55,65%)
		Sisa	1.638.915.434	8.007.037.949	4.483.732.920	14.129.686303

Sumber: Aplikasi OMSPAN

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	98,66	111,17	465.451.665	511.816.593	109,96%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	27.089.999	0	0,00%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,05	101,15	92.509.253	78.707.752	85,08%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	69.381.940	59.030.814	85,08%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,29	115,64	37.994.872	32.326.398	85,08%

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	85,58	108,33	32.158.489	37.824.320	117,62%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	96,88	107,05	3.296.986	2.815.623	85,40%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,58	109,43	55.577.771	47.463.363	85,40%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	99,24	105,02	184.441.314	205.747.211	111,55%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase sarana distribusi	92	99,14	107,76	46.110.328	54.626.081	118,47%

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73	99,94	106,63	13.398.000	6.857.270	51,18%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89	5.742.000	2.938.830	51,18%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	7.285.000	4.252.371	58,37%
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar	76,7	77,7	101,30	8.260.245.836	8.259.500.669	99,99%

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		Kemampuan Laboratorium						
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	130.504.125	111.034.151	85,08%
16	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	70,27	108,11	18.935.700	14.388.000	75,98%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	91,5	102,12	2.065.499.759	687.278.810	33,27%
18	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100,00	317.064.902	41.458.900	13,08%
19	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja	Jumlah desa pangan aman	95	100	105,26	547.554.636	56.721.500	10,36%

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	BBPOM di Bandar Lampung							
20	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	85.717.596	15.842.000	18,48%
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,33	94,05	106,48	131.177.198	14.081.638	10,73%
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	51	61,67	120,92	251.971.237	154.644.304	61,37%
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	85.864.764	8.085.000	9,42%

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
24	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	51.897.999	16.639.620	32,06%
25	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14%
26	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14%
27	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14%
28	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14

c. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Perbandingan anggaran per Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	465.451.665,00	511.816.593,00	109,96%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.089.999,00	-	-

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.509.253,48	78.707.752,48	85,08%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	69.381.940,11	59.030.814,36	85,08%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37.994.871,97	32.326.398,34	85,08%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	32.158.488,80	37.824.319,50	117,62%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.296.986,41	2.815.623,22	85,40%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55.577.770,89	47.463.362,78	85,40%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	184.441.313,52	205.747.211,40	111,55%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46.110.328,38	54.626.081,10	118,47%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	13.398.000,00	6.857.270,00	51,18%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	5.742.000,00	2.938.830,00	51,18%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	7.285.000,00	4.252.371,00	58,37%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8.260.245.836,00	8.259.500.669,00	99,99%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	130.504.125,45	111.034.150,82	85,08%
		TOTAL SS1	9.431.187.579,00	9.414.941.447,00	99,83%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18.935.700,00	14.388.000,00	75,98%
		TOTAL SS2	18.935.700,00	14.388.000,00	75,98%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2.065.499.759,00	687.278.810,00	33,27%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	317.064.902,00	41.458.900,00	13,08%
		Jumlah desa pangan aman	547.554.636,00	56.721.500,00	10,36%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	85.717.596,00	15.842.000,00	18,48%
		TOTAL SS3	3.015.836.893,00	801.301.210,00	26,57%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	131.177.198,00	14.081.638,00	10,73%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		TOTAL SS4	131.177.198,00	14.081.638,00	10,73%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	251.971.237,00	154.644.304,00	61,37%
		TOTAL SS5	251.971.237,00	154.644.304,00	61,37%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	85.864.764,00	8.085.000,00	9,42%
		TOTAL SS6	85.864.764,00	8.085.000,00	9,42%
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	51.897.999,00	16.639.620,00	32,06%
		TOTAL SS7	51.897.999,00	16.639.620,00	32,06%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2.026.366.549,50	1.826.496.869,50	90,14%
		Nilai AKIP UPT BPOM	2.026.366.549,50	1.826.496.869,50	90,14%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2.026.366.549,50	1.826.496.869,50	90,14%
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.026.366.549,50	1.826.496.869,50	90,14%
		TOTAL SS8	8.105.466.198,00	7.305.987.478,00	90,14%

d. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Realisasi anggaran per kegiatan di Balai Besar POM di Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi s.d Maret	Capaian s.d Maret	Pagu	Realisasi s.d Maret	Capaian s.d Maret
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	64,29%	122.664.000	8.085.000	6,59%
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	526	966	183,65%	74.140.000	16.639.620	22,44%
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.283	2888	31,11%	2.824.155.000	645.992.013	22,87%
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	75,00%	524.000.000	43.940.997	8,39%
5.	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	21	67,74%	132.511.000	41.286.797	31,16%
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00%	50.000.000	-	0,00%
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	0	0,00%	80.000.000	-	0,00%
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00%	1.318.662.000	-	0,00%
9.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	75,00%	2.187.493.000	1.849.621.589	84,55%
10.	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	3	2	66,67%	334.197.000	154.644.304	46,27%
11.	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12	12	100,00%	469.164.000	41.458.900	8,84%
12.	Desa Pangan Aman	5	5	100,00%	782.221.000	56.721.500	7,25%
13.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00%	126.919.000	15.842.000	12,48%
14.	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00%	38.700.000	-	0,00%

15.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	0	94,05%	187.396.000	14.081.638	7,51%
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439	375	85,42%	392.584.000	281.099.116	71,60%
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.085	874	80,55%	585.971.000	511.816.593	87,35%
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	124	93	75,00%	93.452.000	55.865.540	59,78%
19.	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	24	26	108,33%	27.051.000	14.388.000	53,19%
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	642	545	84,89%	525.673.000	306.659.529	58,34%
21.	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00%	9.444.950.000	6.409.879.080	67,87%
22.	Layanan BMN	1	0	75,00%	8.000.000	-	0,00%
23.	Layanan Perkantoran	1	0	75,00%	11.529.593.000	7.261.972.481	62,99%

3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran

Perhitungan capaian efisiensi anggaran dilakukan terhadap 17 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Efisiensi Anggaran

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	98,66	111,17	465.451.665	511.816.593	109,96	1,01	0,01	100 % (Efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	27.089.999	0	0,00	#VALUE!	#VALUE!	-

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,05	101,15	92.509.253	78.707.752	85,08	1,19	0,19	100 % (Efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	69.381.940	59.030.814	85,08	1,18	0,18	100 % (Efisien)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,29	115,64	37.994.872	32.326.398	85,08	1,36	0,36	95 % (Efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	85,58	108,33	32.158.489	37.824.320	117,62	0,92	-0,08	(Tidak Efisien)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	96,88	107,05	3.296.986	2.815.623	85,40	1,25	0,25	95 % (Efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,58	109,43	55.577.771	47.463.363	85,40	1,28	0,28	95 % (Efisien)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	99,24	105,02	184.441.314	205.747.211	111,55	0,94	-0,06	(Tidak Efisien)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	99,14	107,76	46.110.328	54.626.081	118,47	0,91	-0,09	(Tidak Efisien)
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73	99,94	106,63	13.398.000	6.857.270	51,18	2,08	1,08	86 % (Tidak Efisien)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89	5.742.000	2.938.830	51,18	2,15	1,15	86 % (Tidak Efisien)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	7.285.000	4.252.371	58,37	#VALUE!	#VALUE!	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,7	77,7	101,30	8.260.245.836	8.259.500.669	99,99	1,01	0,01	100 % (Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	130.504.125	111.034.151	85,08	#VALUE!	#VALUE!	-
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	70,27	108,11	18.935.700	14.388.000	75,98	1,42	0,42	92 % (Efisien)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	91,5	102,12	2.065.499.759	687.278.810	33,27	3,07	2,07	75 % (Tidak Efisien)
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan keamanan pangan	100	100	100,00	317.064.902	41.458.900	13,08	7,65	6,65	75 % (Tidak Efisien)
19	Jumlah desa pangan aman	95	100	105,26	547.554.636	56.721.500	10,36	10,16	9,16	75 % (Tidak Efisien)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	85.717.596	15.842.000	18,48	5,41	4,41	75 % (Tidak Efisien)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	88,33	94,05	106,48	131.177.198	14.081.638	10,73	9,92	8,92	75 % (Tidak Efisien)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	51	61,67	120,92	251.971.237	154.644.304	61,37	1,97	0,97	88 % (Efisien)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	85.864.764	8.085.000	9,42	10,62	9,62	75 % (Tidak Efisien)
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	51.897.999	16.639.620	32,06	#VALUE!	#VALUE!	-
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-
26	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-
28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	2.026.366.550	1.826.496.870	90,14	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan tabel tersebut, rentang tingkat efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara - 0,09 – 9,62. Dapat diketahui bahwa dari perhitungan efisiensi anggaran pada 28 indikator utama didapatkan sebanyak 8 indikator tidak dapat didefinisikan tingkat efisiensinya dikarenakan tidak terdapat target dan realisasi kinerja pada triwulan III tahun 2025 yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Indeks Pelayanan Publik UPT, Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Indeks Manajemen Risiko UPT. Pada 20 indikator diketahui bahwa hanya terdapat 9 indikator yang telah efisien dalam pemanfaatan anggarannya yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung. Inefisiensi pemanfaatan anggaran pada 11 indikator lainnya pada umumnya disebabkan karena gap antara capaian kinerja dan capaian anggaran yang terlalu besar dikarenakan adanya kebijakan efisiensi/blokir yang masih berlangsung hingga triwulan III tahun 2025 sehingga pembiayaan ditekan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kinerja BBPOM di Bandar Lampung dan juga terdapat beberapa indikator yang realisasi kinerjanya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran terhadap RPD Triwulan III Tahun 2025.

Selanjutnya, tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,38	99,83	1,07	0,07	100 % (Efisien)
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	108,11	75,98	1,42	0,42	92 % (Efisien)
SS3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101,85	26,57	3,83	2,83	75 % (Tidak Efisien)
SS4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,48	10,73	9,92	8,92	75 % (Tidak Efisien)
SS5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110,00	61,37	1,79	0,79	90 % (Efisien)
SS6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	9,42	10,62	9,62	75 % (Tidak Efisien)
SS7	Layanan Publik UPT yang prima	-	32,06	-	-	-
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	90,14	-	-	-

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada 6 Sasaran Kegiatan yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, terdapat 3 Sasaran Kegiatan yang efisien dan 3 Sasaran Kegiatan yang tidak efisien dengan analisa sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada TW 3 Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp9.414.941.447,00 dari pagu anggaran Rp9.431.187.579,00 atau 99,83% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 106,38%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Anggaran pada Sasaran Kegiatan ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian serta sarana dan kegiatan penunjangnya, KIE farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, pengawasan iklan, pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian, peningkatan ruang lingkup pengujian, pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium serta pengadaan alat laboratorium.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Anggaran yang diserap pada TW 3 Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar 14.388.000,00 dari pagu anggaran Rp18.935.700,00 atau 75,98% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 108,11%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Efisiensi anggaran ini didukung oleh kesesuaian antara rencana pelaksanaan (renlak) terhadap capaian hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan fortifikasi dan ditindaklanjuti dan kesesuaian antara anggaran yang direncanakan terhadap serapan anggaran yang digunakan pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan fortifikasi.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada TW 3 Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp801.301.210,00 dari pagu anggaran Rp3.015.836.893,00 atau 26,57% dengan capaian Sasaran Kegiatan 101,85%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada Sasaran Kegiatan ini digunakan untuk kegiatan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media, serta pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pendampingan sekolah, desa dan pasar. Pencantuman RPD pada halaman III DIPA masih termasuk anggaran blokir sehingga tidak dapat terserap menjadi penyebab rendahnya prosentase realisasi terhadap target RPD. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti pada saat revisi halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2025.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Anggaran yang diserap pada TW 3 Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar Rp14.081.638,00 dari pagu anggaran Rp131.177.198,00 atau 10,73% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 106,48%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Capaian anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan kegiatan baik pada TW III berdasarkan ketersediaan anggaran efisiensi sesuai Inpres No. 1 tahun 2025. Sedangkan perhitungan dalam tabel di atas berdasarkan ketersediaan anggaran sebelum ditetapkan instruksi efisiensi anggaran. Tahapan kegiatan



pendampingan UMKM yakni KIE/Sosialisasi, seleksi UMKM target pendampingan, Bimtek (CPPOB/CPOTB/CPKB) dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan layanan meeting online seperti *Zoom Meeting* dan video call melalui media komunikasi *WhatsApp*. Pelaksanaan secara daring dilakukan untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.

5. Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada TW 3 Tahun 2025 Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp154.644.304,00 dari pagu anggaran Rp251.971.237,00 atau 61,37% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 110%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Efisiensi anggaran ini didukung oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran perjadi, belum digunakannya anggaran penangkapan dan penahanan karena 2 (dua) perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, dimana tersangka melakukan wajib lapor selama proses penyidikan.

6. Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada TW 3 Tahun 2025 Sasaran Kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp8.085.000,00 dari pagu anggaran Rp85.864.764,00 atau 9,42% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Anggaran pada Sasaran Kegiatan ini digunakan untuk kegiatan Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan; Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan dan Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan.

Program efisiensi penggunaan anggaran dari pemerintah berdampak pada realisasi anggaran pada substansi penindakan mengalami penurunan hal ini akibat dari adanya revisi anggaran dari perubahan regulasi terkait mekanisme pelaksanaan program yang telah dibuat. Revisi anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap rencana kerja dan penjadwalan ulang kegiatan. Hal ini berdampak langsung pada beberapa program kegiatan seperti pelatihan, pertemuan, koordinasi yang awalnya direncanakan secara luring akhirnya dilakukan secara daring hal ini mengakibatkan tidak terserapnya anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, rendahnya capaian realisasi anggaran pada Substansi Penindakan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yaitu sampai dengan bulan September kondisi anggaran masih diblokir sebesar 92% sehingga capaian anggaran rendah jika dibandingkan dengan anggaran sebelum dilakukan efisiensi. Efisiensi terhadap anggaran ini berdampak langsung pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan, sehingga sejumlah kegiatan yang semula direncanakan secara luring menjadi daring.

Perubahan bentuk pelaksanaan kegiatan ini menyebabkan biaya operasional, perjalanan dinas, dan akomodasi tidak terserap secara optimal. Meskipun secara administratif pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai output, namun secara finansial realisasi anggaran menjadi tampak rendah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan serapan anggaran, di mana capaian kinerja tercapai tetapi capaian realisasi anggaran rendah.

7. Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik UPT yang prima

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi pada Sasaran Kegiatan ini belum dapat diperhitungkan karena tidak ada capaian kinerja pada TW 3 Tahun 2025.

Anggaran yang telah terserap sebesar Rp16.639.620,00 dari pagu anggaran Rp51.897.999,00 atau 32,06%. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk audit dalam rangka ski/ske/labelisasi/registrasi/cdob/koordinasi lintas sektor dan sosialisasi program pengawasan melalui media cetak dan elektronik.

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi pada Sasaran Kegiatan ini belum dapat diperhitungkan karena tidak ada capaian kinerja pada TW 3 Tahun 2025. Anggaran yang telah terserap sebesar Rp7.305.987.478,00 dari pagu anggaran Rp8.105.466.198,00 atau 90,14%.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi diantaranya meskipun tidak tersedia SDM khusus, efisiensi bisa ditingkatkan dengan pembagian tugas yang jelas dan proporsional dalam tim ZI. Pada masing-masing pokja telah disusun sasaran kerja pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya pada pengisian LKE ZI dan pemantauan rencana kerja, Sinergi kegiatan ZI dengan kegiatan rutin sehingga mempermudah memperoleh data dukung seperti : sinergi kegiatan QMS dan SPIP dengan pokja tata laksana, sinergi kegiatan tata usaha dengan pokja akuntabilitas dan SDM, sinergi kegiatan pelayanan publik (infokom dan sertifikasi) dengan pokja pelayanan publik, sinergi kegiatan manajemen risiko dan SMAP dengan pokja pengawasan, pembinaan pegawai, layanan dukungan manajemen serta melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat pada seluruh parameter penilaian IKPA terutama untuk parameter RPD.

Tabel 3.11 Capaian Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	64,29	122.664.000	8.085.000	6,59	9,75	8,75	75 % (Tidak Efisien)
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	526	966	183,65	74.140.000	16.639.620	22,44	8,18	7,18	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
										(Tidak Efisien)
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.283	2888	31,11	2.824.155.000	645.992.013	22,87	1,36	0,36	95 % (Efisien)
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	75,00	524.000.000	43.940.997	8,39	8,94	7,94	75 % (Tidak Efisien)
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	21	67,74	132.511.000	41.286.797	31,16	2,17	1,17	86 % (Tidak Efisien)
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00	50.000.000	0	0,00	-	-	-
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	0	0,00	80.000.000	0	0,00	-	-	-
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00	1.318.662.000	0	0,00	-	-	-
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	75,00	2.187.493.000	1.849.621.589	84,55	0,89	-0,11	75 % (Tidak Efisien)
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	3	2	66,67	334.197.000	154.644.304	46,27	1,44	0,44	92 % (Efisien)
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12	12	100,00	469.164.000	41.458.900	8,84	11,32	10,32	75 % (Tidak Efisien)
12	Desa Pangan Aman	5	5	100,00	782.221.000	56.721.500	7,25	13,79	12,79	75 % (Tidak Efisien)
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	126.919.000	15.842.000	12,48	8,01	7,01	75 % (Tidak Efisien)
14	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	38.700.000	0	0,00	-	-	-
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	0	94,05	187.396.000	14.081.638	7,51	12,52	11,52	75 % (Tidak Efisien)
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439	375	85,42	392.584.000	281.099.116	71,60	1,19	0,19	100 % (Efisien)
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.085	874	80,55	585.971.000	511.816.593	87,35	0,92	-0,08	75 % (Tidak Efisien)
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	124	93	75,00	93.452.000	55.865.540	59,78	1,25	0,25	95 % (Efisien)
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	24	26	108,33	27.051.000	14.388.000	53,19	2,04	1,04	86 % (Tidak Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	642	545	84,89	525.673.000	306.659.529	58,34	1,46	0,46	92 % (Efisien)
21	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	67,91	9.444.950.000	6.409.879.080	67,87	1,00	0,00	100 % (Efisien)
22	Layanan BMN	1	0	75,00	8.000.000	0	0,00	-	-	-
23	Layanan Perkantoran	1	0	75,00	11.529.593.000	7.261.972.481	62,99	1,19	0,19	100 % (Efisien)

Untuk mendukung capaian 8 Sasaran Kegiatan, Balai Besar POM melaksanakan 23 kegiatan berdasarkan DIPA TA 2025. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 7 kegiatan efisien, 11 kegiatan tidak efisien dan 5 kegiatan tidak dapat didefinisikan. Rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -0,11 – 12,79. Masih banyaknya kegiatan yang tidak efisien pada umumnya disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025 sehingga Balai Besar POM di Bandar Lampung menekan pembiayaan seminimal mungkin dalam pelaksanaan kinerja. Hal ini menyebabkan terjadinya gap yang terlalu tinggi antara realisasi output dan realisasi anggaran. Hal ini terjadi pada rincian output Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT, Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan, Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT, Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT. Inefisiensi pada rincian output Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium disebabkan karena perhitungan kegiatan rutin laboratorium dihitung secara proporsional sampai dengan triwulan III tahun 2025 sedangkan serapan anggaran sudah tinggi dan kegiatan ini akan efisien pada akhir tahun.Selanjutnya, inefisiensi pada rincian outout Sampel Obat, Obat



Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT disebabkan karena masih rendahnya realisasi output sehingga perlu dilakukan percepatan realisasi sampling dan pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen pada triwulan IV tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim TW III BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah bentuk pertanggung jawaban sebagai perwujudan visi dan misi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025– 2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode rencana strategis tahun 2025-2029, terdapat 8 Sasaran Kegiatan dengan 28 indikator kinerja yang menjadi target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM pada Bulan Agustus Tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Bandar Lampung TW III tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **105,43%** dengan kriteria **“ISTIMEWA”**.

Pencapaian Nilai Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung pada TW Ili Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- i. Capaian Sasaran Kegiatan 1 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 106,38% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung pada TW III Tahun 2025.
- j. Capaian Sasaran Kegiatan 2 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 108,11% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM

di Bandar Lampung berhasil meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di TW III Tahun 2025.

- k. Capaian Sasaran Kegiatan 3 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 101,85% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW III Tahun 2025.
- l. Capaian Sasaran Kegiatan 4 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 106,48% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di TW III Tahun 2025.
- m. Capaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 110% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW III Tahun 2025.
- n. Capaian Sasaran Kegiatan 6 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100% dengan kriteria capaian **“Baik”** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW III Tahun 2025.
- o. Capaian Sasaran Kegiatan 8 belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW III Tahun 2025 namun BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya untuk melaksanakan Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang Prima.
- p. Capaian Sasaran Kegiatan 8 belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW III Tahun 2025 namun BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 20 indikator yang telah memperoleh realisasi kinerja pada triwulan III tahun 2025, seluruhnya telah mencapai target. Balai Besar POM di Bandar Lampung perlu untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian anggaran dan kinerja untuk dapat mengoptimalkan efisiensi terkait pemanfaatan anggaran serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator dan output agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, pada 8 indikator yang akan didiperoleh realisasi kinerjanya pada akhir tahun perlu untuk senantiasa dikawal progres pelaksanaan kegiatannya.

LAMPIRAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Rencana Kinerja Tahun 2025



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213
Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008)
Email : bpom_lampung@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

NOMOR HK.02.02.6A.09.24.222 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR
LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Bandar Lampung pada Tahun 2025, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Bandar Lampung tentang Rencana Kinerja Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun
2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 September 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANIPATIMAH ISFARJANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.09.24.222 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	94
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	97,29
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Bandar Lampung	14
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	90,50
		Nilai AKIP	81,49
		Nilai Kinerja Anggaran	89,10
		Indeks Manajemen Risiko	3,40

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

2. SK IKU TAHUN 2025



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213
Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008)
Email : bpom_lampung@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR
LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana

-3-

kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung
9.2	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung
9.3	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung
9.4	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI FATIMAH ISFARJANTI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.2 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.6 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT	90 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BPOM	
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,829,487,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,121,903,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,707,584,000

Bandar Lampung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (REVISI)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI FATIMAH ISFARJANTI
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas	94.5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.73 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.2 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.6 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.94 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 31.859.496.000 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20.321.903.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11.537.593.000

Bandar Lampung, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

5. RAPK AWAL BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	585,971,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,700,000
		03 - Persentase sampel Pangan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219,847,040

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82,442,640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90,294,320
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59,998,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3,738,080
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,368,720
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364,703,760

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91,175,940
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	19,140,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.38	24.38	48.75	51.46	51.46	51.46	51.46	65	65	65	65	65	27,051,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.2	12,432,443,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	2,824,155,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	40	60	70	80	90	100	100	100	12	469,164,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	40	50	70	80	90	100	100	100	5	782,221,000
		04 - Jumlah pasar pangan	20	25	25	50	60	70	80	90	100	100	100	1	126,919,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		aman berbasis komunitas													
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.33	13.33	22.5	36.67	45	58.33	61.67	66.67	83.5	85.33	90	91	187,396,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				10	21	33	45	54	59	67	75	85	334,197,000
7.	07 - Terlaksananya	01 - Persentase	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122,664,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar													
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	206,651,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3,420,061,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.9	3,420,061,500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,420,061,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	3,420,061,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														32,829,487,000	

BANDAR LAMPUNG, 12 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG


ANI FATIMAH ISFARJANTI

6. RAPK BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 REVISI KE-1



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	585.971.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219.847.040
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90.294.320
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59.998.500
		07 - Persentase sarana produksi	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3.738.080

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.368.720
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364.703.760
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91.175.940
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	19.140.000
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.38	24.38	48.75	51.46	51.46	51.46	51.46	65	65	65	65	65	27.051.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.2	12.432.443.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	2.824.155.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.33	13.33	22.5	50	65	71.67	76.67	81.67	88.33	93.33	96.67	91	187.396.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					10	21	34	45	55	65	75	85	334.197.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	206.651.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3.420.061.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.9	3.420.061.500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.420.061.500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	3.420.061.500
Total														32.829.487.000	

Bandar Lampung, 20 May 2025

Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung



[Handwritten signature]

Ani Fatmahanik Marjanti, S.Si., Apt., M.H.

7. RAPK BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 REVISI KE-2



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	585.971.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	109.923.520
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	45.147.160
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	64.369.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	4.709.981
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	79.396.819
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	351.007.960
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	93.215.740
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	13.398.000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	5.742.000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	7.285.000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan			75	75	75	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.2	12.951.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman												20	155.070.680
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.38	24.38	48.75	51.46	51.46	51.46	51.46	54.05	65	65	65	65	27.051.000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	2.956.666.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.33	13.33	22.5	50	65	71.67	76.67	81.67	88.33	93.33	96.67	16.94	187.396.000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan					10	21	34	38	51	61	71	85	334.197.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT	Olahan di UPT													
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 – Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	74.140.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3.047.898.250
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80,9	3.047.898.250
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.047.898.250
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,9	3.047.898.250
Total															31.859.496.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Intern dan Tahunan).

Bandar Lampung, 29 August 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

KERTAS KERJA RHPK TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	1085,00	99,47	81,48	82,87	94,46	89,57
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Ags	1085,00	98.05	90.17	100.00	93.85	95.52
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sep	1085,00	98.51	96.26	100.00	99.88	98.66

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Nama Indikator	Bulan	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juli	0,00	0,00	45,00	0,00
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Ags	0,00	0,00	45,00	0,00
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Sep	0,00	0,00	45,00	0,00

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	404,00	85,00	100,00	100,00	97,14	100,00	97,14	100,00	99,14
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	404,00	91,00	100,00	100,00	83,47	100,00	80,93	100,00	94,79
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	404,00	91,00	100,00	100,00	92,54	100,00	92,54	71,43	92,05

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan) Cara Perhitungan A : $\frac{\text{jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi}}{\text{total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi}} \times 100\%$				
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)
Juli	Susu kedelai	13	13	100%	30%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna pink	11	11	100%	30%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna putih	11	11	100%	30%
	Es teh	10	10	100%	30%
	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%
Agustus	Susu kedelai	13	13	100%	30%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna pink	11	11	100%	30%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna putih	11	11	100%	30%
	Es teh	10	10	100%	30%
	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%
September	Susu kedelai	13	13	100%	30%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna pink	11	11	100%	30%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna putih	11	11	100%	30%
	Es teh	10	10	100%	30%
	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%
	Nasi putih	12	12	100%	30%
	Fuyunghai	12	12	100%	30%
	Tahu	14	14	100%	30%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan) Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%				
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)
	sayur sawi + wortel	12	12	100%	30%
	saus tahu + saus asam manis	12	12	100%	30%
	susu UHT rasa coklat	5	5	100%	30%
	susu UHT fullcream	5	5	100%	30%
	Mie kuning	12	12	100%	30%
	Bakwan jagung	14	14	100%	30%
	Ayam	12	12	100%	30%
	Sayur sawi	12	12	100%	30%
	Pisang + semangka	7	7	100%	30%
	Sisa konsumsi	12	12	100%	30%
	Nasi goreng dan ayam sisa konsumsi	10	10	100%	30%
	Nasi goreng (SPPG)	10	10	100%	30%
	Ayam goreng (retain SPPG)	10	10	100%	30%
	Timun + kelengkeng	7	7	100%	30%
	susu UHT	8	8	100%	30%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM			
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%			
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)
Juli	Susu kedelai	13	13	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna pink	11	11	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna putih	11	11	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Es teh	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
Agustus	Susu kedelai	13	13	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM			
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%			
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)
	Susu kedelai sisa konsumsi warna pink	11	11	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna putih	11	11	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Es teh	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
September	Susu kedelai	13	13	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna pink	11	11	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM			
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%			
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)
	Susu kedelai sisa konsumsi warna putih	11	11	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Es teh	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Nasi putih	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Fuyunghai	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Tahu	14	14	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM			
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%			
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)
	sayur sawi + wortel	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	saus tahu + saus asam manis	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	susu UHT rasa coklat	5	5	100%	30%	4	4	100%	35%
	susu UHT fullcream	5	5	100%	30%	4	4	100%	35%
	Mie kuning	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Bakwan jagung	14	14	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Ayam	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM			
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%			
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)
	Sayur sawi	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Pisang + semangka	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Sisa konsumsi	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Nasi goreng dan ayam sisa konsumsi	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Nasi goreng (SPPG)	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	Ayam goreng (retain SPPG)	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM			
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%			
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100%))	Nilai (h = g*35%)
	Timun + kelengkeng	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%
	susu UHT	8	8	100%	30%	4	4	100%	35%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%				
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100%))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	
Juli	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	100%	35%	100%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%				
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	
	Nasi putih	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Fuyunghai	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	100%	35%	100%
	Tahu	14	14	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	sayur sawi + wortel	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
Agustus	saus tahu + saus asam manis	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	susu UHT rasa coklat	5	5	100%	30%	4	4	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	susu UHT fullcream	5	5	100%	30%	4	4	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Mie kuning	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli)	2 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Bakwan jagung	14	14	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%				
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100%))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	
						pangan terkemas	pangan terkemas							
September	Ayam	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Escherichia coli)	1 (Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Sayur sawi	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)		100%	35%	100%
	Pisang + semangka	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Sisa konsumsi	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli)		100%	35%	100%
	Nasi goreng dan ayam sisa konsumsi	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Nasi goreng (SPPG)	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Ayam goreng (retain SPPG)	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Timun + kelengkeng	7	7	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%				
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100%))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	
						pangan terkemas	pangan terkemas							
	susu UHT	8	8	100%	30%	4	4	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Juli	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,86	100,00	98,29
Agustus	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,86	100,00	98,29
September	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,86	100,00	98,29

6. Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Juli	79,00	69,29	100,00	84,65

Agustus	79,00	75,25	100,00	87,63
September	79,00	71,17	100,00	85,58

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Juli	88,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	91,67	95,83
Agustus	90,5	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	91,67	95,83
September	90,5	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	93,75	96,88

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Juli	80,00	67,00	68,00	98,53	68,00	68,00	100,00	68,00	68,00	100,00	68,00	68,00	99,51
Agustus	91,00	74,00	75,00	98,67	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	99,56	75,00	99,56
September	91,00	79,00	80,00	98,75	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00	99,58	80,00	99,58

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Juli	93,00	99,22	98,39	100,00	97,48	98,77

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Agustus	94.50	99.37	98.78	100.00	98.38	99.13
September	94.50	99.44	98.86	100.00	98.64	99.24

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Juli	80	88	20,00	87	88	69,20	86	88	9,77	98,98	88
Agustus	92	97	20,00	96	97	69,28	95	97	9,79	99,07	97
September	92	105	20,00	104	105	69,33	103	105	9,81	99,14	105

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Juli	93,13	100,00	100,00	100,00	100,00	99,32	99,86
Agustus	93,73	100,00	100,00	100,00	100,00	99,68	99,94
September	93,73	100,00	100,00	100,00	100,00	99,72	99,94

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Juli	51,46	7	37	18,92
Agustus	54,05	20	37	54,05
September	65	26	37	70,27

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

TW	Target Indikator (%)	Persentase Pemenuhan SRL (%)	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)	Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%)	Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%)	Realisasi (%)
Juli	76.2	78.90	81.10	80.00	46.00	76.30
Agustus	76.2	78.90	81.10	80.00	46.00	76.30
September	76.7	81.20	81.10	80.00	48.40	77.70

Unit Kerja : Balai Besar POM di Bandar Lampung
 Triwulan/Tahun : 3/2025
 Tanggal Penilaian : 23 September 2025
 Nama Tim Penilai : 1. Diah Lestari, S.Si., M.Si.
 2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Kendala Pemenuhan

Rencana Tindak Lanjut :

Düf

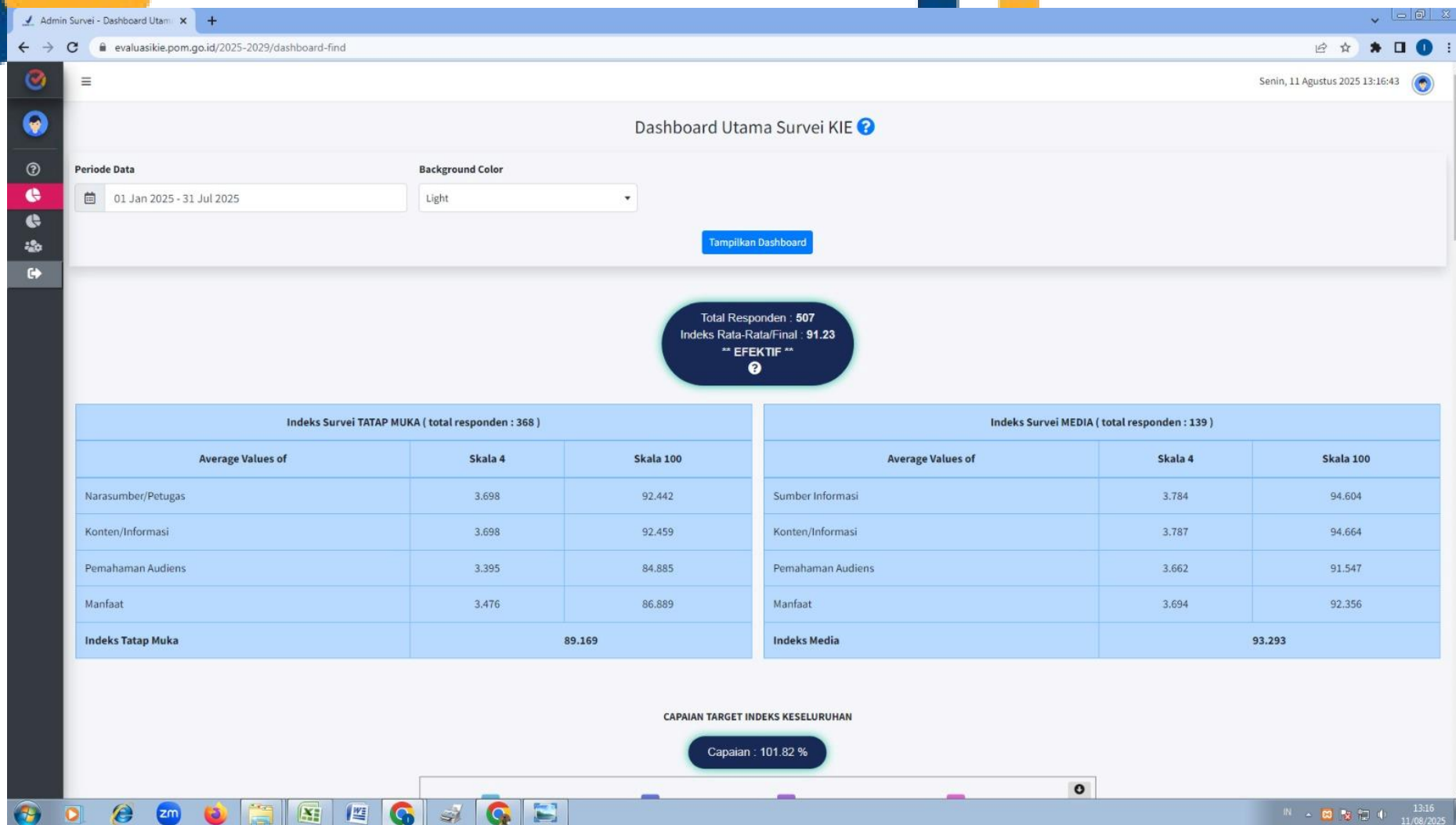


Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional



Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H

Bulan	Target Indikator (%)	Realisasi (%)
Juli	89.6	91,23
Agustus	89.6	91.23
September	89.6	91,50



Dashboard Utama Survei KIE ?

Periode Data



01 Jan 2025 - 31 Aug 2025

Background Color

Light

Tampilkan Dashboard

Total Responden : 507
Indeks Rata-Rata/Final : 91.23
** EFEKTIF **
?

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 368)

Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.698	92.442
Konten/Informasi	3.698	92.459
Pemahaman Audiens	3.395	84.885
Manfaat	3.476	86.889
Indeks Tatap Muka	89.17	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 139)

Average Values of	Skala 4	Skala 100
Sumber Informasi	3.784	94.604
Konten/Informasi	3.787	94.664
Pemahaman Audiens	3.662	91.547
Manfaat	3.694	92.356
Indeks Media	93.29	

Dashboard Utama Survei KIE ?

Periode Data



01 Jan 2025 - 30 Sep 2025

Background Color

Light

Tampilkan Dashboard

Total Responden : 527
Indeks Rata-Rata/Final : 91.5
**** EFEKTIF ****
?

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 388)

Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.713	92.832
Konten/Informasi	3.714	92.848
Pemahaman Audiens	3.424	85.599
Manfaat	3.503	87.564
Indeks Tatap Muka	89.71	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 139)

Average Values of	Skala 4	Skala 100
Sumber Informasi	3.784	94.604
Konten/Informasi	3.787	94.664
Pemahaman Audiens	3.662	91.547
Manfaat	3.694	92.356
Indeks Media	93.29	

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Juli	100	25,00	20,00	25,00	25,00		95,00
Agustus	100	25,00	20,00	25,00	25,00	5	100,00
September	100	25,00	20,00	25,00	25,00	5	100,00

16. Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Juli	85	25	25	20,00	20,00	0	90,00
Agustus	90	25	25	20,00	20,00	4,4	94,40
September	95	25	25	20,00	20,00	10	100,00

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00		90,00

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00

18. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Juli	76,67	75,00	60,00	95,00	76,67

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
Agustus	81,67	1800.00	65.00	95.00	93.33	21
September	88,33	1805.00	72.50	97.50	94.05	21

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Juli	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara a Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi i SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi i Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi i P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi i Tahap II	% Keberhasila n Perkara
Agustus	3	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	1	0	1	51,67
September	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,85	1	0	1	61,67

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Bulan	Target Indikator (%)	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)	Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)	Realisasi (%)
Juli	50.0	100.0			50.0
Agustus	50.0	100.0			50.0
September	50.0	100.0			50.0

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

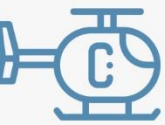
No.	Balai Besar POM di	Fungsi																	
		Patroli Siber									Profiling Siber								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Aceh																		
2.	Bandar Lampung																		
3.	Bandung																		
4.	Banjarbaru																		
5.	Denpasar																		
6.	Gorontalo																		
7.	Jakarta																		
8.	Jayapura																		
9.	Kupang																		
10.	Makassar																		
11.	Manado																		
12.	Mataram																		
13.	Medan																		
14.	Padang																		
15.	Palangkaraya																		
16.	Palembang																		
17.	Pekanbaru																		
18.	Pontianak																		
19.	Samarinda																		
20.	Semarang																		
21.	Serang																		
22.	Surabaya																		
23.	Yogyakarta																		

Keterangan:
 Tepat Waktu
 Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Agustus	91	100.00	97.06	98.53
September	91	100.00	100.00	100.00



BADAN POM



 lampung.pom.go.id

   @bpom.bandarlampung

 @bpomlampung

 BBPOM Lampung

 0821-8080-6008

